

**DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024**



TUGAS AKHIR / SKRIPSI

OLEH:

Muhammad Nur Apriyanto (2010413116)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Muhammad Nur Apriyanto
NIM : 2010413116
Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Apriyanto
NIM : 2010413116
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024"

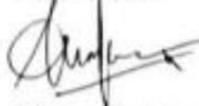
Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 28, Juli 2025

Yang menyetujui,



Muhammad Nur Apriyanto

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL.

NAMA : Muhammad Nur Apriyanto
NIM : 2010413116
PROGRAM STUDI : Ilmu Politik
JUDUL : **DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU
2024**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing

(Restu Rahmawati, S.Sos., MA.)

Penguji 1

(Dr. Ardli Johan, S.IP.,M.HI)

Penguji 2

(Lia Wulandari, S.Sos., M.PP)

Ketua Program Studi
Ilmu Politik

Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal Ujian :

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024

MUHAMMAD NUR APRIYANTO

ABSTRAK

Penyebaran hoaks menjelang pemilu menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi karena dapat memengaruhi opini publik dan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Pencegahan hoaks tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai aktor seperti Bawaslu, KPU, Kominfo, LSM, masyarakat sipil, serta platform media sosial. Dalam kerangka Actor-Network Theory (ANT), jaringan aktor yang dianalisis meliputi aktor manusia (lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum) serta aktor non-manusia (media sosial, regulasi, dan teknologi pemantau konten). Interaksi antar-aktor ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana strategi pencegahan hoaks dapat dirancang dan dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ANT untuk menelaah peran, relasi, dan dinamika kolaborasi antar-aktor dalam membangun strategi pencegahan hoaks di media sosial selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Hoaks, Media Sosial, Actor-Network Theory.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

***DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA
PEMILU 2024,***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

THE DYNAMICS OF MULTI-ACTOR RELATIONS IN THE PREVENTION OF HOAX DISSEMINATION ON SOCIAL MEDIA DURING THE 2024 GENERAL ELECTION

MUHAMMAD NUR APRIYANTO

ABSTRACT

The circulation of hoaxes in the pre-election period poses a serious threat to democratic integrity as it can influence public opinion and foster polarization in society. Preventing hoaxes cannot be carried out by a single actor alone; instead, it requires collaboration among various actors such as Bawaslu, KPU, the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), civil society organizations, the general public, and social media platforms. Within the framework of Actor-Network Theory (ANT), the actor-network analyzed consists of human actors (electoral institutions, government bodies, civil society organizations, and citizens) and non-human actors (social media platforms, regulations, and content-monitoring technologies). The interactions between these actors are key to understanding how preventive strategies against hoaxes can be designed and implemented. This research employs a qualitative method with ANT as the analytical approach to explore the roles, relations, and dynamics of multi-actor collaboration in shaping preventive strategies against hoaxes on social media during the 2024 election.

Keywords: 2024 General Election, Hoax, Social Media, Actor-Network Theory.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di UPNVJ. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Restu Rahmawati, S.Sos.,MA., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan arahan kepada saya dengan sabar dalam penyelesaian skripsi.
2. Dr. Ardli Johan, S.IP., M.HI dan Lia Wulandari, S.Sos., M.PP selaku dosen penguji I dan II yang telah memberikan saya masukan dan revisi yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi penulis
3. Bapak Bayu Sarkoro dan Alm. Ibu Sumirah, yang telah memberikan dukungan moral terhadap penulis serta menjadi motivasi penulis dalam segera menyelesaikan penulisan skripsi penulis
4. Suyudi Imam Prakoso sebagai saudara penulis yang selalu memberikan dukungan berarti untuk penulis.
5. Buriyah selaku orang yang selalu menemani serta melakukan dukungan moral terhadap saya sebagai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman kampus saya Adinda Nafiza Laksmi yang sudah memberikan dukungan moral terhadap saya.
7. Teman-teman dan keluarga besar Akara Space; Bang Kay, Kato, Kamp, Fikri, Damar, Fadhil lancelot, Bogel, Iki, Tubagus Airplane, Ka Azka, Muti, Deyva, Faris Fredrin, Iksan Nana, Ka Ica, Ka Ayu.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan saya dalam skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca. Terakhir, penulis

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik.

Jakarta, 25 Desember 2024,
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nur Apriyanto', with a horizontal line underneath.

Muhammad Nur Apriyanto

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Penelitian Terdahulu	20
2.2 Konsep dan Teori Penelitian.....	24
2.2.1 Konsep Penelitian.....	24
2.2.1.1 Pemilihan Umum.....	24
2.2.1.2 Media Sosial	26
2.2.1.3 Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	29
2.2.2 Teori Penelitian	30
2.2.2.1 Jaringan Aktor (Actor-Network Theory).....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Objek Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.3.1 Wawancara	38
3.3.2 Studi Pustaka	39
3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknis Analisis Data.....	41
3.6 Tabel Rencana Waktu.....	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4.1	Dinamika Hoaks di media sosial	43
4.2	Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial Pada Pemilu 2024	45
4.2.1	Penentuan Aktor Kunci (Momen Problematisasi) Dalam Dinamika Multi-Aktor Pada Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial.....	47
4.2.2	Proses Negosiasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024	74
4.2.3	Momen Pelibatan Multi Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024	88
4.2.4	Momen Mobilisasi Multi Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024	103
4.3	Tantangan yang dihadapi dalam Relasi Multi-Aktor untuk Melakukan Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024	120
BAB V		124
PENUTUP.....		124
5.1	KESIMPULAN	124
5.2	SARAN	127
LAMPIRAN.....		132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Temuan isu hoaks periode Agustus 2018-30 september 2019	3
Gambar 2. Pertumbuhan Hoaks Januari-Desember Tahun 2019	3
Gambar 3. Jumlah Hoaks Pemilu Di Media Sosial Juli-November 2023	4
Gambar 4. Contoh Hoax.1 Hoaks di Facebook Dukungan Partai Menjelang Pemilu 2024.....	5
Gambar 5. Contoh Hoax.2 Hoax di Tiktok Padu-Padan Capres dan Cawapres Menjelang Pemilu 2024	6
Gambar 6. Hoax.3 Di Youtube Mengenai Pengunduran Diri Menjelang Pemilu 2024.....	7
Gambar 7. Contoh Hoax. 3 Hoax di Youtube Paslon Terkena Kasus Menjelang Pemilu 2024.....	7
Gambar 8. Contoh Hoax.5 Hoax di Youtube Pembubaran Partai Menjelang Pemilu 2024.....	8
Gambar 9. Data hoaks di media sosial per januari 2023	9
Gambar 10. Data hoaks di media sosial pada 2024	10
Gambar 11. Data hoaks di media sosial per 2024	12
Gambar 12. Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024	48
Gambar 13. Penandatanganan MoU Untuk Membangun Pencegahan Hoaks .	54
Gambar 14. Pengenalan Mesin Crawling Konten Internet Negatif (AIS).....	60
Gambar 15. Buku Indeks Kerawanan Pemilu	65
Gambar 16. Penyajian Data Laporan Hoaks	65
Gambar 17. Web Bawaslu Untuk Masyarakat Mengirimkan Pelaporan Konten Hoaks	67
Gambar 18. Web Intelligent Media Monitoring Bawaslu RI	68
Gambar 19. Serial Diskusi Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu	76
Gambar 20. Deklarasi Pemilu Damai 2024 Anti Hoaks	85
Gambar 21. Pengawasan Partisipatif Cegah Disinformasi dan Ujaran Kebencian Pemilu 2024	106
Gambar 22. Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu	108
Gambar 23. Panduan Pojok Pengawasan.....	109

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Tulisan ini akan mengkaji tentang Dinamika Kolaborasi Multi-Aktor dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024, hal tersebut dikarenakan, pada era digital saat ini, penyebaran informasi lewat media sosial sangat cepat dan bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Sayangnya, hoaks atau berita palsu juga menyebar dengan cara yang sama, dan ini bisa sangat merugikan, terutama saat pemilu. Hoaks bisa merusak integritas proses demokrasi, mempengaruhi keputusan pemilih, dan pada akhirnya, hasil pemilu itu sendiri. Adapun terdapat indikasi kurang efektifnya relasi antar aktor dalam melakukan pencegahan hoaks di media sosial dikarenakan data hoaks selalu meningkat sebelum diselenggarakannya pemilu. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hoaks menyebar dan bagaimana berbagai pihak bisa bekerja sama untuk mencegahnya.

Penanganan penyebaran hoaks tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, platform media sosial, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah harus bersatu dan berkolaborasi. Penelitian ini akan melihat bagaimana dinamika kolaborasi antar-aktor tersebut dan bagaimana mereka bisa bersinergi dengan baik. Memahami peran dan tanggung jawab setiap aktor serta menemukan mekanisme kerja sama yang efektif adalah kunci dalam menangani masalah ini.

Hasil dari penelitian ini juga bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran hoaks. Selain itu, penelitian ini bisa membantu platform media sosial meningkatkan sistem deteksi dan pencegahan hoaks mereka. Tak kalah penting, penelitian ini juga bisa meningkatkan kesadaran dan edukasi publik mengenai bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas pemilu 2024

tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan berinformasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu akan melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi atau pemilihan umum merupakan sebuah momen krusial untuk negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Pemilu 2024 di Indonesia diharapkan menjadi ajang demokratis yang adil dan transparan, namun tantangan besar muncul dari maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial. Penyebaran informasi palsu ini dapat mengancam integritas Pemilu, mempengaruhi persepsi publik, dan mengganggu stabilitas politik.

Media sosial telah menjadi saluran utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh dalam menyebarkan berita, baik yang benar maupun yang salah. Dalam konteks Pemilu, penyebaran hoaks dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, menyerang kandidat tertentu, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

Pertumbuhan hoaks sendiri terus meningkat setiap ingin dilaksanakannya pemilu. Indikator peningkatan hoaks sendiri bukan hanya dilakukan oleh salah satu calon pemimpin. Terdapat indikator lainnya yang menyebabkan hoaks dapat meningkat saat ingin dilaksanakannya pemilu, dimana pendukung yang bersifat militan. Pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) menemukan sebanyak 3.356 kasus hoaks hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

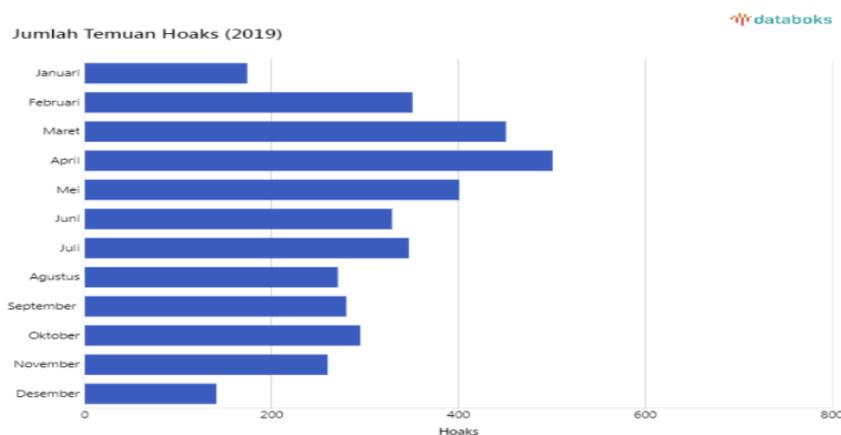
Gambar 1. Temuan isu hoaks periode Agustus 2018-30 september 2019



Sumber : AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Ferdinand Setu, menegaskan bahwa kasus terbanyak hoaks terjadi pada bulan April 2019 dimana hal tersebut bertepatan dengan pemilihan umum. Dengan demikian dapat kita lihat bagaimana pertumbuhan hoaks baik itu menjelang pemilu maupun tidak. Namun hal yang harus ditegaskan bahwa pertumbuhan hoaks dibulan-bulan menjelang pemilu selalu meningkat hal tersebut dapat kita lihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2. Pertumbuhan Hoaks Januari-Desember Tahun 2019



Sumber: Databoks

Melihat dari pertumbuhan hoaks pada tahun 2019, kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada bulan Maret dan April. Hal tersebut bertepatan dengan akan digelarnya pesta demokrasi di Indonesia. Lebih dari 400 hoaks ditemukan pada bulan Maret dan April, lalu pada bulan Mei kasus Hoaks mulai menurun. Walau demikian pada bulan juli sempat mengalami

Gambar 3. Jumlah Hoaks Pemilu Di Media Sosial Juli-November 2023

kenaikan beberapa kasus namun tidak terlalu signifikan. Adapun data lainnya menjelang pemilu 2024 yang dapat dilihat dari statistic dibawah ini.



Sumber:
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Antarane.ws.com

Informasi Lain:
data sampai 26 November 2023

<i>NO</i>	<i>Nama Data</i>	<i>Nilai</i>
<i>1</i>	Juli	6
<i>2</i>	Agustus	18
<i>3</i>	September	13
<i>4</i>	Oktober	20
<i>5</i>	November	39

Sumber: Databoks

Meninjau dari data-data diatas maka sudah jelas bahwa hoaks saat menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Umum terus mengalami

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

peningkatan yang mana pada bulan Juli terdapat 6 kasus hoaks dan terus meningkat hingga 39 di bulan November. Dengan demikian maka Hoaks adalah kasus serius yang harus dihadapi oleh Bawaslu dan Pemerintah. Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus dapat menjalin hubungan dengan pihak luar untuk membasmi hoaks. Bawaslu sendiri harus dapat mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Dengan hal tersebut maka akan tercipta hubungan dua arah antara lembaga dengan masyarakat untuk menyaring berita kebohongan ataupun hoaks.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa hoaks mengenai politik selalu berada di urutan teratas, terlebih saat menjelang pemilu. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan utama saat menjelang pemilu. Tingginya hoax tersebut mengakibatkan konflik horizontal di kalangan masyarakat. terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat adalah implikasi dari hoax yang bertebaran di media sosial menjelang pemilu. Sebagai contoh konflik horizontal di masyarakat adalah polarisasi yang berkepanjangan. Salah satu hoax yang dapat ditemukan di media sosial adalah akun twitter Bandung beautiful euyy @Bams27735590 dengan mengunggah video hasil pemilihan umum sudah di tentukan oleh KPU menggunakan narasi "*INI DATA KPU HASIL PEMILU 2024* *Luar biasa, negeri ini memang sakti, pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan?*". Postingan tersebut menyebabkan kegaduhan dikalangan masyarakat luas. Tidak beberapa lama Hasyim Asy'ari memberikan sebagai ketua KPU memberikan respon bahwa postingan yang di unggah oleh



Gambar 4 Contoh Hoax.1 Hoaks di Facebook Dukungan Partai Menjelang Pemilu 2024

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

@Bams27735590 tidaklah benar dan termasuk kedalam hoaks yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Sumber: Kompas

Dalam kasus hoaks yang pertama yaitu berasal dari media sosial facebook yang di upload pada 14 agustus 2023, pelaku yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita mengenai tarik-ulur dukungan partai. Pada tangkapan layar yang berhasil penulis temukan adalah pelaku menyebutkan bahwa partai Nasdem memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang merupakan calon yang di usungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Adapun klaim lain yang menyebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Narasi dari hoaks ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat untuk menentukan pilihan.

Gambar 5. Contoh Hoax.2 Hoax di Tiktok Padu-Padan Capres dan Cawapres Menjelang Pemilu 2024



Sumber: Kompas

Adapun contoh hoaks lainnya yang berasal dari media sosial Tiktok mengenai padu-padan pasangan paslon pada bulan November 2023. Dimana pelaku pembuat hoaks menyebar narasi keliru dan tidak dapat di

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pertanggung jawabkan mengenai pasangan yang akan di usung menjelang pemilihan umum. Hal ini dilakukan pelaku untuk membingungkan kalangan masyarakat, adapun dikarenakan pelaku sangat terobsesi dengan salah satu paslon. Maka dari itu masyarakat di himbau untuk tidak sembarang mempercayai suatu berita jika kebenarannya masih terbilang rancu.

Gambar 6. Hoax.3 Di Youtube Mengenai Pengunduran Diri Menjelang Pemilu 2024



Sumber: Kompas

Menurut penulis hoaks kali ini merupakan salah satu yang paling serius dan hoaks ini berasal dari media sosial Youtube, dikarenakan mengenai pengunduran diri suatu paslon. Hal tersebut dapat dilihat dari tangkapan layar diatas, dimana pada berita acara tersebut Anies dinyatakan batal menyalonkan diri. Namun setelah dicari tahu faktanya adalah tidak pernah ada pennyataan resmi mengenai pengunduran diri yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Hoaks seperti ini akan menimbulkan efek yang serius dikalangan masyarakat. Hal tersebut karena partisipasi masyarakat dalam menentukan presiden saat pemilihan umum akan menurun.

Gambar 7. Contoh Hoax. 3 Hoax di Youtube Paslon Terkena Kasus Menjelang Pemilu 2024

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Kompas



Hoaks lainnya yang ditemukan di media sosial Youtube adalah mengenai salah satu paslon terjerat kasus. Hoaks seperti ini adalah salah satu yang paling serius. Pada tangkapan layar yang di temukan oleh penulis, pelaku penyebar hoaks membuat narasi mengenai Cak Imin yang ditetapkan tersangka. Adapun narasi lainnya yaitu Ganjar Pranowo diklaim menerima suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Narasi seperti ini sangatlah berbahaya jika tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut dikarenakan dapat menurunkan elektabilitas dan integritas salah satu paslon di kalangan masyarakat.

Gambar 8. Contoh Hoax.5 Hoax di Youtube Pembubaran Partai Menjelang Pemilu 2024



Sumber: Kompas

Contoh hoaks yang terakhir dari media sosial Facebook mengenai pembubaran partai pada 17 September 2023. Pada tangkapan layar yang dapat penulis dapatkan, di jelaskan bahwa pelaku memberikan narasi mengenai pembubaran partai Nasdem yang dilakukan oleh Surya Paloh. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam melakukan pemilihan saat pemilihan umum

Data tentang penyebaran hoaks di media sosial menunjukkan variasi yang signifikan dalam konten yang salah atau menyesatkan di berbagai

Gambar 9. Data hoaks di media sosial per januari 2023

platform. Facebook memimpin dengan 104 konten hoaks, yang mencakup 40.5% dari total konten yang dianalisis, menunjukkan dominasinya dalam penyebaran informasi yang tidak akurat di antara pengguna. Diikuti oleh YouTube dengan 56 konten hoaks atau 21.8%, ini mengindikasikan bahwa video juga merupakan media yang signifikan untuk penyebaran hoaks di platform media sosial.

No	Saluran	Frekuensi	Persentase
1	Facebook	104	40.5
2	Twitter	33	12.8
3	Instagram	1	0.4
4	YouTube	56	21.8
5	WhatsApp	22	8.6
6	Media Online	3	1.2

Sumber: Mafindo

Twitter, dengan 33 konten hoaks atau 12.8%, juga menunjukkan peran pentingnya sebagai sumber hoaks yang signifikan. WhatsApp, dengan 22 konten hoaks atau 8.6%, menunjukkan bahwa pesan pribadi juga dapat digunakan secara luas untuk menyebarkan informasi yang salah di antara pengguna. Media online hanya menyumbang 3 konten hoaks atau 1.2%,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menunjukkan dampaknya yang lebih terbatas dalam konteks penyebaran informasi yang tidak benar.

Di sisi lain, Instagram hanya memiliki satu konten hoaks, yang merupakan persentase terendah yaitu 0.4%, menunjukkan bahwa platform ini mungkin kurang rentan terhadap penyebaran hoaks dibandingkan dengan platform lainnya dalam analisis ini. Data ini menyoroti kompleksitas dan prevalensi hoaks di media sosial serta pentingnya menghadapi tantangan ini dengan strategi pencegahan dan mitigasi yang efektif. Dari data diatas maka peneliti mengambil media sosial facebook, youtube, dan twitter untuk melihat penyebaran hoaks di media sosial tersebut terkait berita mengenai tarik ulur dukungan partai, padu-padan pasangan calon presiden, terkena kasus, dan pembubaran parta politik.

Dalam upaya memantau dan menangani penyebaran informasi palsu terkait pemilu, Kominfo telah merilis data statistik mengenai jumlah kasus hoaks pemilu yang diidentifikasi. Data ini memberikan gambaran tentang dinamika penyebaran hoaks selama periode tertentu dan menunjukkan bagaimana upaya mitigasi dilakukan oleh pihak berwenang. Rekapitulasi ini

Gambar 10. Data hoaks di media sosial pada 2024

mencakup total kasus hoaks yang terdeteksi mulai dari tahun 2022 hingga awal Januari 2024.



Sumber: Kominfo 2024

Grafik yang ditampilkan menunjukkan rekapitulasi isu hoaks terkait pemilu yang diidentifikasi oleh Kominfo, dengan total 203 kasus hingga 2 Januari 2024. Data ini meliputi periode dari tahun 2022 hingga awal Januari 2024. Pada tahun 2022, terdapat 10 kasus hoaks. Jumlah ini menurun drastis pada awal tahun 2023 dengan hanya 1 kasus di bulan Januari dan Februari. Angka ini sedikit meningkat di bulan Maret dengan 8 kasus dan turun lagi menjadi 1 kasus di bulan April. Pada bulan Mei, terdapat 5 kasus, kemudian naik lagi menjadi 9 kasus di bulan Juni. Jumlah kasus meningkat signifikan pada bulan Juli (14 kasus), Agustus (18 kasus), dan September (13 kasus). Peningkatan tajam terlihat pada bulan Oktober dengan 23 kasus dan puncaknya terjadi pada bulan November dengan 52 kasus. Pada bulan Desember, jumlahnya sedikit menurun menjadi 44 kasus. Di awal tahun 2024, hingga 2 Januari, tercatat 4 kasus hoaks. Dari data ini, terlihat bahwa isu hoaks pemilu cenderung meningkat mendekati akhir tahun 2023.

Dalam upaya menjaga integritas informasi selama proses pemilu, Kominfo secara aktif memantau dan menangani penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik. Data statistik terbaru yang dirilis oleh Kominfo hingga 2 Januari 2024 memberikan gambaran tentang sebaran isu hoaks pemilu dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Informasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemilu yang bebas dari informasi palsu dan menyesatkan.

Gambar 11. Data hoaks di media sosial per 2024



Sumber: Kominfo

Data statistik ini merangkum penanganan sebaran isu hoaks pemilu yang diidentifikasi oleh Kominfo bulan Januari 2023 hingga Januari 2024. Grafik menunjukkan bahwa terdapat total 203 temuan isu hoaks pemilu. Dari jumlah ini, ada 2.882 total sebaran hoaks yang diajukan untuk takedown (penghapusan), dan sebanyak 1.399 di antaranya telah ditindaklanjuti. Rincian pengajuan takedown berdasarkan platform media sosial menunjukkan bahwa Facebook mencatat 1.325 sebaran hoaks dengan 1.015 telah dihapus dan 310 masih dalam proses tindak lanjut. Twitter mencatat 947 sebaran hoaks, tetapi hanya 10 yang sudah ditindaklanjuti sementara 937 masih dalam proses. Instagram mencatat 198 sebaran hoaks dengan 148 sudah dihapus dan 50 masih dalam proses. TikTok mencatat 342 sebaran hoaks dengan 198 telah ditindaklanjuti dan 144 masih dalam proses. Snack Video mencatat 36 sebaran hoaks dengan 16 sudah dihapus dan 20 masih dalam proses, sedangkan YouTube mencatat 34 sebaran hoaks dengan 12 sudah dihapus dan 22 masih dalam proses. Secara keseluruhan, dari 2.882 pengajuan takedown, sebanyak 1.399 sebaran hoaks telah ditindaklanjuti, sementara 1.483 sebaran masih dalam proses penindakan. Data ini menggambarkan upaya aktif Kominfo dalam menangani dan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengurangi penyebaran hoaks terkait pemilu di berbagai platform media sosial.

Dalam menghadapi penyebaran hoaks di media sosial, diperlukan kolaborasi dari berbagai aktor untuk mencegah penyebaran hoaks. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah, platform media sosial, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan masyarakat umum. Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi dan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran hoaks. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol konten yang beredar di platform mereka. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam mengedukasi masyarakat dan menyediakan fakta untuk melawan hoaks, sementara masyarakat umum berperan sebagai pengguna yang bijak dan kritis terhadap informasi yang diterima.

Kolaborasi antar aktor ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya sehingga pencegahan penyebaran hoaks pada pemilu 2024 belum maksimal. Hal ini sesuai dengan data yang penulis ambil dari website KPU RI dimana terdapat pernyataan dari anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjabarkan bahwa saat ini KPU tidak dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan pencegahan serta pengawasan hoax di media sosial, oleh karena itu beliau menilai kolaborasi harus terjalin dengan banyak pihak agar dapat lebih maksimal. Pernyataan tersebut sesuai dengan data yang sudah disampaikan diatas bahwa setiap menjelang Pemilu pertumbuhan hoaks khususnya di media sosial sangatlah tinggi. (Agusta, R. (2022, November 30). "Tangkal Hoaks di Medsos, Bawaslu Kolaborasi dengan Banyak Pihak." Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id> pada 26 Juni 2024.)

Adapun persoalan lainnya yang ditemukan dalam kolaborasi antar Lembaga dalam pencegahan hoaks misalnya data dari penelitian sebelumnya yakni penelitiannya Tambun, Zebua bahwa penyebab penyebaran hokas masih massif di media sosial dikarenakan tidak efektifnya

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

komunikasi antar lembaga. ketidak harmonisan tersebut menyebabkan overlapping (tumpang tindih) kewenangan Bawaslu dan KPU. Situasi tersebut dikarenakan berbeda penafsiran mengenai batasan peran, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing lembaga. Kasus tersebut merupakan hal serius karena dapat menimbulkan ego kelembagaan (Tambun, Zebua & Tambun, 2023). Dampak dari kasus tersebut adalah ketegangan antar lembaga, hal tersebut tersebut dapat terjadi karena kaburnya pengaturan relasi antar lembaga karena perbedaan penafsiran (Gaffar, 2012). Pada era digital saat ini kegalalan komunikasi antar lembaga ini dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat karena hoaks tidak dapat di verifikasi secara cepat oleh Bawaslu dan KPU dengan demikian akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa komunikasi dan diseminasi informasi antar lembaga tersebut masih kurang dan harus dapat diperkuat agar pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial menjelang pemiihan umum dapat ditekan (Tambun, Zebua & Tambun, 2023).

Dengan melihat belum maksimalnya kolaborasi antar aktor dengan berbagai relasi dan dinamikanya maka penting untuk memahami dinamika kolaborasi multi-aktor ini. Aktor-aktor yang akan peneliti teliti yakni Bawaslu, KPU, Kominfo, Media Platform, LSM dalam hal ini MAFINDO, dan Masyarakat. Alasan peneliti memilih aktor-aktor tersebut karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi segala kecurangan pada proses pemilihan umum. Peran sentral dari Bawaslu disini dimainkan, dimana Bawaslu harus dapat mensosialisasikan bahaya adanya hoaks terhadap masyarakat. Adapun landasan yang mengikat yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai pengawasan dan penegakan hukum pemilu terhadap konten negatif. Bawaslu sendiri memiliki tiga peran utama sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemilu agar terhidnar dari hoax. Peran pertama adalah pengawasan atas penegakan tindakan pidana

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pemilu, dimana Bawaslu dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia serta melakukan penguatan Gakkumdu. Peran kedua adalah menangkal hoax dengan bekerja sama dengan Kominfo serta melakukan penandatanganan MoA untuk melakukan monitoring media sosial. Peran ketiga adalah Organisasi masyarakat sipil berperan dalam mengedukasi masyarakat dan menyediakan fakta untuk melawan hoaks, sementara masyarakat umum berperan sebagai pengguna yang bijak dan kritis terhadap informasi yang diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor tersebut bekerja sama, dan tantangan apa yang dihadapi dalam upaya mencegah penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu 2024. Dengan memahami dinamika kolaborasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam persiapan pemilu 2024, penting untuk memahami bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak bisa menghalangi penyebaran hoaks di media sosial. Masalahnya melibatkan partisipasi pemerintah, platform media sosial, LSM, dan media konvensional untuk mendeteksi, mengklarifikasi, dan meminimalkan dampak dari hoaks. Tantangannya adalah mencari cara efektif untuk mengatasi hambatan hukum, teknis, dan politik yang mempengaruhi usaha-usaha pencegahan ini.

Dengan mempertimbangkan kepentingan yang berbeda-beda, tujuannya adalah untuk membangun kerjasama yang koordinatif dan tanggap untuk menjaga keaslian pemilu dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia kepada publik selama kampanye dan proses pemungutan suara. Maraknya kasus hoaks di media sosial menjadi ancaman besar saat dilaksanakannya pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan hoaks dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat serta

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menurunkan integritas salah satu calon. oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam relasi multi-aktor untuk melakukan pencegahan penyebaran hoaks di media sosial pada pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam relasi multi-aktor untuk melakukan pencegahan penyebaran hoaks di media sosial pada pemilu 2024. Dimana hal tersebut menjadi permasalahan serius setiap ingin dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilihan Umum.

b. Tujuan Praktis

Tulisan ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi para aktor penyelenggara pemilihan umum agar dapat melakukan langkah yang lebih efisien untuk memberantas serta menangkal hoaks di media sosial saat menjelang Pemilihan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan dan keilmuan pembaca mengenai hubungan multi-aktor dalam melakukan pencegahan hoaks di media sosial. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan data-data valid yang dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya, serta

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

didukung oleh teori yang dapat mempertegas argumen yang terdapat pada penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat umum. Dimana, masyarakat umum dapat terhindar dari paparan hoaks di media sosial, hal tersebut dikarenakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pola pikir di masyarakat umum untuk menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum. Adapun manfaat lainnya yaitu agar tidak terjadi polarisasi yang berkepanjangan dimasyarakat.

2. Lembaga Bawaslu, KPU, Kominfo, Media Platform, LSM

Penelitian ini memiliki manfaat untuk lembaga penyelenggara pemilu serta relasi aktor dalam membuat kebijakan ataupun pencegahan yang lebih efektif mengenai hoaks di media sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi para aktor yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam menangkal hoaks yang terjadi di media sosial menjelang pemilu

3. Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk akademisi lain yang memiliki kesamaan studi dengan penulis ataupun dengan peneliti lain yang memiliki fokus dan latar belakang yang berbeda dalam penelitian, yang memiliki kesangkutpautan dengan dinamika relasi multi-aktor dalam mencegah penyebaran hoaks di media sosial pada pemilu 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang selaras dengan struktur penulisan tugas akhir skripsi. Penulis membagi beberapa bagian menjadi beberapa bab dan sub bab. Hal tersebut, bertujuan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

agar mempermudah pembaca dalam mencari serta memahami topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah beberapa bab yang akan penulis angkat dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal tersebut bertujuan untuk menjadi pengantar pembaca dalam fokus serta permasalahan yang akan di bahas lebih dalam di penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membagi menjadi 2 bagian, yang berisikan konsep, teori, dan kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Konsep dan teori penelitian yang dimaksud oleh penulis memiliki tujuan untuk landasan utama penulis dalam membuat analisis mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan kerangka pemikiran adalah alur berfikir penelitian mulai dari masalah hingga dapat memberikan sebuah jawaban atas penelitian yang dibahas oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Metode penelitian tersebut akan digunakan untuk membantu penulis dalam menemukan hasil penelitian, dan menganalisa fokus permasalahan penulis. Pada bab ini penulis juga mencantumkan jenis penelitian, objek penelitian, teknik atau cara pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan table rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai temuan data yang penulis dapatkan dan dianalisis menggunakan teori-teori tertentu. Hal tersebut,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memiliki tujuan agar mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Penulis akan membagi penulisan menjadi beberapa sub-bab jika memang diperlukan agar pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca serta dapat lebih komprehensif dan terstruktur.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang akan ditulis oleh penulis, yang memiliki isi berupa kesimpulan, yang memiliki argumentasi reflektif penulis dengan hasil penelitian. Bagian akhir ini juga sebagai penutup serta wadah untuk penulis menuangkan saran atau rekomendasi untuk para pembaca, yang diharapkan dapat berguna untuk penulis ataupun para pembaca dari penelitian penulis.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitiannya Chandrawati Camellia , yang berjudul Analisis Penerapan Actor Network Theory (ANT) pada Chatbot sebagai Layanan Fact-Checking. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Actor Network Theory (ANT) pada chatbot fact-checking melibatkan kolaborasi erat antara pengembang, algoritma AI, pengguna, data pelatihan, dan organisasi pendukung. Kualitas data dan umpan balik pengguna sangat penting untuk akurasi chatbot, sementara kepercayaan pengguna membutuhkan transparansi. Dukungan organisasi memberikan arahan strategis dan sumber daya. Kesimpulannya, ANT membantu memahami dan mengoptimalkan interaksi kompleks dalam layanan fact-checking chatbot untuk menangani hoaks dengan lebih efektif. Persamaan dengan topik penulis adalah membahas mengenai aktor dalam memerangi hoaks di media sosial, adapun persamaan lainnya yaitu menganalisis menggunakan *Actor Network Theory*, dan juga mengenai pencegahan disinformasi dan hoaks melalui beberapa aktor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah studi yang ditulis oleh Chandrawati dan Camellia hanya berfokus terhadap chatbot sedangkan penulis berfokus kepada pengawasan hoaks di media sosial yang dilakukan oleh para aktor penyelenggara pemilu

Berikutnya, adalah “Kolaborasi Bawaslu dan KPU dalam Pengawasan Pemilu Serentak” ditulis oleh Mulyadi, A. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Bawaslu dan KPU menjalin relasi dalam bentuk koordinasi teknis dan administratif. Walaupun masing-masing memiliki tugas berbeda, sinergi dilakukan melalui forum bersama, penyusunan pedoman teknis, dan pertukaran data. Hambatan muncul dari ego sektoral dan tumpang tindih wewenang.. Penelitian Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam pengawasan Pemilu 2019 sudah terjalin secara formal dan informal, namun masih bersifat situasional. Meskipun terdapat pembagian tugas yang jelas, di lapangan sering terjadi

tumpang tindih peran. Koordinasi antara keduanya belum konsisten dan cenderung reaktif. Hambatan utama yang ditemukan adalah ego sektoral, kurangnya kepercayaan, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih terstruktur, integrasi sistem digital, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian penulis berfokus terhadap hubungan antar aktor yang berfokus teknologi yaitu pencegahan hoaks di media sosial.

Selanjutnya adalah “Pemanfaatan Website Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory” oleh Destriyani, Sarwoprasodjo, dan Sadono. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyelidiki bagaimana pemanfaatan website desa dapat berkontribusi dalam pembangunan lokal dengan memanfaatkan perspektif Actor-Network Theory (ANT). Para peneliti ingin memahami bagaimana website desa berperan sebagai aktor yang mempengaruhi interaksi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan akses informasi, partisipasi, dan efektivitas program pembangunan di tingkat lokal. Penelitian tersebut mendapatkan hasil dan kesimpulan yaitu untuk menunjukkan bahwa website desa berperan penting dalam memfasilitasi pembangunan lokal melalui peningkatan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan Actor-Network Theory, penelitian ini menggambarkan bagaimana website desa menjadi aktor yang menghubungkan berbagai entitas seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah dalam jaringan kolaboratif. Kesimpulannya, website desa bukan hanya alat teknologi informasi biasa, tetapi juga katalisator yang mendukung efektivitas dan transparansi dalam program pembangunan desa. Persamaan dengan konteks penulis adalah melihat bagaimana interaksi antar aktor untuk suatu pembangunan, dimana pada penelitian tersebut untuk membangun desa dan pada penelitian penulis adalah untuk membangun pemilihan umum agar bersih dari hoaks. Perbedaannya adalah fokus pada penelitian tersebut adalah

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pembangunan desa sedangkan penulis berfokus kepada konteks pemilu dan hoaks di media sosial.

Kelima adalah “Studi Jaringan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik” oleh Taufik Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta berbagai aktor dalam proses perumusan kebijakan publik, dengan fokus pada bagaimana interaksi mereka mempengaruhi hasil akhir kebijakan yang dihasilkan. Adapun hasil dan kesimpulan pada penelitian tersebut adalah menunjukkan kompleksitas interaksi antara berbagai aktor dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini mengungkap bagaimana kolaborasi dan konflik antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil mempengaruhi dinamika pembentukan kebijakan. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang jaringan aktor dan dinamika hubungan mereka menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan penerimaan kebijakan publik yang lebih luas. Persamaan dengan penelitian penulis adalah melihat bagaimana hubungan ataupun interaksi antar aktor dimana para aktor berkolaborasi untuk satu tujuan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut berfokus terhadap kebijakan publik yang masih general dan luas, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap konteks pemilihan dan pencegahan hoaks di media sosial.

Selanjutnya adalah "*Actor-network theory and algorithms: ChatGPT and the new power relationships in the age of AI*" oleh various (2023). Tujuan dari adalah untuk menyelidiki bagaimana teori jaringan aktor bisa diterapkan untuk memahami hubungan antara algoritma, seperti ChatGPT, dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika kekuatan baru dalam konteks era kecerdasan buatan. Penulis berupaya untuk mengeksplorasi dampak teknologi ini terhadap interaksi antara manusia, mesin, dan lingkungan mereka, serta implikasi sosial, etis, dan politiknya yang muncul. Adapun hasil dan kesimpulan pada penelitian tersebut adalah penerapan teori jaringan aktor dalam memeriksa algoritma seperti ChatGPT membantu mengungkap kompleksitas interaksi antara teknologi AI dan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perubahan dinamika kekuasaan. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini krusial untuk mengelola dampak sosial, etis, dan politik dari perkembangan kecerdasan buatan di era saat ini. Persamaan pada penelitian ini adalah berfokus terhadap interaksi dan relasi antar aktor yang dikaji menggunakan *Actor Network Theory*, serta dampak sosial politik yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Perbedaannya adalah, penelitian tersebut berfokus terhadap jaringan aktor yang lebih luas dan tidak berfokus terhadap satu permasalahan. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap interaksi serta jaringan aktor dalam melakukan pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial.

Terakhir adalah "Actor-Network Theory: Objects and Actants, Networks and Narratives" oleh Christian Bueger". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menggunakan teori jaringan aktor sebagai pendekatan metodologis dalam mengungkap dinamika kompleks di dalam organisasi internasional. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan eksplorasi bagaimana objek dan aktan berkontribusi dalam membentuk jaringan sosial dan narasi yang memengaruhi tindakan manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara manusia, objek, dan lingkungan dalam konteks sosial dan politik. Adapun hasil dan kesimpulan pada penelitian tersebut adalah teori jaringan aktor (Actor-Network Theory) menitikberatkan pada peran objek dan aktan, serta interaksi mereka dalam membentuk jaringan dan narasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya memahami bagaimana objek dan aktan berperan aktif dalam interaksi sosial, dan bagaimana jaringan ini membentuk narasi yang mempengaruhi tindakan manusia. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara manusia, objek, dan lingkungan dalam konteks sosial dan politik. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan pendekatan ANT untuk mengkaji mengenai relasi dan interaksi antar aktor. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada penelitian

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tersebut cenderung lebih luas hingga organisasi luar negeri, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus terhadap interaksi aktor pada pemilihan umum dan hoaks di media sosial

Secara keseluruhan, penelitian yang menggunakan pendekatan Actor Network Theory menunjukkan kesamaan dalam metodologi dan pendekatan teoretis, namun berbeda dalam konteks spesifik dan fokus kajiannya. Topik yang penulis angkat mengenai "Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024" Hal tersebut dikarenakan masih jarang nya penelitian yang membahas mengenai interaksi aktor dalam melakukan pencegahan hoaks di media sosial.

Penelitian ini nantinya akan membahas dinamika relasi multi aktor untuk melakukan pencegahan hoaks di media sosial pada pemilu. Dimana penulis akan menggunakan teori Actor Network untuk melakukan pendekatan. Penulis akan mengkaji dinamika kolaborasi multi-aktor dalam penyebaran hoaks di media sosial terjadi dalam momen problematisasi, penarikan, pelibatan, dan mobilisasi sehingga menyebabkan masih tingginya penyebaran hoaks di media sosial pada pemilu 2024, yang nantinya akan menambahkan pengetahuan baru untuk pembaca penelitian penulis.

2.2 Konsep dan Teori Penelitian

2.2.1 Konsep Penelitian

2.2.1.1 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah bentuk dari pendidikan untuk rakyat, yang dimana hal tersebut bersifat terbuka, masal dan langsung, dimana memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat mengenai politik serta meningkatkan kesadaran demokrasi di masyarakat luas (Haris, 2006). Sebuah negara dapat disebut sebagai penganut demokrasi jika didalamnya dijalankan mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara berkala yang memiliki tujuan untuk melakukan sirkulasi elite politik didalam sebuah negara (Huntington dalam Rizkiyansyah, 2007). Adapun pemilihan umum adalah salah satu cara dan sarana untuk membuka ruang masyarakat dalam

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menentukan wakilnya untuk duduk dalam sebuah konstitusi yang memiliki tujuan untuk menjalankan kedaulatan rakyat (Rahman, 2002). Menurut UU No. 11 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat beberapa asas yang harus dijaga yaitu;

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib penyelenggaraan pemilu
6. Keterbukaan
7. Proporsionalitas
8. Profesionalitas
9. Akuntabilitas
10. Efisiensi
11. Efektivitas.

Adapun Darmastuti dan Maryanah (2004) menjelaskan beberapa prinsip pemilihan umum yang harus dijaga dan dijamin oleh negara yaitu;

1. Keadilan

Prinsip keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam menjalan pemilihan umum. Hal tersebut diperlukan karena memiliki tujuan untuk seluruh peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa adanya diskriminasi, karena tanpa adanya keadilan maka tidak ada jaminan untuk terrealisasikannya kedaulatan masyarakat.

2. Kejujuran

Pada asas yang kedua kejujuran harus dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimana dilakukan oleh pelaksana dan peserta pemilu. Dengan demikian maka pelaksana dapat menghasilkan pemilihan umum yang sah (*legitimate*) karena tidak terjadi kecurangan, baik administrasi dan perhitungan.

3. Umum

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Prinsip ini memiliki tujuan untuk membuka ruang yang bebas terhadap seluruh masyarakat agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum, dimana tidak memandang ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk sirkulasi elite politik kenegaraan dapat berputar secara adil dan wakil rakyat dapat membawa kedaulatan rakyat.

4. Bebas

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin hak rakyat dalam keikutsertaan pemilihan umum secara bebas dan tidak mengalami intimidasi dari salah satu pihak. Rakyat harus dapat memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pilihan politiknya dikarenakan agar rakyat dapat memilih atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

5. Kerahasiaan

Kerahasiaan pilihan merupakan bentuk dari perlindungan hak masyarakat agar dapat memilih tanpa harus takut mendapat intimidasi dari eksternal, yang disebabkan oleh pilihann politiknya.

6. Langsung

Masyarakat harus dapat memilih secara langsung, hal tersebut membuat pemilihan umum sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat memilih secara langsung tanpa memandang keterbatasan fisik, hal ini ditujukan agar pemilihan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.

2.2.1.2 Media Sosial

Media sosial merupakan bentuk sebuah media online, dimana para pengguna dapat berpartispasi. Media sosial sendiri bentuk dari evolusi digital dimana dapat menciptakan isi yaitu blog, wiki media sosial, dan jejaring sosial. Dalam artian lainnya media sosial merupakan alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan untuk membentuk jenis interaksi baru yang sebelumnya tidak tersedia(Chris Brogan, 2010). Seperti yang dinyatakan oleh Mandibergh (Nasrullah; 2017), media sosial dapat didefinisikan sebagai media di mana orang bekerja sama untuk menghasilkan konten, atau konten yang dibuat oleh pengguna. Di sisi lain,

Boyd (Nasrullah; 2017) menyatakan bahwa Media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan orang dan komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan, kadang-kadang, berkolaborasi atau bermain bersama. Kegiatan politik yang berkelanjutan membutuhkan jalur politik yang dapat mencapai setiap lapisan masyarakat dan wilayah. Media sosial adalah salah satu cara untuk melakukan ini. Media sosial memengaruhi dinamika politik, terutama kegiatan kampanye (Stietglitz & Dang-Xuan, 2012).

Asumsi lainnya media sosial adalah alat baru untuk menciptakan ruang interaksi baru dikalangan masyarakat tanpa harus memikirkan jarak. John Vivian menjelaskan bahwa keberadaan media baru yang dikarenakan adanya internet dapat melewati praktik penyebaran pesan media yang bersifat tradisional, hal tersebut dikarenakan internet dapat mengaburkan masalah geografis, kapasitas, interaksi, dan nyata. Adapun penjelasan lainnya yang dijabarkan oleh Kaplan dan Henlein mengenai, jenis media sosial;

1. Proyek kolaborasi, dimana pada situs ini setiap orang dapat membuat, menghapus serta mengubah sebuah konten yang sudah dibuat. Contohnya adalah Wikipedia.
2. Blogs adalah laman yang dapat membuka ruang untuk mennyapaikan sebuah opini, pengalaman, dan aktivitas penggunaannya, John Vivian dalam buku yang berjudul Komunikasi massa menjelaskan bahwa blogs bersifat subjek sempit seperti politik.
3. Content communities memiliki tujuan yaitu membagikan berbagai konten yang dimiliki pengguna dengan pengguna lainnya. Conton content communities adalah Flickr (foto), dan Youtube (video).
4. Situs jejaring sosial (*Social networking sites*) adalah sebuah jejaring sosial yang dapat menghubungkan antar individu dengan mengaburkan masalah geografis dan waktu, dengan kata

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lain interaksi antar individu bersifat fleksibel. Sebagai contoh aplikasi jejaring sosial adalah Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain.

Pada (David, 2017) menjelaskan beberapa ciri-ciri media sosial diantaranya;

1. Pesan yang diantarkan dalam media sosial tidak hanya bersifat individu akan tetapi dapat ditujukan kepada kelompok. Sebagai contoh adalah SMS (*Short Message Service*) dan internet.
2. Pesan yang ditujukan adalah bebas, dimana tidak melewati satu gate keeper.
3. Penyampaian pesan bersifat lebih cepat dibandingkan dengan cara tradisional
4. Waktu interaksi dengan penerima pesan bersifat fleksibel

Semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik kandidat maupun penyelenggara, harus mampu berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan dan mensukseskan kegiatan pemilu, salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana yang tersedia. Menurut Fitch (2009), media sosial tidak diatur seperti hutan. Actor yang menggunakan media sosial harus mampu menerima kritik dan cibiran dari pengikutnya jika penggunaan media sosial tidak digunakan dengan baik dan cenderung mencederakan sebagian masyarakat. Setiap pernyataan yang disampaikan melalui media sosial tetap menjadi pertanyaan, terlepas dari apakah itu merupakan representasi dari pribadi atau kelompok yang diwakilinya. Susanto (2017) menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia cenderung menyediakan informasi dengan pemberitaan politik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang memiliki akun media sosial, baik yang dimiliki secara pribadi, kelompok, atau akun tanpa identitas jelas lainnya, selalu mengisi media sosial. Sebagai pemeroleh informasi dari media sosial, masyarakat tidak peduli apakah informasi tersebut valid atau tidak; yang paling penting adalah bahwa informasi tersebut sesuai dengan

kebutuhan dan persepsi masyarakat, sehingga masyarakat akan meyakini informasi tersebut tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

2.2.1.3 Berita Bohong (*Hoax*)

Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ketidak benaran informasi, tidak bersumber, dan berita bohong. Lynda Walsh dalam bukunya yang berjudul “*Sins Against Science*” menegaskan bahwa hoaks adalah berita bohong, dimana istilah ini berasal dari Inggris yang muncul pada era industri sekitar tahun 1808. Pada bagian lainnya Chen dan Ishak menjabarkan bahwa hoaks merupakan informasi yang sesat dan berbahaya karena dapat menyesatkan persepsi seseorang dengan memberikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoaks sendiri dapat mempengaruhi masyarakat luas dengan menodai citra dan kredibilitas seseorang. Hoaks sendiri dapat menasar kesemua bidang mulai dari agama, politik, bisnis, dan ekonomi. Curtis Mac Dougall pada 1958, yang mendefinisikan hoax adalah ketidak benaran yang dibuat secara sengaja untuk disamakan menjadi fakta atau kebenaran.

Pada era digital saat ini penyebaran hoaks sangatlah cepat, terlebih era digital yang di kuasai oleh internet sendiri merupakan ruang tanpa bata (*borderless*), dimana setiap masyarakat dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Terdapat beberapa ciri hoaks yaitu (Sitompul, 2004):

1. Melenceng dari kaidah 5W+1H
2. Permintaan yang mendesak
3. Penggunaan huruf besar dan tanda baca yang abnormal
4. Tidak konsisten
5. Tidak menyantumkan narasumber/ahli yang kredibel
6. Tidak menggunakan bahasa yang baku.

Cambridge Dictionary, menjelaskan bahwa hoaks merupakan rencana untuk menipu masyarakat banyak. Singkatnya hoaks merupakan sebuah informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak berlandaskan oleh data

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan fakta, melainkan hanyalah tipuan untuk menipu masyarakat secara massif.

Hoaks terdiri dari beberapa jenis, termasuk hoaks akademis, hoaks yang berkaitan dengan agama, hoaks yang dianggap masuk akal secara sosial, dan hoaks yang sengaja dibuat dengan niat baik. Legenda dan rumor yang dibuat dengan sengaja untuk menipu Hoaks virus komputer, yang saat ini sering digunakan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal atau omong kosong, biasanya menyebar melalui email yang berisi peringatan tentang penyebaran virus komputer, tetapi sebenarnya virus itu sendiri.

2.2.2 Teori Penelitian

2.2.2.1 Jaringan Aktor (Actor-Network Theory)

Teori *Actor Network Theory*, Aktor manusia, teknologi, dan organisasi memiliki jaringan yang dinamis yang saling berpengaruh serta memperkuat satu sama lain (Callon, 1980) Teori *Actor-Network Theory* (ANT), teori ini menstarakan antara teknologi, sains, dan aktor manusia. Kesetaraan yang dimaksud adalah aktor teknis dan aktor sosial memiliki nilai dan persepsi semiotika pada sebuah penelitian kualitatif (Farías dan Mützal 2015; Fatimah dan Arora 2016; Ren, Jóhannesson, dan van der Duim 2012 pada Rachman, 2023). Robert M. Z Lawang, menjelaskan bahwa jaringan adalah gabungan dari dua kata yaitu *Net* dan *Work*, hal tersebut menjadikan satu kesatuan kalimat yaitu *Network* (jaringan), dimana dapat diartikan bahwa *Network* dalam kasus ini adalah kerja jaringan yaitu, kerja dalam hubungan yang memiliki simpul-simpul layaknya sebuah jarring (*Net*).

Jaringan aktor dapat diartikan sebagai berikut yaitu. Pertama, jaringan aktor menggambarkan sesuatu yang berbentuk jaringan, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Kedua, jaringan aktor tidak memiliki bentuk hubungan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak terikat dengan mitos yang ada, baik dari kalangan elit maupun masyarakat umum, serta tidak terpengaruh oleh asumsi makro atau mikro yang ada. Jaringan aktor berusaha menjelaskan bagaimana jaringan material-semiotik

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terbentuk dan berfungsi secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, dengan kelompok aktor yang terlibat dalam proses penciptaan makna, baik material maupun semiotic. (Latour, 2005)

Dalam *Actor-Network Theory* terdapat beberapa konsep penting yaitu aktor dan jaringan. Aktor atau aktan diartikan sebagai hubungan ataupun interaksi satu sama lain dengan perantara, dimana aktor menciptakan perantara. Adapun perantaraan sendiri adalah jaringan yang sudah tersusun dan memberikan makna dan bentuk. Aktor sendiri dapat ditemukan dalam bentuk teks, artefak, keterampilan manusia. Adapun bagian lainnya adalah jaringan, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan manusia, komponen teknologi, dan kepentingan lainnya. Pada dasarnya dalam teori ini aktor tidak dapat terlepas dari jaringan, yang mana menjadi satu bagian dari sebuah fenomena.

Menurut Callon (1991), Pada teori aktor-jaringan terdapat dua aktor utama yaitu aktor teknis dan aktor manusia. Dimana kedua aktor tersebut memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan sebuah jaringan aktor:

1. Aktor Teknis

Aktor teknis pada teori aktor jaringan merujuk kepada entitas non-manusia yang mana memiliki peran aktif dalam jaringan. Mereka dapat berupa objek fisik, perangkat teknologi, dokumen bahkan infrastruktur, yaitu;

- Perangkat teknologi: Smartphone, mesin, software, computer.
- Infrastruktur: Jaringan listrik, jalan raya, dan jaringan internet
- Dokumen dan Protokol: Kebijakan, peta, dan standar operasional

Aktor teknis ini memiliki kapasitas untuk melakukan pengaruh dalam sebuah jaringan. Pada penelitian ini aktor teknis dapat diidentifikasi berupa hoaks, media sosial, dan kebijakan. adapun aktor teknis kebijakan yang akan menjadi landasan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penulis yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bagaimana penyebaran konten negatif, termasuk hoaks, diawasi di platform digital dengan mewajibkan langkah responsif dari penyelenggara terhadap konten yang dianggap berpotensi merugikan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menanggapi keluhan terkait hoaks, demi menjaga keamanan informasi di lingkungan digital. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, meskipun tidak secara spesifik menyebut hoaks, memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan melalui media elektronik. Semua regulasi ini bertujuan untuk mengontrol dan membatasi dampak negatif dari hoaks di dunia digital, untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum.

2. Aktor Manusia

Aktor manusia merupakan sebuah individu atau kelompok yang ikut terlibat dalam sebuah jaringan.

- Individu: Peneliti, insinyur, pekerja, dan masyarakat
- Kelompok: Komunitas dan departemen pada organisasi
- Organisasi: Institusi pemerintahan, dan lembaga non profit.

Aktor manusia pada penelitian ini meliputi Bawaslu RI, KPU RI, Kominfo, dan Masyarakat.

Manusia berinteraksi dengan teknologi dan sesama manusia untuk menciptakan, mengubah, dan mempertahankan jaringan. Mereka membawa kemampuan, pengetahuan, nilai-nilai, dan tujuan yang mempengaruhi perkembangan jaringan tersebut.

Menurut Callon (1991), Actor Network Theory (ANT) mencakup empat tahap penting dalam pembentukan jaringan, yang disebut sebagai

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

momen-momen. Setiap momen ini menggambarkan perkembangan isu dan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat, yaitu;

1. Momen Problematisasi

Pada tahap awal, aktor inisiator mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian bersama dikarenakan masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti tantangan sosial, teknis, atau politik. Aktor tersebut akan berusaha mengonstruksi masalah tersebut dengan cara yang menjadikannya relevan bagi aktor-aktor lainnya (Callon, Michel. 1986). Selanjutnya, aktor inisiator memosisikan dirinya sebagai elemen kunci dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, aktor inisiator juga mengidentifikasi aktor-aktor lainnya yang relevan dengan masalah tersebut, termasuk aktor manusia dan non-manusia (Callon, Michel. 1986). Dalam konteks teknologi, aktor non-manusia seperti algoritma atau platform media sosial dapat diposisikan sebagai bagian dari jaringan. Salah satu tujuan utama dari tahap problematisasi adalah menarik perhatian aktor-aktor lainnya. Aktor inisiator berupaya menciptakan narasi yang kuat sehingga masalah yang diangkat tersebut menjadi perhatian bersama. Inisiator problematisasi pada dasarnya berusaha memosisikan dirinya sebagai perantara yang menghubungkan semua aktor lain dalam jaringan. Inisiator tersebut bertindak sebagai aktor sentral yang menawarkan solusi dan mencoba memastikan bahwa aktor-aktor lain bergantung padanya untuk mencapai tujuan bersama (Callon, Michel. 1986). aktor inisiator memfasilitasi hubungan antara aktor-aktor lain, baik manusia maupun non-manusia, dan menjadikan dirinya sebagai titik pusat dalam jaringan. Misalnya, jika masalah yang diangkat terkait pengawasan hoaks, aktor inisiator seperti Bawaslu RI bisa mengidentifikasi penyebaran disinformasi sebagai ancaman serius bagi proses demokrasi.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Momen Penarikan

Selanjutnya, (1) momen ini bekerja untuk meyakinkan para aktor lainnya bahwa isu yang sudah diangkat dan dijelaskan merupakan hal penting untuk aktor-aktor lainnya, tujuan utama dari momen ini adalah untuk meyakinkan dan membangun kepentingan bersama dengan interaksi dan negosiasi. Aktor utama harus menemukan cara untuk menghubungkan kepentingan aktor-aktor lain dengan masalah yang diangkat, hal tersebut karena tidak semua aktor langsung menyetujui kepentingan yang ditawarkan oleh aktor utama (Callon, Michel. 1986). Oleh karena itu, negosiasi adalah bagian krusial dari momen ini. Aktor utama mungkin harus memberikan konsesi atau memperjelas bagaimana masalah yang diangkat benar-benar relevan bagi setiap aktor yang terlibat. Setelah aktor-aktor lain mulai terlibat, aktor utama harus menegosiasikan peran-peran yang berbeda di dalam jaringan. Proses penarikan juga melibatkan mengelola konflik atau resistensi yang mungkin muncul dari aktor-aktor lain. Jika ada aktor yang menolak atau merasa tidak berkepentingan, aktor utama harus mampu mengatasi tantangan ini melalui dialog yang terbuka, kompromi, atau menunjukkan bagaimana mereka dapat kehilangan sesuatu jika tidak terlibat dalam jaringan (Callon, Michel. 1986). Momen ini juga bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang memungkinkan jaringan berfungsi secara harmonis.

3. Momen Pelibatan

Aktor akan membagikan serangkaian peran dan tugas secara merata. Pada momen ini akan terjadi bentuk dukungan dan resistensi dimana akan menciptakan sebuah kolaborasi pada sebuah jaringan yang sedang terbentuk. Momen pelibatan terjadi ketika aktor-aktor yang telah diidentifikasi dalam proses problematisasi mulai dibawa untuk berpartisipasi dan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengambil peran-peran tertentu dalam jaringan. Pelibatan ini melibatkan distribusi peran dan tugas secara merata di antara para aktor, dimana mereka mulai "menyepakati" bagaimana peran mereka di dalam jaringan tersebut. ((Callon, Michel. 1986). . Callon menjelaskan bahwa pada tahap ini, aktor-aktor akan memperlihatkan dua bentuk respons utama: dukungan dan resistensi. Aktor yang mendukung akan mengambil peran yang ditentukan dalam jaringan tanpa banyak penolakan, beradaptasi dengan tugas yang diberikan, dan berkontribusi pada kelangsungan dan penguatan jaringan. Di sisi lain, aktor yang menolak atau resisten dapat mengganggu jalannya jaringan, mencoba mengubah, menegosiasi ulang, atau bahkan merusak peran yang diberikan. Pada titik ini, terjadi proses negosiasi dan modifikasi peran yang intens (Callon, Michel. 1986). Setiap aktor akan berusaha mengamankan peran dan kepentingannya dalam jaringan dengan cara yang saling mempengaruhi. Proses ini menciptakan jaringan yang dinamis dan fleksibel, di mana hubungan antar-aktor terus berubah seiring dengan interaksi yang terjadi. Dalam konteks pengawasan hoaks, misalnya, lembaga-lembaga seperti Bawaslu, KPU, Kominfo, dan MAFINDO harus bernegosiasi peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar selama pemilu.

4. Momen Mobilisasi

Tahap akhir ini terjadi ketika jaringan aktor sudah terbentuk secara jelas dan stabil, baik dalam hal waktu maupun ruang. Aktor-aktor dan mediator dalam jaringan mencapai kesepahaman dan koordinasi yang cukup stabil. Pada tahap ini, jaringan telah mencapai kestabilan dalam hal komposisi aktor dan distribusi peran. Kestabilan tersebut dicapai melalui negosiasi yang telah berlangsung di tahap-tahap sebelumnya,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

seperti problematisasi, penarikan, dan pelibatan. Setiap aktor dalam jaringan memahami perannya dan fungsinya secara jelas. Mobilisasi juga ditandai dengan adanya representasi kolektif dari aktor-aktor yang terlibat. Dalam proses mobilisasi, seringkali ada aktor atau kelompok yang mengambil peran untuk berbicara atas nama jaringan atau kelompok lain (Callon, Michel. 1986). Peran ini penting karena mereka menjadi perwakilan atau mediator yang mengartikulasikan kepentingan seluruh aktor dalam jaringan kepada aktor eksternal atau pihak lain di luar jaringan. Representasi ini harus diakui dan dianggap sah oleh seluruh aktor dalam jaringan. Dalam tahap ini, koordinasi antar aktor sangatlah penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor sejalan dengan tujuan akhir jaringan. Setiap aktor, termasuk manusia dan non-manusia (seperti teknologi, regulasi, dan prosedur), harus bekerja dalam harmoni agar jaringan tetap stabil. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan seluruh kepentingan dan sumber daya yang dimiliki aktor lain. Dalam ANT, mediator berperan penting sebagai elemen penghubung yang memungkinkan adanya komunikasi dan kolaborasi antara aktor-aktor yang terlibat. Mediator bisa berupa benda atau teknologi yang menjaga stabilitas jaringan dan memfasilitasi interaksi. Di tahap mobilisasi, mediator ini menjadi krusial dalam menjaga aliran informasi dan dukungan di dalam jaringan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan efisien (Callon, Michel. 1986)..

Penelitian ini akan menggunakan teori jaringan aktor bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran beberapa lembaga dalam melakukan pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial pada pemilihan umum. Jaringan aktor yang dimaksud adalah Aktor manusia yang meliputi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

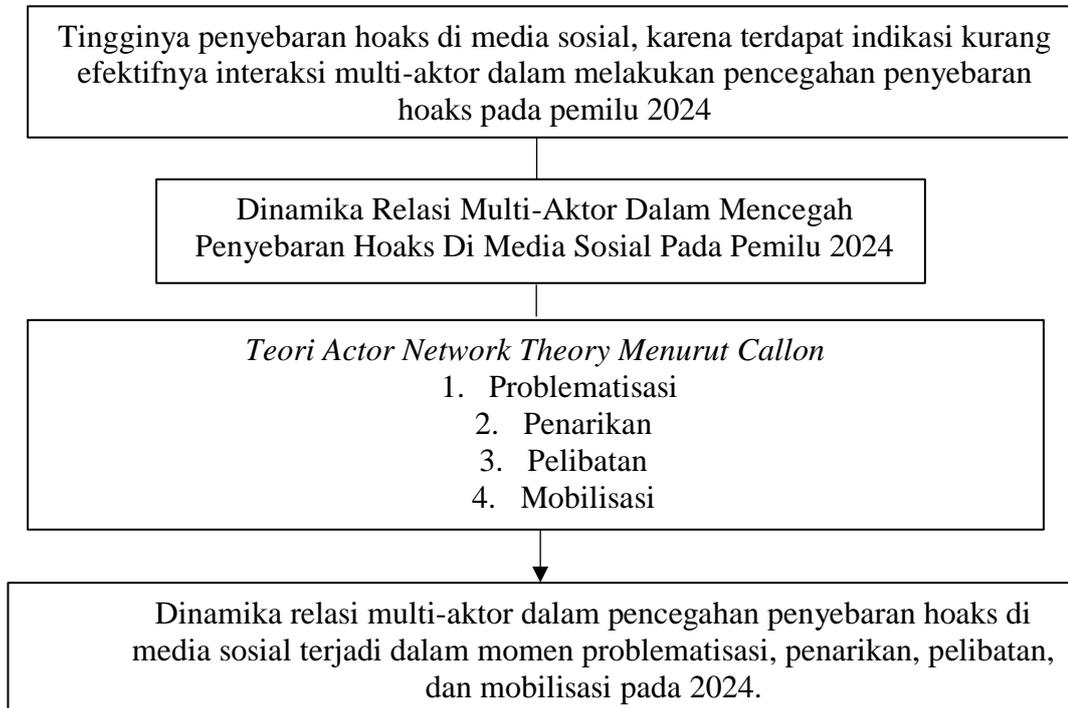
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Government (Bawaslu, KPU, Kominfo, Mafindo dan Masyarakat), dan aktor teknis yaitu (hoaks, media sosial, dan kebijakan).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat kerangka pemikiran seperti berikut :



Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal penting dalam sebuah penelitian, hal tersebut dikarenakan objek penelitian adalah sebuah tujuan yang akan dicapai untuk mendapatkan klarifikasi ataupun jawaban untuk menjadi solusi dari sebuah permasalahan penelitian. Objek penelitian merupakan sebuah target ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2012)

Objek penelitian ini adalah Dinamika relasi multi-aktor dalam pencegahan penyebaran hoaks di media social pada pemilu 2024.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana untuk menganalisis kolaborasi Bawaslu RI dengan penyelenggara pemilihan umum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial menjelang pemilihan umum.

Bogdan dan Taylor, menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari narasumber. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, agar mendapatkan data yang valid dan objektif untuk menjawab permasalahan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan penulis untuk mendapatkan data yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pada konteks kali ini penulis menggunakan wawancara dan studi pustaka.

3.3.1 Wawancara

Pengumpulan data yang pertama adalah melalui teknik wawancara dimana penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan interview dua arah antara penulis dengan nara sumber. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang dapat di pertanggung jawabkan. Penulis melakukan wawancara dengan ke dua lembaga tersebut agar dapat mengetahui perspektif dari kedua belah yang dimana akan digunakan untuk menjawab pertanyaan di pembahasan serta membuat kesimpulan.

3.3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data dari peneluitian terdahulu, dapat berupaka buku, jurnal, ataupun dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun studi pustaka adalah kegiatan yang menyangkut dengan teknik pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zedd, 2003).

Penulis menggunakan berbagai sumber studi pustaka seperti jurnal ilmiah, buku akademis, konten dari media sosial, situs web, dan penelitian terdahulu. Jurnal ilmiah memberikan dasar teoritis dan hasil penelitian yang kuat, sementara buku akademis menyediakan kerangka konseptual yang mendalam. Sumber dari media sosial dan situs web memberikan akses langsung ke informasi aktual dan diskusi terkini yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka terdahulu membantu dalam membangun konteks historis dan perkembangan gagasan yang telah diuji sebelumnya. Kombinasi dari berbagai sumber ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumen yang komprehensif dan mendalam dalam karya penulis.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan informasi mengenai data penelitan (Riadi, 2016). Sumber data pada dasarnya adalah informasi yang harus diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data adalah dari mana data yang didapatkan oleh penulis (Sujarweni, 2018). Pada penelitian kali ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

No	Nama	Jabatan	Kontribusi Wawancara
1	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Deputi Bidang Admistrasi	Mengetahui data dan langkah strategis secara konseptual antara Bawaslu RI dan lembaga-lembaga lainnya
2	Lolly Suhenty	Divisi Pencegahan, Partisipasi	Mengetahui data Bawaslu RI dalam melakukan pengimplementasian

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial
3	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Mengetahui data KPU RI dalam melakukan pengimplementasian pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial
4	Ismail Cawindu	Kepala Pusat informasi dan Hubungan Informasi	Mengetahui data untuk langkah strategis konseptual antara kominfo dan lembaga lainnya, serta pengimplementasian dalam melakukan pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial
5	Masyarakat		Mengetahui data sejauh mana efektifitas setiap aktor dalam melakukan pencegahan penyebaran hoaks di media sosial

Penulis akan melakukan wawancara untuk pengumpulan data utama terhadap narasumber yang sudah tertera diatas, yang dimana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, Kominfo dan Mafindo dalam melakukan pengawasan dan pencegahan hoaks di media sosial menjelang pemilihan umum.

b) Data Sekunder

Pada data sekunder peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk memperoleh data. Hal tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, buku, web resmi, media sosial, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur menjadi teknik penulis untuk mendapatkan data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3.5 Teknis Analisis Data

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses yang digunakan peneliti untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan oleh penulis terbagi atas beberapa tahapan:

1. Reduksi data

Sugiyono (2018), reduksi data merupakan merangkum dan memilih data pokok untuk memperkecil ataupun memfokuskan data terhadap topik penelitian, yang mana akan mempermudah penulis dalam menyajikan data pada pokok pembahas.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah hal penting dalam penelitian, hal tersebut diakibatkan penyajian data dapat mempermudah pembaca dalam memahami topik penelitian. Pada penelitian kualitatif sendiri penyajian data dapat berupa teks dan bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah akhir dari penulisan penelitian dimana akan menghasilkan pokok-pokok penelitian yang telah di bahas dalam pembahasan. Pada penelitian kualitatif penarikan kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan sejak awal. Penarikan kesimpulan akan menyajikan intisari penelitian dengan di dukung oleh data-data yang valid.

3.6 Tabel Rencana Waktu

Tabel 3.1 Tabel Rencana Waktu

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	September 2024	Oktober 2024
1	Pembuatan Outline							
2	Penyusunan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Sidang Proposal							
5	Revisi Proposal							
6	Bimbingan Skripsi							
7	Pengambilan Data							
8	Pengolahan Data							
9	Penulisan Skripsi							
10	Sidang Skripsi							

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Dinamika Hoaks di media sosial

Penyebaran hoaks di media sosial mengalami peningkatan pesat setiap kali Indonesia memasuki siklus pemilu. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi, tetapi juga mencerminkan pergeseran medan pertarungan politik ke ruang digital yang semakin kompleks. Berdasarkan pemantauan historis, lonjakan signifikan pertama terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana isu SARA dan hoaks politik mendominasi ruang digital. Komisi Informasi Pusat mencatat bahwa sepanjang Januari 2017 saja—bertepatan dengan masa kampanye putaran pertama—Kominfo menerima lebih dari 5.070 laporan konten hoaks, sebagian besar menyerang kandidat tertentu dengan narasi kebencian berbasis agama dan identitas (SINDOnews, 2017). Lonjakan ini menandai awal dari gelombang disinformasi politik terstruktur di Indonesia yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama.

Peningkatan yang lebih sistematis terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Sejak Agustus 2018 hingga April 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat setidaknya 1.645 hoaks terkait politik, dengan intensitas tertinggi pada bulan Maret 2019 yang mencapai 453 konten hoaks dalam satu bulan—kenaikan lebih dari 18 kali lipat dibandingkan Agustus 2018 yang hanya mencatat 25 kasus (Perdana & Purba, 2019). Laporan ini diperkuat oleh data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), yang menyebutkan bahwa sepanjang 2018, mereka telah memverifikasi 997 hoaks, di mana hampir 50% di antaranya bertema politik, dengan peningkatan tajam sejak Juli 2018 (MAFINDO, 2019).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dinamika serupa kembali terulang menjelang Pemilu 2024, namun dengan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi karena ekosistem digital telah berkembang pesat. Jika pada 2022 hanya tercatat 10 isu hoaks pemilu, maka dalam kurun Januari hingga Oktober 2023 saja, jumlahnya melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi 98 isu (Kristianti, 2023). Saat mendekati masa pemungutan suara, Kominfo merilis data bahwa selama periode Januari 2023 hingga Januari 2024 terdapat setidaknya 204 isu hoaks pemilu yang tersebar dalam 3.144 konten digital (Kompas CekFakta, 2024; Arsika, 2024). Konten-konten ini didistribusikan secara masif melalui berbagai kanal media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan grup percakapan WhatsApp, dengan teknik manipulasi visual, potongan video, hingga narasi palsu yang mencatut nama lembaga resmi atau tokoh publik. Banyak dari hoaks ini bersifat menyerang, mengandung provokasi, serta bertujuan memengaruhi opini publik atau memperlemah kepercayaan terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung.

Hoaks politik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan hoaks di isu lain seperti kesehatan atau bencana. Isu-isu politik cenderung memicu keterlibatan emosional yang lebih tinggi dari masyarakat, khususnya ketika dikaitkan dengan identitas politik, agama, atau etnis. Karena itu, hoaks politik lebih cepat menyebar, lebih sulit dipatahkan, dan berpotensi menciptakan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2024, temuan SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar hoaks politik yang beredar tidak muncul secara alami, melainkan merupakan bagian dari pola *coordinated inauthentic behavior* (perilaku tidak otentik yang terkoordinasi) oleh jaringan akun bot dan buzzer yang saling memperkuat narasi tertentu. Sekitar 300 akun teridentifikasi menyebarkan hoaks secara serempak dan sistematis menjelang pemungutan suara, terutama dengan tujuan mendiskreditkan pasangan calon tertentu atau menggiring sentimen terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang secara inheren memperkuat konten yang bersifat kontroversial dan viral, bukan yang paling akurat. Alhasil, pengguna media sosial lebih banyak terpapar narasi yang bersifat konfirmatif terhadap pandangan politik mereka sendiri, menciptakan *echo chamber* yang menutup ruang untuk verifikasi. Penelitian MAFINDO dan Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada 2023 menemukan bahwa 1 dari 5 pengguna media sosial di Indonesia pernah menyebarkan informasi yang kemudian terbukti hoaks, dan mayoritas melakukannya karena menganggap sumbernya kredibel, seperti tokoh politik atau akun dengan simbol otoritas (MAFINDO & CIPG, 2023). Ini menunjukkan bahwa kapasitas literasi digital masyarakat masih belum sebanding dengan derasnya arus informasi, terutama di masa krusial seperti pemilu.

Berdasarkan pola tersebut, jelas bahwa dinamika hoaks di media sosial akan selalu meningkat tajam menjelang pemilu. Hal ini menuntut pendekatan pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis jaringan. Kolaborasi antar lembaga negara seperti Bawaslu dan Kominfo, pelibatan masyarakat sipil seperti MAFINDO, serta kerja sama dengan platform digital menjadi keharusan mutlak. Oleh karena itu, pada sub-bab berikutnya akan dibahas secara lebih dalam bagaimana berbagai aktor dalam jaringan pengawasan hoaks saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menjaga integritas informasi selama proses pemilu berlangsung.

4.2 Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, penyebaran hoaks politik di media sosial menjadi tantangan serius yang mendorong terbentuknya relasi koordinatif antara tiga lembaga utama: Bawaslu, KPU, dan Kominfo. Ketiganya memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi dalam menghadapi disinformasi pemilu. Bawaslu berperan sebagai pengawas sekaligus

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penghubung utama antarlembaga, mengoordinasikan deteksi, klarifikasi, dan penindakan terhadap hoaks yang dapat mengganggu integritas pemilu. Dalam berbagai forum koordinasi, Bawaslu memfasilitasi komunikasi strategis dengan KPU sebagai sumber informasi resmi pemilu, dan Kominfo sebagai eksekutor digital. Hubungan ini penting untuk memastikan setiap isu hoaks tidak ditangani secara terpisah, tetapi melalui mekanisme bersama yang efisien dan akuntabel.

Kominfo, melalui sistem Artificial Intelligence System (AIS), bertugas mendeteksi dan mengumpulkan data konten bermuatan hoaks yang tersebar di media sosial. Sepanjang Januari 2023 hingga Januari 2024, AIS mencatat lebih dari 200 isu hoaks terkait pemilu dengan ribuan konten teridentifikasi, sebagian besar disampaikan ke Bawaslu dan KPU untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, KPU memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang menyangkut tahapan, prosedur, dan hasil pemilu. Keterangan resmi dari KPU menjadi landasan bagi Bawaslu dalam mengklasifikasi apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks yang menyesatkan publik. Proses ini menunjukkan pentingnya keterhubungan fungsi kelembagaan: Kominfo menyediakan data deteksi, KPU memberikan verifikasi isi, dan Bawaslu memutuskan langkah pengawasan yang tepat, termasuk menyusun rekomendasi penindakan atau permintaan takedown.

Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo ini merepresentasikan sistem kerja berbasis jaringan yang semakin diperlukan dalam ekosistem informasi digital. Tidak hanya soal berbagi tugas, tetapi juga sinkronisasi ritme kerja antar lembaga agar penanganan hoaks berjalan cepat dan tidak kontraproduktif. Bawaslu sebagai aktor sentral berperan menjaga keseimbangan kerja sama ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan data teknologi dari Kominfo dan keakuratan informasi dari KPU. Relasi multi-aktor ini menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu, karena

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menunjukkan bahwa pengawasan informasi dijalankan secara kolektif, terukur, dan sesuai dengan mandat hukum masing-masing lembaga. Untuk memahami lebih dalam bagaimana jaringan ini terbentuk dan bekerja secara efektif, penting untuk menelaahnya melalui empat momen utama dalam Actor-Network Theory (ANT): problematisasi, penarikan, pelibatan, dan mobilisasi. Keempat momen ini memberikan kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana Bawaslu memosisikan diri sebagai aktor kunci, bagaimana ia menarik aktor lain ke dalam jaringan, membagi peran secara strategis, dan menjaga stabilitas kerja sama hingga tindakan kolektif dapat terwujud secara nyata dalam pencegahan hoaks pada Pemilu 2024.

4.2.1 Penentuan Aktor Kunci (Momen Problematisasi) Dalam Dinamika Multi-Aktor Pada Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial

Momen problematisasi merupakan tahap awal, aktor inisiator mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian bersama. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti tantangan sosial, teknis, atau politik. Aktor tersebut akan berusaha mengonstruksi masalah tersebut dengan cara yang menjadikannya relevan bagi aktor-aktor lainnya (Callon, Michel. 1986).

Pada momen problematisasi aktor kunci untuk mengidentifikasi penyebaran hoaks dalam proses pemilu adalah Bawaslu RI. Bawaslu RI mengidentifikasi masalah hoaks sebagai salah satu isu krusial karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi. Hoaks telah menjadi ancaman serius bagi kelancaran pemilu di Indonesia. Jelang pemilihan, banyak informasi menyesatkan yang tersebar di media sosial, berpotensi mengaburkan fakta serta membentuk opini publik yang keliru. Penyebaran hoaks ini dapat dengan cepat memengaruhi pandangan masyarakat dan memicu ketidakstabilan dalam proses demokrasi. Besarnya dampak hoaks membuat lembaga-lembaga terkait perlu bertindak segera untuk menangani masalah ini secara serius. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu menganggap hoaks sebagai

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

isu krusial yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan perannya sebagai pengawas utama, Bawaslu secara aktif melakukan pemantauan terhadap berbagai konten yang tersebar di media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru. Hoaks tak hanya membingungkan masyarakat tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik pada proses pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu menjadikan pengawasan terhadap hoaks sebagai salah satu prioritas utama untuk menjaga agar pemilu tetap berjalan secara jujur dan adil.

Selanjutnya Bawaslu RI melakukan pengkontruksian masalah hoaks untuk melakukan pencegahan pelanggaran konten internet (siber). Bawaslu melakukan pengkontruksian masalah dengan cara membuat peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan isu strategis kampanye di media sosial pada tahun 2023 sebagai acuan kebijakan penting, baik untuk Bawaslu maupun berbagai pihak eksternal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sosialisasi mengenai Indeks Kerawanan Pemilu yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 12. Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024



Sumber: Awall. Id (Redaksi)

Indeks Kerawanan Pemilu ini berhasil meningkatkan partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam mengawal Pemilu 2024, menunjukkan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perhatian dan dukungan publik terhadap pemilu yang aman dan adil. Salah satu simpulannya menyatakan bahwa kampanye bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), *hoaks* dan ujaran kebencian di media sosial adalah strategi kampanye yang berpotensi besar melahirkan Kekerasan dan Konflik antar masyarakat di dunia nyata. Peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan pada tahun 2024 yang menyatakan kampanye bermuatan SARA, fitnah, *hoaks*, hasutan dan adu domba merupakan salah satu indikator kerawanan kampanye yang digunakan untuk saling menyerang pasangan calon dan memperkuat polarisasi di masyarakat (Lolly, 2022)

Bawaslu memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilu, terutama dalam mengatasi penyebaran *hoaks* yang kerap kali muncul menjelang atau saat pemilihan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berfokus pada pemantauan konten di media sosial untuk mengidentifikasi unggahan yang berpotensi menyesatkan atau memicu disinformasi. Berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya, *hoaks* menjadi masalah utama yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara luas dan mengganggu jalannya pemilu yang adil. Media sosial menjadi ruang yang rentan karena mampu menggiring opini publik secara cepat dan masif. Penyebaran *hoaks* melalui platform ini dapat berdampak besar pada pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik, bahkan dalam waktu singkat. *Hoaks* ini tidak hanya menimbulkan kebingungan tetapi juga dapat memengaruhi pilihan politik secara tidak proporsional, menciptakan lingkungan pemilu yang tidak sehat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat dalam menjalankan peran krusialnya untuk menjaga integritas pemilu, termasuk dalam mengatasi penyebaran *hoaks* yang marak di media sosial menjelang dan selama tahapan pemilu. Kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (5) yang mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pasal-pasal seperti Pasal 93 sampai 95, serta Pasal 101 huruf (b) dan (f), Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan atau hoaks. Lebih lanjut, Pasal 102 huruf (k) secara eksplisit memperbolehkan Bawaslu menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi konten di internet dan media sosial selama masa pemilu.

Dalam konteks ekosistem digital yang semakin kompleks Ferdinad Eskol sebagai Deputy Administrasi Bawaslu menyatakan, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga tampil sebagai aktor kunci dalam membentuk relasi strategis antarlembaga. Mengacu pada pendekatan teori Jaringan Aktor (Actor-Network Theory/ANT), Bawaslu dapat diposisikan sebagai “perantara” yang menyatukan berbagai aktor—seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), platform media sosial, serta organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO—dalam upaya kolektif mencegah dan menangani hoaks. Peran ini menjadikan Bawaslu sebagai simpul utama dalam jaringan pengawasan pemilu digital, yang tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada publik. Dengan kewenangan dan posisi strategis tersebut, Bawaslu menjadi wajah utama dalam relasi multi-aktor untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari disinformasi di ruang digital

Bawaslu RI juga bertindak sebagai inisiator, dimana Bawaslu berperan sebagai pemimpin dalam koordinasi antar-aktor untuk menangani hoaks, khususnya menjelang pemilu. Sebagai leader, Bawaslu aktif menindaklanjuti setiap masukan, laporan, dan temuan dari berbagai lembaga maupun organisasi yang fokus pada masalah hoaks,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan isu disinformasi. Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024. Surat edaran ini memberikan mandat kepada untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dari RI sampai Kabupaten/Kota. Tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan konten internet dengan strategi pencegahan pelanggaran yang terencana. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Tim Fasilitasi tersebut meliputi patroli pengawasan konten internet yang bekerja sama dengan instansi terkait, penelusuran konten di portal berita dan media sosial, serta pengawasan bersama organisasi masyarakat sipil dan pemantau pemilihan. Bawaslu juga berwenang melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan, baik melalui aduan masyarakat maupun hasil pengawasan yang dilakukan. Bawaslu mempublikasikan hasil cek fakta atas hoaks yang beredar, memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu di semua tingkatan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang ke Bawaslu RI. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu RI berupaya mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat selama proses pemilu, memastikan bahwa pengawasan hoaks dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Sebagai langkah konkret dari hal tersebut Bawaslu RI menerbitkan **Surat Edaran (SE) Nomor 102 Tahun 2024** tentang *Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber)* untuk Pilkada 2024. SE ini memerintahkan seluruh jajaran—dari pusat sampai Pengawas Kelurahan/Desa—membentuk **Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet** yang bertugas melakukan patroli siber terencana, menelusuri konten di portal berita & media sosial, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, platform digital, dan organisasi masyarakat sipil. Mandat tersebut ditegaskan lagi oleh Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu RI, seperti yang dijelaskan oleh

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Lolly Suhenty, yang meminta setiap level untuk melaksanakan instruksi SE 102 dan tidak membiarkan satu pun isu viral tanpa respon resmi.

Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai penerima laporan, tetapi juga memastikan semua pihak terlibat secara aktif dan bersama-sama dalam upaya memantau serta mengendalikan penyebaran hoaks di media sosial. Sebagai bagian dari inisiatif kepemimpinan ini, Bawaslu mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan berbagai aktor yang berkonsentrasi pada pengawasan dan penanganan hoaks. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Bawaslu membahas perkembangan terbaru terkait pola penyebaran hoaks, strategi penanganan yang lebih efektif, serta langkah-langkah kolaboratif yang bisa diterapkan agar pengawasan lebih maksimal. Melalui pendekatan ini, Bawaslu berharap jaringan antar-aktor dapat bekerja secara sinergis, sehingga segala upaya pencegahan hoaks dapat dilakukan lebih optimal dan berdampak positif pada jalannya pemilu. Upaya Bawaslu dalam memimpin kolaborasi dan pertemuan rutin ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keadilan dan transparansi pemilu, menciptakan ruang demokrasi yang sehat, dan menghindarkan pemilih dari pengaruh buruk disinformasi.

Dalam upayanya menangani hoaks, Bawaslu tak bekerja sendirian. Dengan menyadari bahwa skala dan pengaruh hoaks cukup besar, Bawaslu menggandeng instansi lain, seperti Kominfo, KPU, dan Mafindo untuk berkolaborasi menangani penyebaran informasi palsu. Lewat kerja sama ini, Bawaslu berharap pengawasan terhadap hoaks dapat diperkuat dan dijalankan secara efektif. Bawaslu mengambil langkah penting dalam menghadapi masalah hoaks dalam pemilu dengan menjalin nota kesepahaman (MOU) bersama sejumlah lembaga lain. Kerja sama ini bertujuan membangun jaringan yang kuat untuk memantau dan mencegah penyebaran hoaks yang bisa memengaruhi pandangan publik dan merusak demokrasi. Selain bekerja sama dengan lembaga formal, Bawaslu juga aktif menggandeng masyarakat sipil yang peduli dengan isu hoaks dan disinformasi. Melalui pertemuan dan diskusi,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bawaslu bersama para aktivis masyarakat sipil saling bertukar wawasan, merumuskan strategi, dan memperkuat koordinasi demi menjamin pemilu yang jujur dan bebas dari hoaks. Upaya ini diharapkan dapat melindungi pemilih dari dampak negatif disinformasi serta menciptakan pemilu yang transparan dan adil. Selain pengawasan ketat, Bawaslu juga berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Bawaslu percaya bahwa publik yang lebih paham dan bisa memilah antara informasi yang akurat dan hoaks akan menjadi langkah pencegahan penting. Dengan kolaborasi ini serta inisiatif Bawaslu sebagai pelopor, diharapkan pemilu di Indonesia bisa berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari pengaruh hoaks yang merugikan.

Dalam upaya memerangi hoaks dan informasi yang menyesatkan terkait pemilu, Bawaslu telah menjalin berbagai kemitraan strategis dengan sejumlah aktor kunci, termasuk KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) (Hukum Online, 2023). Kerja sama ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Bawaslu bekerjasama dengan Kominfo. Melalui kerja sama ini, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan siber, mengidentifikasi konten yang berpotensi merugikan, dan kemudian melaporkan kepada Kominfo untuk dilakukan tindakan penanganan, termasuk penutupan atau takedown konten yang dianggap melanggar.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar 13. Penandatanganan MoU Untuk Membangun Pencegahan Hoaks



Sumber: HukumOnline

Selanjutnya, Bawaslu juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan MAFINDO, yang merupakan bagian dari koalisi Cek Fakta. Nota kesepahaman ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya adalah pemantauan konten gangguan informasi dan hasutan kebencian selama tahapan pemilihan. Dalam kerangka kerja sama ini, kedua pihak akan bertukar data dan informasi mengenai konten berbahaya di media sosial, serta mempublikasikan hasil pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan. Selain itu, situs cekfakta.com akan ditautkan ke laman jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id, memudahkan masyarakat untuk memverifikasi informasi yang beredar (Hukum Online, 2023; Cekfakta.com, 2023).

Adapun pada saat melakukan pengecekan masalah pada aktor non-manusia yaitu media sosial Bawaslu RI meminta bantuan dengan kominfo. Bawaslu menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menghadapi tantangan yang timbul dari "aktor non-manusia" dalam pemilu, yaitu media sosial. Dalam jaringan ini, aktor manusia dan non-manusia saling mempengaruhi dan berkontribusi:

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- **Aktor Manusia:** Individu-individu dalam jaringan berperan sebagai penggerak, dengan pengalaman dan keahlian mereka menjadi kunci dalam menyebarkan informasi yang akurat. Mereka juga berfungsi sebagai pengawas dan pelapor hoaks, sehingga membantu memperkuat kesadaran kolektif.
- **Aktor Non-Manusia:** Teknologi dan platform media sosial berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, mempercepat komunikasi, dan memperluas jangkauan. Misalnya, algoritma media sosial dapat mempengaruhi seberapa cepat dan luas informasi—baik yang benar maupun yang salah—disebarkan. Dalam konteks ini, Bawaslu harus beradaptasi dengan dinamika digital untuk memitigasi penyebaran hoaks.

Aktor Manusia:

- **Lembaga Pemerintah:** Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengawasi konten internet. Kerja sama ini membantu dalam penanganan hoaks dan konten yang melanggar aturan pemilu. Sebagai contoh nyata dari kinerja tersebut Bawaslu RI melakukan kontrak kerjam sama dengan Kominfo, dimana Kominfo bertanggung jawab atas menindak lanjuti konten internet sementara Bawaslu menyediakan hasil pengawasan mengenai konten yang di anggap melanggar ketentuan (Aptika,2020).
- **Organisasi Masyarakat Sipil:** Bawaslu juga melibatkan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan AMSI dalam koalisi Cek Fakta, untuk melakukan pemantauan dan verifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, koalisi CekFakta.com berhasil mengidentifikasi 56 konten hoaks dan menerbitkan 107 artikel klarifikasi, melibatkan 131 media lokal dan nasional (Pribadi,2024). Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan Mafindo dan Perludem untuk meningkatkan literasi digital masyarakat

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

guna memastikan penyebaran informasi yang akurat selama pemilu (Pradana,2022). Kerja sama ini mencerminkan upaya bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat.

- **Akademisi dan Peneliti:** Keterlibatan akademisi dan peneliti membantu dalam pengembangan metodologi pengawasan yang lebih baik serta pemahaman mendalam tentang dinamika informasi di ruang siber.

Aktor Non-Manusia:

- **Teknologi dan Alat Pemantauan:** Bawaslu memanfaatkan alat dan teknologi pemantauan untuk mendeteksi konten yang berpotensi menyesatkan di media sosial dan portal berita. Alat yang dipakai disebut mesin crawling, dimana alat tersebut untuk menyaring dan mendeteksi konten hoaks dengan membaca dinamika kata per kata serta mendeteksi kalimat-kalimat yang mencurigikan
- **Platform Digital:** Kolaborasi dengan platform media sosial seperti Meta dan Tiktok juga penting untuk memastikan penanganan cepat terhadap konten yang melanggar ketentuan pemilu. Bawaslu dapat meminta platform-platform ini untuk menghapus atau menandai konten yang dianggap hoaks.

Sebagai platform yang dapat mempengaruhi opini publik secara luas dan cepat, media sosial sering kali menjadi ruang bagi tersebarnya hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Kominfo bekerja sama untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul di media sosial, termasuk penyebaran konten yang berpotensi menyesatkan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pengawasan serta mengoptimalkan mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap hoaks, sehingga media sosial tetap menjadi ruang yang sehat dan informatif bagi masyarakat selama proses pemilu berlangsung (Bawaslu RI, 2023).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bawaslu memandang Media sosial berfungsi sebagai "aktor non-manusia" yang memainkan peran krusial dalam pemilihan umum, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial sangat tinggi, yang berarti bahwa berita atau informasi, baik yang benar maupun yang salah, dapat menjangkau publik dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, terutama dalam menghadapi potensi penyebaran hoaks yang bisa mempengaruhi pandangan dan keputusan pemilih. Menyadari dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh hoaks, Bawaslu RI mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan secara intensif dan masif di berbagai platform media sosial. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan sebelum dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Dengan memantau berbagai saluran komunikasi digital, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menanggulangi isu-isu yang muncul, serta memberikan klarifikasi dan informasi yang tepat kepada publik. Lebih dari sekadar pengawasan, Bawaslu juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memverifikasi informasi yang mereka terima melalui media sosial. Melalui kampanye edukasi dan literasi digital, Bawaslu berharap masyarakat dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan mampu membedakan antara informasi yang valid dan hoaks (Bawaslu RI, 2023). Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil Bawaslu tidak hanya berfokus pada pencegahan penyebaran hoaks, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Dengan melihat bagaimana peran aktor non-manusia sangat penting untuk menanganin kasus hoaks di media sosial Bawaslu RI menjalin kontrak kerja sama dengan Kominfo, dimana Kominfo menjalankan peran untuk Kominfo memanfaatkan aktor non-manusia seperti platform media sosial dan algoritma pemfilteran sebagai bagian dari strategi untuk

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memerangi penyebaran hoaks di ruang digital. Berdasarkan perspektif **Teori Jaringan Aktor (Actor-Network Theory/ANT)**, platform digital dan algoritma ini dianggap sebagai aktor yang aktif dalam jaringan pengawasan hoaks. Berikut adalah cara Kominfo menarik mereka dalam upaya tersebut:

1. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

- **Kemitraan Formal:** Kominfo bekerja sama dengan platform besar seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mengidentifikasi dan menindak hoaks. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja bersama.
- **Penyediaan Jalur Komunikasi Cepat:** Kominfo membangun mekanisme pelaporan langsung untuk hoaks, seperti sistem **Trusted Flaggers**, yang memungkinkan pemerintah meminta platform menghapus konten hoaks secara prioritas.
- **Audit dan Transparansi Algoritma:** Kominfo mendorong platform untuk lebih transparan tentang cara kerja algoritma mereka dalam menyaring informasi palsu dan mencegah amplifikasi hoaks.

2. Pemanfaatan Algoritma Pemfilteran

- **Pendeteksian Otomatis:** Kominfo memanfaatkan algoritma canggih yang dikembangkan oleh platform untuk mendeteksi pola hoaks berdasarkan kata kunci, metadata, dan pola distribusi konten.
- **Pengurangan Jangkauan Hoaks:** Algoritma digunakan untuk menurunkan peringkat atau mencegah distribusi konten yang dicurigai sebagai hoaks, sehingga tidak muncul di feed pengguna.

3. Pengembangan Teknologi Lokal

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Kominfo berinvestasi dalam pengembangan teknologi nasional yang mampu mendeteksi hoaks, seperti **alat pelacak berita palsu** berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini bekerja sama dengan algoritma platform media sosial. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan database pemerintah untuk mempercepat proses validasi fakta.

4. Regulasi dan Penegakan Hukum

- Kominfo mengatur platform media sosial melalui kebijakan seperti **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020**, yang mewajibkan platform untuk menangani konten ilegal, termasuk hoaks, dalam batas waktu tertentu.
- Penegakan hukum terhadap platform yang tidak mematuhi kewajiban ini, termasuk ancaman pembatasan layanan.

5. Edukasi Algoritma dan Data Valid

- Kominfo menyediakan data valid dan sumber informasi resmi kepada platform untuk melatih algoritma pemfilteran mereka agar lebih akurat dalam mengenali hoaks.
- Kerja sama dengan lembaga seperti MAFINDO untuk memperkaya algoritma dengan data hoaks yang telah diverifikasi.

Bawaslu RI secara aktif membangun jaringan pengawasan hoaks dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya dalam mengelola aktor non-manusia seperti media sosial yang berperan besar dalam penyebaran informasi pemilu. Salah satu bentuk konkret kolaborasi ini adalah pemanfaatan **mesin AIS (Automatic Internet Sweeper)** milik Kominfo (Kominfo, 2022). AIS merupakan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sistem pemantauan siber yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Mesin ini bekerja secara otomatis untuk mengidentifikasi, menyaring, dan merekam konten-konten negatif, termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA yang tersebar di ruang digital. Teknologi ini memungkinkan Kominfo mendeteksi konten bermasalah berdasarkan kata kunci, metadata, serta pola penyebaran di media sosial dan situs web. Setelah data dikumpulkan oleh AIS, temuan tersebut akan disampaikan kepada Bawaslu untuk diverifikasi dan kemudian ditindaklanjuti, baik dalam bentuk klarifikasi publik maupun permintaan penghapusan konten kepada platform digital melalui skema “trusted flaggers” (Kominfo, 2022). Kolaborasi ini mencerminkan peran strategis teknologi (aktor non-manusia) dalam jaringan pengawasan pemilu sebagaimana dimaknai dalam kerangka Teori Jaringan Aktor (ANT) (Latour, 2005; Kominfo, 2022). Mesin AIS ini menjadi ujung tombak Kominfo dalam mendukung stabilitas informasi publik selama pemilu berlangsung.

Gambar 14. Pengenalan Mesin Crawling Konten Internet Negatif (AIS)



Sumber: Kominfo

Gambar di atas menunjukkan **mesin AIS (Automatic Internet Sweeper)** yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pusat pengawasan konten digital di Indonesia. Mesin AIS

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

beroperasi selama 24 jam penuh dalam ruangan siber bernama *Cyber Drone 9* dan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi konten-konten yang melanggar hukum atau etika, seperti hoaks, ujaran kebencian, hingga disinformasi yang berkaitan dengan pemilu (Kominfo, 2022). Mesin ini bekerja dengan menyisir internet secara otomatis menggunakan kata kunci tertentu, menganalisis metadata, hingga mengenali pola sebaran informasi mencurigakan di media sosial, portal berita, maupun platform digital lainnya. Hasil temuan dari AIS kemudian dianalisis oleh tim Kominfo, dan apabila terbukti melanggar, akan diteruskan kepada platform digital untuk dilakukan penurunan (take down) (Kominfo, 2022). Dalam konteks pengawasan pemilu, mesin ini berperan penting sebagai **aktor non-manusia** dalam jaringan kerja Bawaslu dan Kominfo, karena mampu mempercepat deteksi serta penindakan terhadap informasi menyesatkan di ruang digital (Latour, 2005; Bawaslu RI, 2023). Keberadaan AIS menunjukkan bahwa pengawasan informasi saat ini tidak bisa hanya mengandalkan tenaga manusia, tetapi juga memerlukan dukungan teknologi canggih yang mampu membaca dan memfilter dinamika informasi secara real-time

Melalui strategi ini, Kominfo memastikan aktor non-manusia menjadi bagian aktif dari jaringan yang mendukung stabilitas informasi publik selama pemilu dan seterusnya. Kominfo menganggap penyebaran hoaks sebagai ancaman besar terhadap stabilitas informasi publik, khususnya dalam konteks pemilu, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat, mempengaruhi partisipasi pemilih, dan merusak kredibilitas penyelenggara pemilu. Yaitu:

1. Ancaman terhadap Kepercayaan Publik

Hoaks yang tersebar saat pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu. Berita palsu yang menyebarkan isu tentang kecurangan atau manipulasi suara dapat menurunkan keyakinan masyarakat

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terhadap proses pemilu yang berjalan. Dampak jangka panjangnya adalah polarisasi politik dan peningkatan ketegangan sosial yang merugikan (Gunawan, 2023; Wardhani, 2022).

2. Distorsi Informasi Publik

Penyebaran hoaks mengacaukan arus informasi publik dengan mencampur adukkan fakta dan kebohongan, yang membuat masyarakat kesulitan membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal ini berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam pemilu, dan dapat mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi fokus utama (MAFINDO, 2023; Wardle & Derakhshan, 2017).

3. Pengaruh terhadap Partisipasi Pemilih

Hoaks dapat menurunkan partisipasi pemilih dengan menimbulkan rasa takut atau keraguan, seperti menyebarkan informasi palsu terkait ancaman keamanan di TPS atau isu yang merugikan semangat pemilih. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (Kominfo, 2022; Suryani & Ramadhan, 2021).

4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Penyebaran Hoaks

Kominfo mengidentifikasi bahwa teknologi digital, terutama media sosial, sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks secara cepat dan luas. Algoritma yang ada pada platform-platform ini seringkali memperbesar jangkauan informasi yang bersifat emosional atau kontroversial, memudahkan hoaks tersebar dalam waktu singkat (Kominfo, 2022).

5. Kerentanan terhadap Serangan Siber

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hoaks sering kali beriringan dengan serangan siber, seperti peretasan situs web pemerintah atau penyebaran dokumen palsu, yang semakin memperburuk situasi dengan memperkuat narasi palsu dan membingungkan publik (Kominfo, 2023; BSSN, 2022).

6. Bahaya Polarisasi dan Konflik Sosial

Penyebaran hoaks dapat memperburuk polarisasi sosial, memperdalam perbedaan di antara kelompok-kelompok pendukung kandidat tertentu. Narasi palsu yang menyerang salah satu pihak dapat memicu ketegangan, baik secara fisik maupun online, dan bahkan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar (Wijayanto, 2020; Bawaslu RI, 2023).

Upaya Penanganan oleh Kominfo, untuk menghadapi ancaman ini, Kominfo melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

- **Deteksi dan Penghapusan Konten Hoaks:** Kominfo bekerja sama dengan platform digital untuk dengan cepat mendeteksi dan menghapus konten hoaks agar tidak menyebar lebih luas.
- **Meningkatkan Literasi Digital:** Kominfo berfokus pada edukasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan memverifikasi informasi, guna mencegah penyebaran hoaks.
- **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** Kominfo bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan MAFINDO untuk menyediakan informasi yang valid dan mengedukasi publik agar bisa membedakan informasi yang benar dan yang salah.
- **Pengawasan Keamanan Dunia Maya:** Kominfo juga mengawasi dunia maya untuk mencegah serangan siber yang dapat memperburuk situasi dan memperkuat penyebaran hoaks.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan pendekatan ini, Kominfo berkomitmen untuk menjaga ruang digital tetap aman, terpercaya, dan mendukung pemilu yang adil, transparan, serta bebas dari hoaks.

Dinamika aktor memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa pemilu dan pemilihan bebas dari pengaruh negatif penyebaran hoaks, yang dapat menciptakan polarisasi di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas demokrasi. Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu mengadopsi pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, sehingga pemahaman mengenai bahaya hoaks dan pentingnya pengawasan konten internet semakin meluas. Berikut langkah-langkah strategis yang dilakukan Bawaslu RI:

1. Melaunching Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Peta Kerawanan Pemilihan

Bawaslu merilis IKP dan peta kerawanan sebagai panduan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran hoaks hal tersebut di ucapkan langsung Lolly Suhenty sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Langkah ini memberikan pemahaman kepada publik dan para pemangku kepentingan bahwa hoaks dapat memperburuk situasi kerawanan pemilu.

Gambar 15. Buku Indeks Kerawanan Pemilu



Sumber: Bawaslu.go.id

2. Menyajikan Data Laporan atau Temuan Pengawasan Konten Internet/Siber

Melalui data yang didokumentasikan, Bawaslu menunjukkan dampak konkret dari hoaks yang telah beredar. Dengan bukti ini, Bawaslu tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga meyakinkan aktor-aktor lain akan pentingnya keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan.

Gambar 16. Penyajian Data Laporan Hoaks



Sumber: Tempo

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, memaparkan bahwa sepanjang masa kampanye Pemilu 2024—dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024—tercatat 355 pelanggaran konten internet. Dari jumlah tersebut, 340 di antaranya berupa ujaran kebencian, 10 konten terkait politisasi SARA, dan 5 konten berisi berita bohong. Rinciannya menunjukkan 342 konten menyerang seluruh pasangan calon presiden—wakil presiden, sedangkan 13 konten lainnya menargetkan penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU. Jika dilihat per platform, Facebook menempati posisi teratas dengan 118 konten melanggar, disusul Instagram (106 konten), Twitter (101 konten), TikTok (28 konten), dan YouTube (2 konten). Temuan ini diungkapkan Lolly dalam keterangan pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Senin, 12 Februari 2024.

3. **Mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Pengawasan Konten Internet**

Bawaslu RI telah menetapkan **Surat Edaran (SE) Nomor 102 Tahun 2024** sebagai instrumen formal untuk memperkuat pengawasan konten internet selama pemilihan serentak tahun 2024. SE ini ditujukan kepada seluruh jajaran Bawaslu—mulai dari provinsi hingga tingkat desa—untuk membentuk **Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber)** dengan tugas utama mengidentifikasi potensi hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan pelanggaran kampanye lainnya. SE ini memberi panduan resmi untuk mengawasi dan menindak penyebaran hoaks di media sosial, terutama dalam tahapan krusial pemilu. SE ini juga menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi seluruh elemen masyarakat (Bawaslu RI, 2024).

4. **Menerima Aduan/Laporan Khusus Tentang Pengawasan Konten Internet**

Bawaslu membuka saluran pelaporan bagi masyarakat yang menemukan hoaks di media sosial. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, isu ini menjadi perhatian publik yang

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lebih luas. Bawaslu RI menerima aduan atau laporan mengenai pengawasan konten internet melalui berbagai kanal resmi yang dirancang untuk memudahkan partisipasi publik dalam menangkal penyebaran hoaks dan pelanggaran kampanye digital selama pemilu. Masyarakat dapat mengakses portal pelaporan daring melalui laman **jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id**,

Gambar 17. Web Bawaslu Untuk Masyarakat Mengirimkan Pelaporan Konten Hoaks



Sumber: Bawaslu RI

Pada portal tersebut pelapor diminta mengisi formulir online yang memuat tautan konten bermasalah, bukti tangkapan layar, serta deskripsi singkat mengenai pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, aduan juga dapat dikirimkan melalui email resmi ke **medsos@bawaslu.go.id**, yang ditujukan untuk pelaporan berbasis bukti digital secara lebih formal. Untuk pelaporan yang bersifat cepat dan langsung, Bawaslu menyediakan layanan aduan WhatsApp melalui nomor **0811-9810-123** (Lolly Suhenty, 2023), yang memungkinkan masyarakat melaporkan konten bermasalah hanya dengan mengirimkan pesan dan bukti pelanggaran. Di tingkat lokal, posko pengaduan juga tersedia di kantor-kantor Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, yang dikelola langsung oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Siber. Laporan yang masuk melalui berbagai saluran ini akan diverifikasi, ditindaklanjuti secara berjenjang, dan jika memenuhi unsur

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelanggaran, akan diteruskan ke Kementerian Kominfo untuk tindakan lanjutan seperti pemblokiran atau penghapusan konten (*takedown*). Seluruh prosedur ini merupakan bagian dari strategi Bawaslu untuk mendorong pengawasan partisipatif dan membangun ekosistem digital yang sehat selama proses pemilu .

5. Melakukan Patroli Pengawasan Konten Internet

Melalui patroli pengawasan, Bawaslu proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak akun-akun penyebar hoaks. Langkah ini tidak hanya mencegah hoaks tersebar lebih jauh tetapi juga menjadi bukti komitmen Bawaslu dalam menjaga ekosistem media sosial tetap sehat selama pemilu. Tim patrol Bawaslu bekerja selama 24 jam untuk memantau akun media sosial pasangan calon dan tim kampanye, serta mendeteksi potensi pelanggaran seperti hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Proses patroli ini menggunakan sistem digital berbasis teknologi yang disebut **Intelligent Media Monitoring (IMM)**, yang dapat diakses melalui laman imm.bawaslu.go.id.

Gambar 18. Web Intelligent Media Monitoring Bawaslu RI



Sumber: imm.bawaslu

Platform tersebut memungkinkan Bawaslu untuk memantau kata kunci tertentu, menganalisis tren penyebaran konten, dan mengidentifikasi unggahan mencurigakan secara otomatis. Jika ditemukan pelanggaran, hasilnya akan ditelaah lebih lanjut dan diserahkan ke Kominfo atau platform digital terkait untuk dilakukan penindakan, seperti penghapusan konten atau pemblokiran akun. Patroli ini juga diperkuat

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

oleh kerja sama Bawaslu dengan pemerintah daerah serta relawan siber yang turut membantu di lapangan. Pendekatan ini terbukti efektif, misalnya dalam masa awal kampanye Pemilu 2024, Bawaslu berhasil mengidentifikasi ratusan konten bermasalah hanya dalam beberapa minggu. Semua hasil patroli dilaporkan secara berkala ke tingkat pusat, sehingga pengawasan terhadap konten internet berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan transparan (Lolly Suhenty, 2023).

6. Melakukan Sosialisasi Langsung dan di Media Sosial

Edukasi yang aktif baik melalui pertemuan langsung maupun media sosial penting untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk hoaks dan pentingnya informasi yang akurat. Dengan semakin banyak pihak terinformasi, Bawaslu berharap kesadaran publik meningkat dan keterlibatan mereka dalam mengawasi semakin kuat (Lolly Suhenty, 2023).

Dengan langkah-langkah di atas, Bawaslu berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa hoaks bukan hanya ancaman bagi lembaga pemilu, tetapi juga bagi demokrasi. Semakin banyak pihak yang terinformasi, semakin baik keterlibatan mereka dalam upaya menciptakan pemilu yang bebas hoaks dan menjaga keutuhan demokrasi **“Laporan dan temuan dugaan pelanggaran diperkirakan terus meningkat mendekati pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.”** — Lolly Suhenty, menjelaskan temuan 126 dugaan pelanggaran konten internet melalui patroli IMM dan siber Bawaslu antara 28 November–19 Desember 2023. Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu berusaha untuk tidak hanya mengandalkan upaya internal, tetapi juga mengajak lebih banyak elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif terhadap hoaks di media sosial. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu berharap dapat memperluas jangkauan pemantauan, memanfaatkan potensi komunitas yang ada untuk bersama-sama mendeteksi informasi yang merugikan dan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melaporkannya secara cepat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan pengawasan hoaks dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi dalam menjaga integritas informasi yang beredar. Bawaslu juga berencana untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat agar mereka lebih mampu mengenali hoaks dan memahami langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaporkannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengawasan hoaks di media sosial adalah sifat dinamis dan cepatnya penyebaran informasi di platform-platform tersebut. Kecepatan ini membuat Bawaslu menyadari bahwa sering kali terjadi keterlambatan dalam mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Ketika sebuah hoaks mulai beredar, dalam waktu singkat, informasi tersebut dapat mencapai ribuan atau bahkan jutaan pengguna, sehingga menimbulkan risiko yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai isu-isu penting dalam pemilu. Pada bagian lainnya Bawaslu RI menjelaskan beberapa tantangan yang di hadapi yaitu:

- Media sosial menghasilkan volume konten yang sangat besar setiap harinya. Bawaslu harus mampu memantau dan menganalisis sejumlah besar informasi, yang dapat membuat deteksi dan penanganan hoaks menjadi sulit. (Bawaslu RI, 2024)
- Hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial, sehingga Bawaslu perlu memiliki mekanisme respons yang cepat untuk menangani informasi yang salah sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih luas (KPU RI, 2023).
- Teknologi yang digunakan dalam analisis data dan pemantauan konten terus berkembang. Bawaslu perlu terus meningkatkan kapasitas teknis dan sumber daya manusia untuk dapat memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengawasan (Bawaslu RI, 2024).
- Membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga dan menghubungkan antar lembaga, merupakan tantangan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tersendiri. Sinergi yang baik diperlukan untuk berbagi data dan informasi (Bawaslu RI, 2024).

Problematisasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait penyebaran hoaks sangat berpengaruh terhadap efektivitas kolaborasi dalam pengawasan karena hal itu menghasilkan:

- **Kesadaran dan Pemahaman:** Dengan memfokuskan perhatian pada hoaks sebagai isu krusial, Bawaslu meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Hal ini membuat lebih banyak pihak berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pencegahan (Bawaslu RI, 2024).
- **Penguatan Regulasi dan Prosedur:** Problematisasi hoaks mendorong Bawaslu untuk mengeluarkan regulasi dan pedoman yang jelas. Ini memberi arah bagi semua aktor dalam jaringan untuk memahami peran mereka dalam mengawasi penyebaran hoaks (Bawaslu RI, 2024; Kominfo, 2023).
- **Responsivitas dan Adaptasi:** Bawaslu yang responsif terhadap dinamika penyebaran hoaks, termasuk merespons aduan masyarakat, memperkuat kolaborasi. Hal ini menciptakan suasana di mana aktor merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam upaya pengawasan (Nasution & Wulandari, 2023; Wahyuni, 2021).
- **Evaluasi dan Penyesuaian Strategi:** Melalui feedback dari kolaborasi, Bawaslu dapat mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, lalu melakukan penyesuaian dalam strategi dan pendekatan mereka (Bawaslu RI, 2024).

Pada bagian lainnya KPU RI memiliki peran yang penting dimana mereka akan membantu Bawaslu RI dengan cara menyediakan Data dan Informasi yang valid. KPU menjadi sumber utama informasi resmi mengenai pemilu, hal tersebut meliputi data peserta, tahapan dan hasil pemilu. Dengan demikian KPU mempersempit celah untuk pelaku penyebara hoaks (KPU RI, 2024). Hubungan ini tentu sangat membantu dalam proses pencegahan hoaks di media sosial. Pada bagian lainnya

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

KPU RI perlu memastikan bahwa perannya dalam jaringan ini tetap kuat dengan bersikap transparan, proaktif, dan inklusif dalam merangkul semua aktor terkait. Bagaimana pandangan KPU terhadap perannya ini bisa memperkuat jaringan keseluruhan dalam melawan hoaks selama pemilu. Tidak hanya Bawaslu dan KPU, Kominfo memiliki peranan yang penting dalam jaringan pengawasan hoaks dengan memanfaatkan otoritasnya dalam regulasi komunikasi dan teknologi informasi. Dalam kerangka kerja sama dengan lembaga lain seperti Bawaslu, KPU, dan MAFINDO, Kominfo dapat memosisikan dirinya sebagai **fasilitator teknologi, regulator, dan penghubung antara platform digital dengan lembaga pengawas pemilu** (Kominfo RI, 2023; MAFINDO, 2023).

Salah satu kelebihan utama Bawaslu RI ialah kemampuannya mengonstruksi masalah hoaks secara strategis dan menjadikannya isu bersama antar lembaga dan masyarakat. Dengan peluncuran *Indeks Kerawanan Pemilu* dan berbagai *Surat Edaran*, Bawaslu tidak hanya menyampaikan urgensi, tetapi juga menyediakan kerangka kerja dan kebijakan yang konkret untuk mengorganisasi keterlibatan aktor-aktor lain (Bawaslu RI, 2023). Kemampuan Bawaslu membangun kemitraan dengan lembaga seperti Kominfo, KPU, dan MAFINDO menunjukkan pendekatan kolaboratif yang kuat dan sesuai dengan prinsip Actor-Network Theory, di mana jaringan terbentuk melalui relasi fungsional dan ketergantungan antar aktor (Latour, 2005). Selain itu, pelibatan aktor non-manusia seperti media sosial dan algoritma pemfilteran memperlihatkan adaptasi Bawaslu terhadap tantangan digital, menjadikannya sebagai aktor yang responsif dan relevan di era disinformasi siber (Callon, 1986; Bawaslu RI, 2024).

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam upaya Bawaslu. Salah satunya adalah ketergantungan pada respons cepat dari aktor lain seperti platform digital dan Kominfo, yang dalam praktiknya belum tentu selalu responsif terhadap dinamika penyebaran hoaks yang

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sangat cepat hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pemantauan juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat volume konten di media sosial sangat besar dan terus berkembang. Bawaslu juga menghadapi tantangan koordinasi lintas lembaga yang kompleks—perbedaan kewenangan, gaya kerja, serta kapasitas teknis antar aktor dapat memperlambat efektivitas tindakan kolektif. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan hoaks meskipun diupayakan, belum tentu menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata karena masih rendahnya literasi digital di sebagian wilayah.

Pada tahapan problematisasi dalam teori Actor-Network Theory (ANT), Bawaslu berupaya memosisikan diri sebagai aktor inisiator yang mengidentifikasi ancaman penyebaran hoaks sebagai masalah utama dalam konteks Pemilu 2024, kemudian menghubungkan aktor lain seperti KPU dan Kominfo ke dalam jaringan kerja kolaboratif untuk menangani isu tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses problematisasi ini menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah belum sinkronnya sistem kerja, data, dan standar klasifikasi informasi antar lembaga. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selama masa kampanye Pemilu 2024, sistem Artificial Intelligence System (AIS) mendeteksi lebih dari 1.760 konten bermuatan hoaks yang tersebar di berbagai platform digital (Kominfo, 2024). Namun, sebagian besar temuan tersebut tidak serta-merta ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena lembaga ini hanya dapat memproses informasi yang relevan secara hukum berdasarkan bukti dan klarifikasi resmi, termasuk dari KPU.

Dalam wawancara lapangan terhadap perwakilan Bawaslu DKI Jakarta, disebutkan bahwa tindakan terhadap konten digital tidak dapat dilakukan secara langsung karena menyangkut ranah hukum dan harus berdasarkan prosedur kelembagaan yang sah (Bawaslu RI, wawancara pribadi, 2024). Di sisi lain, Kominfo menyatakan hanya dapat bertindak

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

jika ada permintaan formal dari Bawaslu atau KPU, sehingga prosesnya berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kecepatan penyebaran hoaks yang terjadi dalam hitungan menit. Kasus penyebaran hoaks terkait hasil quick count Pemilu 2024 menjadi contoh nyata di mana video manipulatif yang tersebar di TikTok dan Facebook tidak segera ditindak karena belum ada kesepakatan antar lembaga mengenai validitas konten tersebut. Menurut laporan Kominfo dan Tempo, sebanyak 89 unggahan serupa telah terdeteksi namun baru dapat ditindaklanjuti pada hari berikutnya (Tempo, 2024).

Situasi ini menandakan bahwa Bawaslu, meskipun memiliki niat untuk menjadi aktor utama dalam jaringan, belum sepenuhnya berhasil menginskripsikan peran para aktor lain dalam satu logika kerja bersama. Ketika peran masing-masing belum disepakati, dan ketika logika hukum, teknis, dan informasi publik tidak terhubung dalam satu sistem interoperabilitas, maka jaringan pencegahan hoaks menjadi rapuh. Dalam konteks ini, momen problematisasi belum sepenuhnya tuntas karena negosiasi peran belum mencapai titik koheren. Tanpa penyelarasan mekanisme dan standar antar lembaga, maka strategi pencegahan hoaks cenderung reaktif dan terfragmentasi, tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan penyebaran disinformasi yang bersifat cepat dan masif (Lestari & Nugroho, 2023).

Secara keseluruhan, strategi Bawaslu menunjukkan pendekatan sistematis dan kolaboratif dalam membangun jaringan aktor pengawasan hoaks, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan kemampuan adaptasi semua simpul dalam jaringan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, percepatan alur koordinasi, dan penguatan edukasi publik sebagai bentuk penguatan berkelanjutan terhadap jaringan yang telah dibangun.

4.2.2 Proses Negosiasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Pada momen ini bekerja untuk meyakinkan para aktor lainnya bahwa isu yang sudah diangkat dan dijelaskan merupakan hal penting

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

untuk aktor-aktor lainnya, tujuan utama dari momen ini adalah untuk meyakinkan dan membangun kepetingan bersama dengan interaksi dan negosiasi. Aktor utama harus menemukan cara untuk menghubungkan kepentingan aktor-aktor lain dengan masalah yang diangkat, hal tersebut karena tidak semua aktor langsung menyetujui kepentingan yang ditawarkan oleh aktor utama (Callon, Michel. 1986), oleh karena itu, negosiasi adalah bagian krusial dari momen ini. Aktor kunci harus memberikan konsesi atau memperjelas bagaimana masalah yang diangkat benar-benar relevan bagi setiap aktor yang terlibat. Tahap awal yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan negosiasi dengan para aktor-aktor lainnya yaitu KPU, Kominfo.

Dalam proses negosiasi, penting bagi Bawaslu sebagai inisiator untuk mengedepankan sikap fleksibel serta terbuka terhadap berbagai pandangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat (Latour, 2005; Callon, 1986). Sikap ini menunjukkan bahwa Bawaslu memahami pentingnya mendengarkan serta mempertimbangkan masukan dari semua pihak untuk menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Pendekatan fleksibel seperti ini juga memungkinkan setiap peserta negosiasi merasa dihargai, sehingga mereka lebih mudah untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi terbaik. Fleksibilitas dan negosiasi juga berarti mampu menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan situasi (Latour, 2005; Callon, 1986)..

Negoisisasi tersebut bertujuan untuk menyatukan tujuan dan kesepakatan agar relasi aktor dapat bekerja secara maksimal. Langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu RI adalah forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang relevan (Callon, 1986; Latour, 2005). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait secara menyeluruh dan mendalam. Dengan cara ini, setiap pihak dapat memahami akar permasalahan sekaligus kontribusinya terhadap solusi yang akan dihasilkan. Forum tersebut dirancang untuk memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pandangan, pendapat, dan aspirasi mereka. Pendekatan inklusif ini membuka ruang bagi berbagai perspektif dan sudut pandang, sehingga diskusi dapat berlangsung lebih kaya dan dinamis. Dengan mendengar suara dari berbagai pihak, setiap gagasan yang muncul dapat dipertimbangkan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan tetapi juga kepentingan bersama. Kesepakatan ini akan menjadi fondasi kokoh untuk mengembangkan langkah-langkah kolaboratif dalam menangani hoaks secara sistematis. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan pengawasan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada **29 Agustus 2024**, Bawaslu bersama Centre for Digital Society (CfDS) UGM memfasilitasi “Serial Diskusi Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu” di Yogyakarta (Bawaslu RI, 2024). Forum ini mengundang pemangku kepentingan dari lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berdialog tentang peningkatan efektivitas kolaborasi pengawasan digital, serta pembentukan jalur komunikasi dan pertukaran informasi secara real-time

Gambar 19. Serial Diskusi Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu

CfDS UGM Bergabung dengan Koalisi Anti-Hoaks Bersama Bawaslu

Berita 29 Agustus 2024, 18.25 Oleh: fisipol 0



Sumber: Fisipol UGM

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pelibatan para aktor dalam jaringan pengawasan hoaks yang dibentuk oleh Bawaslu RI dilakukan dengan pendekatan distribusi peran dan tanggung jawab secara proporsional, yang memungkinkan setiap aktor memahami serta menyepakati kontribusi mereka dalam sistem kolaboratif ini. Dalam proses ini, Bawaslu bertindak sebagai koordinator yang memfasilitasi pembagian tugas berdasarkan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak. Misalnya, Bawaslu fokus pada pengawasan dan pelaporan konten yang berpotensi melanggar aturan pemilu, sementara Kementerian Kominfo berperan dalam aspek teknis, seperti menindaklanjuti permintaan pemblokiran atau takedown konten di platform digital. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo mengambil bagian dalam proses verifikasi fakta dan edukasi publik, sedangkan KPU memastikan tersedianya data resmi pemilu yang menjadi rujukan utama. Kesepakatan peran ini tidak hanya memperjelas batas kerja antar-aktor, tetapi juga memperkuat koordinasi dan sinergi di lapangan. Dengan adanya pembagian tugas yang disepakati secara kolektif, seluruh aktor dalam jaringan mampu bekerja lebih efektif dan terarah dalam mencegah serta menangani penyebaran hoaks selama proses pemilu (Bawaslu RI, 2024; Callon, 1986; Latour, 2005).

Distribusi peran dan penyepakatan tugas antar-aktor dalam jaringan pengawasan hoaks tampak jelas dalam kolaborasi antara Bawaslu RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahapan Pemilu 2024. Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama, Bawaslu bertugas mengawasi dan mendokumentasikan konten internet yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA (Bawaslu RI, 2024). Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Kominfo, yang berperan dalam menangani secara teknis dengan melakukan takedown atau pemblokiran konten melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020. Sementara itu, MAFINDO bertugas memverifikasi fakta

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan menyebarluaskan klarifikasi melalui kanal seperti Cekfakta.com. Salah satu bentuk nyata kontribusi MAFINDO adalah saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, di mana Koalisi Cek Fakta yang terdiri atas 131 media berhasil mengidentifikasi 56 hoaks dan menerbitkan 107 artikel klarifikasi, yang kemudian ditautkan ke laman resmi jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang valid (Mafindo, 2024). Di sisi lain, KPU berperan menyediakan data resmi pemilu yang menjadi rujukan utama dalam membantah hoaks dan disinformasi, termasuk data peserta, tahapan, dan hasil pemilu. Dengan pembagian tugas yang telah disepakati secara formal dan operasional ini, kerja sama antar-aktor menjadi lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan perlindungan informasi yang akurat bagi publik selama penyelenggaraan pemilu (KPU RI, 2024).

Pada bagian negosiasi ini Bawaslu, KPU dan Kominfo hal yang mereka lakukan pertama kali adalah pembagian tugas dengan berlandaskan hukum serta mandat institusional. Bawaslu sebagai pengawas yang memiliki fungsi untuk memastikan seluruh tahapan pemilu serta menindak pelanggaran. KPU sebagai pusat informasi data dan memastikan hasil pemilu dapat tersampaikan dengan akurat dan transparan. Kominfo, sebagai eksekutor di media sosial dalam melakukan pengawasan hoaks. Setelah proses pertama selesai, tahap berikutnya adalah menyusun kesepakatan formal yang terperinci. Kesepakatan ini akan menjadi panduan bagi setiap pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terkait pengawasan hoaks. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan fungsi dari setiap institusi. KPU harus bertanggung jawab dan fokus terhadap pengecekan informasi publik yang resmi untuk mencegah terjadinya hoaks di media sosial, dan memberikan klarifikasi yang cepat jika terdapat hoaks yang menasar ke masyarakat. Bagian lainnya adalah Bawaslu, mengawasi proses pemilu dan menganalisis potensi pelanggaran hukum dikarenakan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada relasi aktor ini bawaslu sebagai inisitor yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses pengawasan hoaks serta pemilihan umum. Terakhir adalah Kominfo dimana harus dapat mengatur media sosial untuk menangani penyebaran hoaks, dimana harus bergerak dengan sigap dan tanggap dalam menghapus hoaks di media sosial (eksekutor). Kominfo harus dapat melacak hoak menggunakan teknologi crawling yang mendeteksi dari kata per kata atau kalimat yang mencurigakan. Dengan adanya dokumen ini, semua pihak yang terlibat memiliki acuan yang jelas mengenai kontribusi mereka, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Salah satu aspek penting dalam kesepakatan ini adalah penyusunan prosedur pelaporan yang sistematis dan mudah diakses. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi tentang hoaks dapat dilaporkan dengan cepat dan akurat. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas, setiap pihak dapat lebih mudah mengambil langkah responsif dalam menangani penyebaran hoaks. Selain itu, sistem pelaporan yang baik juga harus memastikan perlindungan terhadap pelapor agar mereka merasa aman dan nyaman saat menyampaikan informasi (Bawaslu RI, 2024; KPU RI, 2024; Kominfo, 2020).

Bawaslu dapat menjadi fasilitator yang efektif dengan mengidentifikasi kepentingan utama setiap pihak, lalu membantu menemukan jalan tengah yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dengan cara ini, perbedaan yang ada dapat dijembatani, dan solusi yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan yang saling menguntungkan. Pendekatan semacam ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kerja sama dan hubungan baik antar pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, dengan memprioritaskan pencapaian titik temu yang menguntungkan semua pihak, Bawaslu dapat mendorong lahirnya kesepakatan yang lebih solid dan berkelanjutan. Ketika setiap pihak merasa bahwa kepentingan mereka telah dipertimbangkan dengan baik, komitmen terhadap implementasi kesepakatan pun akan meningkat.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks isu-isu kompleks seperti pengawasan hoaks, yang membutuhkan kerja sama dan sinergi yang erat antara berbagai pihak (Bawaslu RI, 2024). Mekanisme operasional kolaborasi harus dapat berjalan dengan efisien dimana hal tersebut dibagi menjadi dua bagian;

1. Deteksi dan pelaporan hoaks

Kominfo memantau ruang digital menggunakan mesin crawling ataupun dari laporan masyarakat. Data yang sudah divalidasi akan di berikan kepada KPU dan Bawaslu.

2. Penanganan dan klarifikasi

Pada bagian ini KPU harus dapat mengeluarkan klarifikasi yang cepat jika terdapat hoaks mengenai tahapan pemilu dan hasil pemilu. Bawaslu sebagai pengawas serta inisiator harus bergerak dengan cepat untuk melakukan investigasi terhadap hoaks ataupun pelanggaran hukum. Terakhir adalah Kominfo sebagai eksekutor harus melakukan penghapusan konten mengenai hoaks di media sosial agar pemilu tetap berjalan dengan damai.

Pada bagian negosiasi ini Bawaslu, KPU dan Kominfo hal yang mereka lakukan pertama kali adalah pembagian tugas dengan berlandaskan hukum serta mandal institusional. Bawaslu sebagai pengawas yang memiliki fungsi untu memastikan seluruh tahapan pemilu serta menindak pelanggaran. KPU sebagai pusat informasi data dan memastikan hasil pemilu dapat tersampaikan dengan akurat dan transparan. Kominfo, sebagai eksekutor di media sosial dalam melakukan pengawasan hoaks. Setelah proses pertama selesai, tahap berikutnya adalah menyusun kesepakatan formal yang terperinci. Kesepakatan ini akan menjadi panduan bagi setiap pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terkait pengawasan hoaks. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan fungsi dari setiap institusi. KPU harus bertanggung jawab dan fokus terhadap pengebarayan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

informasi publik yang resmi untuk mencegah terjadinya hoaks di media sosial, dan memberikan klarifikasi yang cepat jika terdapat hoaks yang menyasar ke masyarakat. Bagian lainnya adalah Bawaslu, mengawasi proses pemilu dan menganalisis potensi pelanggaran hukum dikarenakan pada relasi aktor ini Bawaslu sebagai inisitor yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses pengawasan hoaks serta pemilihan umum. Terakhir adalah Kominfo dimana harus dapat mengatur media sosial untuk menangani penyebaran hoaks, dimana harus bergerak dengan sigap dan tanggap dalam menghapus hoaks di media sosial (eksekutor). Kominfo harus dapat melacak hoak menggunakan teknologi crawling yang mendeteksi dari kata per kata atau kalimat yang mencurigakan. Dengan adanya dokumen ini, semua pihak yang terlibat memiliki acuan yang jelas mengenai kontribusi mereka, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Salah satu aspek penting dalam kesepakatan ini adalah penyusunan prosedur pelaporan yang sistematis dan mudah diakses. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi tentang hoaks dapat dilaporkan dengan cepat dan akurat. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas, setiap pihak dapat lebih mudah mengambil langkah responsif dalam menangani penyebaran hoaks. Selain itu, sistem pelaporan yang baik juga harus memastikan perlindungan terhadap pelapor agar mereka merasa aman dan nyaman saat menyampaikan informasi (Bawaslu RI, 2024).

Tidak kalah pentingnya, mekanisme komunikasi yang terstruktur harus menjadi bagian integral dari kesepakatan. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap pihak selalu mendapatkan informasi terkini dan relevan untuk mendukung pengawasan. Mekanisme ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih lancar, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan kolaborasi antar pihak. Di samping itu, pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan harus dirumuskan secara rinci. Setiap pihak perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kewajiban dan tugas yang harus dijalankan.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan transparan, pengawasan dapat dilakukan secara terarah dan efisien, serta meminimalkan potensi konflik di lapangan. Kesepakatan ini bukan hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadapi ancaman hoaks secara kolektif. Dengan adanya kesepakatan yang solid, semua pihak dapat bekerja dalam kerangka yang terorganisasi, efektif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan bersama untuk melawan penyebaran hoaks dapat tercapai dengan lebih optimal.

Dengan pendekatan yang inklusif ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator yang mampu memperkuat rasa kepercayaan antar pihak. Kepercayaan ini menjadi landasan penting untuk membangun kolaborasi yang lebih efektif di masa depan, baik dalam menangani hoaks maupun isu-isu lainnya. Dalam jangka panjang, sikap fleksibel dan berbasis kebutuhan bersama akan membantu menciptakan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab (Bawaslu RI, 2024).

Pada bagian lainnya, membangun jaringan kolaboratif dengan berbagai aktor merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap penyebaran hoaks. Jaringan ini mencakup pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas digital, yang masing-masing memiliki peran unik dalam menangani tantangan hoaks. Dengan melibatkan berbagai pihak, jaringan ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa upaya yang dilakukan bersifat menyeluruh, mencakup berbagai aspek yang relevan. Tujuan utama dari jaringan ini adalah menciptakan sebuah platform yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Dalam konteks pengawasan hoaks, kecepatan informasi sangat penting untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus yang muncul. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar aktor, informasi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terkait pola penyebaran, jenis hoaks, atau dampak yang ditimbulkan dapat segera dibagikan. Langkah ini membantu semua pihak untuk merumuskan tindakan yang terkoordinasi dalam menanggulangi hoaks secara efektif (Bawaslu RI, 2024).

Selain informasi, jaringan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk berbagi sumber daya yang diperlukan dalam pengawasan. Misalnya, komunitas digital dapat menyumbangkan keahlian mereka dalam memantau pergerakan informasi di media sosial, sementara pemerintah dapat menyediakan dukungan berupa regulasi atau kebijakan yang mendukung pengawasan. LSM, di sisi lain, dapat berkontribusi melalui advokasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Dengan berbagi sumber daya ini, setiap aktor dalam jaringan dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, sehingga tercipta upaya pengawasan yang lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, jaringan ini juga memberikan ruang untuk berbagi strategi inovatif dalam mengatasi hoaks.

Setiap pihak yang terlibat dapat menawarkan pendekatan-pendekatan baru yang didasarkan pada pengalaman mereka di lapangan. Misalnya, strategi berbasis teknologi seperti penggunaan alat kecerdasan buatan untuk mendeteksi hoaks dapat digabungkan dengan pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pertukaran ide seperti ini tidak hanya memperkaya upaya pengawasan, tetapi juga menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pola penyebaran hoaks yang semakin kompleks. Dengan membangun jaringan yang kuat, kolaborasi antara aktor-aktor ini dapat menghasilkan sinergi yang signifikan dalam menghadapi ancaman hoaks. Kerja sama yang terjalin baik, tidak hanya membantu menangani hoaks yang sudah ada, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih kokoh untuk mencegah penyebaran hoaks di masa depan. Lebih jauh, jaringan ini juga dapat menjadi contoh bagaimana pendekatan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kolaboratif mampu memberikan dampak nyata dalam menyelesaikan isu-isu sosial yang kompleks.

Bawaslu RI mengimplementasikan pendekatan **multi-stakeholder** untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan hoaks selama proses pemilu. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan menangani penyebaran informasi, khususnya di media sosial. Hoaks sering kali tersebar dengan cepat dan luas di platform digital, sehingga diperlukan kolaborasi antara aktor-aktor yang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang ini. Dengan adanya kerjasama antara berbagai pihak, Bawaslu berharap dapat mengidentifikasi dan menangani hoaks secara lebih efisien, serta menjaga agar penyebaran informasi yang menyesatkan tidak merusak proses pemilu yang berlangsung.

Dalam strategi multi-stakeholder ini, sejumlah pihak seperti **Bawaslu, Kominfo, MAFINDO, KPU**, dan platform media sosial berperan aktif. Kominfo, dengan kewenangannya dalam regulasi dan pengawasan media sosial, bekerja sama dengan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mengatasi penyebaran hoaks yang beredar di dunia maya. Kominfo juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memonitor tren dan pola penyebaran informasi yang salah, mengambil tindakan pencegahan agar hoaks tidak meluas. Di sisi lain, **MAFINDO** berfokus pada verifikasi informasi dan identifikasi hoaks, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami dan melawan hoaks. Kolaborasi yang kuat antara MAFINDO dan Bawaslu sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif hoaks terhadap pemilu (Bawaslu RI, 2024; Kominfo, 2023; MAFINDO, 2023).

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki peran dalam strategi ini, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang beredar terkait pemilu adalah akurat dan transparan. Kerjasama antara Bawaslu dan KPU sangat vital untuk menjaga agar informasi yang

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

disampaikan kepada publik tidak terganggu oleh hoaks atau informasi yang menyesatkan. Selain itu, media sosial memegang peran kunci dalam pengawasan hoaks, karena platform-platform ini menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk memperoleh dan membagikan informasi. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk menjalin kemitraan dengan platform media sosial dan aktor lainnya agar pengawasan dan pencegahan hoaks berjalan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi (Bawaslu RI, 2024). Hal tersebut di buktikan dengan adanya deklarasi pemilihan damai 2024

Gambar 20. Deklarasi Pemilu Damai 2024 Anti Hoaks



Sumber: Bawaslu

Strategi ini tidak hanya melibatkan pemantauan dan penghapusan konten hoaks, tetapi juga mengedepankan **pendidikan publik**. Salah satu tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan **literasi media** di kalangan masyarakat, yang menjadi kunci untuk mengurangi dampak hoaks. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengidentifikasi informasi yang salah dan bagaimana cara memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima. Dalam hal ini, Bawaslu dan mitra-mitranya berperan penting dalam menyelenggarakan kampanye edukasi yang menjangkau berbagai kalangan,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melalui berbagai media, baik online maupun offline (Bawaslu RI, 2024; MAFINDO, 2023).

Selain itu, Bawaslu dan pihak-pihak terkait dapat memanfaatkan **analitik data** untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pola penyebaran hoaks dengan lebih cepat. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan alat analisis canggih, mereka bisa melacak asal-usul hoaks dan bagaimana informasi tersebut menyebar. Hal ini memungkinkan mereka untuk segera mengatasi penyebaran hoaks dan memberikan klarifikasi kepada publik. Langkah-langkah ini dapat meliputi penurunan konten yang salah atau pengiriman peringatan kepada pihak berwenang apabila diperlukan (Kominfo, 2023; Bawaslu RI, 2024).

Melalui pendekatan multi-stakeholder ini, Bawaslu berupaya menciptakan pemilu yang lebih transparan dan adil. Kolaborasi antara berbagai pihak akan membantu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta mengurangi pengaruh hoaks yang dapat merusak jalannya demokrasi. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pengawasan terhadap hoaks akan lebih terstruktur, efektif, dan dapat mencegah penyebaran informasi yang dapat merusak integritas pemilu.

Dalam konteks pemilu sebagai arena kontestasi politik yang sarat kepentingan, proses negosiasi antar-aktor seperti Bawaslu, KPU, dan Kominfo menjadi medan tarik-ulur kepentingan kelembagaan. Secara teoritik, fase *interesement* dalam ANT seharusnya menjadi ruang di mana aktor utama (Bawaslu) berhasil menyatukan narasi, peran, dan kepentingan dari aktor-aktor lain. Namun dalam praktiknya, negosiasi multi-aktor yang terjadi di antara ketiga lembaga tersebut cenderung bersifat prosedural dan simbolik, bukan substantif dan fungsional.

Misalnya, meskipun Bawaslu telah membentuk *Gugus Tugas Pengawasan Pemilu di Ruang Digital*, namun keputusan bersama terkait penanganan hoaks justru kerap terhambat oleh ego sektoral. Kominfo memiliki kemampuan teknologi deteksi berbasis AI, namun kewenangan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

eksekusinya dibatasi oleh penilaian hukum dari Bawaslu dan klarifikasi faktual dari KPU. Akibatnya, meskipun lebih dari 130 konten bermasalah terdeteksi oleh Kominfo dalam minggu terakhir masa kampanye (Kominfo, 2024), hanya sebagian kecil yang dapat ditindak secara cepat karena harus melewati rantai birokrasi antar lembaga. Proses ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya kekurangan interoperabilitas teknis, tapi juga minim kepercayaan institusional.

Kritiknya terletak pada fakta bahwa tidak ada *lead agency* yang mampu menjadi otoritas pengambil keputusan cepat dalam isu hoaks digital. Bawaslu sebagai aktor inisiator justru kerap kehilangan inisiatif saat masuk pada fase negosiasi lintas lembaga. Padahal, tantangan informasi digital bergerak secara real-time—sementara respons institusional berjalan dalam hitungan hari. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa kerja sama multi-aktor di Indonesia masih terjebak pada pendekatan koordinasi vertikal, bukan kolaborasi horizontal yang fleksibel dan responsif.

Data dari *Election Integrity Partnership Indonesia* (2024) memperkuat hal ini, dengan mencatat bahwa 68% hoaks yang muncul selama masa tenang dan rekapitulasi suara mencapai puncak sebaran dalam waktu kurang dari 12 jam. Ini berarti, keterlambatan respons bukan hanya masalah teknis, melainkan kegagalan dalam menyepakati model tindakan cepat bersama. Melihat secara mendalam bahwa forum koordinasi yang dibentuk cenderung bersifat “seremonial”, tanpa kekuatan eksekutif yang nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa negosiasi antar aktor lebih banyak menghasilkan kompromi simbolik daripada konsensus strategis. Dengan kata lain, dalam fase *interessement*, jaringan kerja antar aktor belum sepenuhnya mampu mengikat komitmen kolektif dalam menghadapi dinamika hoaks yang bergerak secara masif dan disruptif. Relasi antar institusi masih didasarkan pada kalkulasi kewenangan, bukan pada pembagian risiko dan tanggung jawab bersama.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hal ini tentu menjadi kritik serius terhadap model tata kelola digital pemilu yang diklaim inklusif dan kolaboratif.

4.2.3 Momen Pelibatan Multi Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Bawaslu RI akan membagikan serangkaian peran dan tugas secara merata. Pada momen ini akan terjadi bentuk dukungan dan resistensi dimana akan menciptakan sebuah kolaborasi pada sebuah jaringan yang sedang terbentuk. Momen pelibatan terjadi ketika aktor-aktor yang telah diidentifikasi dalam proses problematisasi mulai dibawa untuk berpartisipasi dan mengambil peran-peran tertentu dalam jaringan. Pelibatan ini melibatkan distribusi peran dan tugas secara merata di antara para aktor, dimana mereka mulai "menyepakati" bagaimana peran mereka di dalam jaringan tersebut. Namun, pelibatan bukanlah proses yang sederhana (Callon, Michel. 1986).

Pada proses dinamika relasi aktor Bawaslu RI melakukan pemetaan pemangku kepentingan, dimana hal ini untuk mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam pencegahan penyebaran hoaks. Bawaslu melakukan pemetaan yang mendalam untuk mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai siapa saja pihak yang memiliki peran dalam tahapan pemilu. Pemetaan ini mencakup berbagai organisasi, lembaga, maupun individu yang terlibat langsung atau tidak langsung, seperti KPU, Kominfo, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pemilu (Bawaslu RI. 2024). Melalui proses ini, Bawaslu dapat mengetahui lebih jauh tentang kepentingan masing-masing pihak yang terlibat, serta potensi dampak yang ditimbulkan oleh interaksi mereka dalam konteks pemilu. Proses pemetaan yang dilakukan juga menjadi landasan bagi Bawaslu untuk merencanakan langkah-langkah pengawasan yang lebih terfokus, berbasis bukti dan analisis yang mendalam. Dengan begitu, Bawaslu dapat mengoptimalkan tugasnya dalam menjaga keberlangsungan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Pemetaan ini, pada akhirnya, bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berjalan dengan penuh integritas, mengurangi risiko penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan, serta menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat (Bawaslu RI, 2024).

Proses pemetaan yang dilakukan juga menjadi landasan bagi Bawaslu untuk merencanakan langkah-langkah pengawasan yang lebih terfokus, berbasis bukti dan analisis yang mendalam. Dengan begitu, Bawaslu dapat mengoptimalkan tugasnya dalam menjaga keberlangsungan pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Pemetaan ini, pada akhirnya, bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berjalan dengan penuh integritas, mengurangi risiko penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan, serta menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemetaan tersebut antara lain:

1. Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu

Bawaslu memiliki peran sebagai pengawas pemilu yang lebih fokus pada **penegakan hukum dan pengawasan proses pemilu** secara keseluruhan, termasuk pengawasan terhadap penyebaran hoaks yang bisa mempengaruhi pemilih dan hasil pemilu. Dalam pengawasan hoaks, peran Bawaslu meliputi: **Pengawasan pelanggaran hukum** yang terkait dengan penyebaran hoaks, terutama jika hoaks tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Pemilu atau UU ITE. **Penegakan hukum** terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan hoaks yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu atau merusak integritas proses pemilu. **Bekerja sama dengan KPU** untuk mengidentifikasi potensi hoaks yang beredar terkait dengan calon, hasil pemilu, atau kebijakan pemilu yang dapat merusak proses demokrasi (Bawaslu RI, 2024).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. KPU sebagai Pemangku Kepentingan Utama dalam Pemilu Sebagai Penyelenggara Pemilu

KPU memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keberlanjutan dan integritas pemilu. Dalam hal pengawasan hoaks, **peran KPU** lebih fokus pada **Menyebarkan informasi resmi dan akurat** terkait dengan proses pemilu, hasil pemilu, dan kebijakan pemilu kepada masyarakat. **Memonitor potensi hoaks** yang dapat merusak persepsi publik terhadap integritas pemilu dan mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi atau membantah informasi palsu yang menyebar. **Menyusun regulasi dan prosedur** yang menjamin agar proses pemilu tetap bersih dari hoaks dan disinformasi. **Koordinasi dengan lembaga lain**, terutama dalam konteks penyebaran informasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu (KPU RI, 2024; Wahyuni, 2023).

3. Kominfo sebagai Pengawas Ruang Digital

Kominfo memiliki peran penting dalam mengatur dan memantau ruang digital, terutama untuk mengawasi dan menangani penyebaran hoaks di platform digital. Peran Kominfo dalam pengawasan hoaks meliputi **Menerapkan kebijakan dan regulasi** terkait dengan pengendalian informasi di ruang digital, termasuk pembatasan atau pemblokiran konten yang dianggap hoaks atau merugikan integritas pemilu (Kominfo, 2023). **Menggunakan teknologi pemantauan dan deteksi hoaks** di platform media sosial dan situs web untuk mengidentifikasi informasi yang menyesatkan atau merugikan. **Koordinasi dengan platform digital** untuk menghapus konten hoaks atau memberikan peringatan terkait penyebaran informasi yang salah, serta mendukung Bawaslu dan KPU dalam melakukan klarifikasi (Kominfo, 2024).

Tujuan utama dari pemetaan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang siapa saja yang memengaruhi jalannya pemilu,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

serta untuk mengidentifikasi berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan atau mendukung satu sama lain. Dengan informasi ini, Bawaslu dapat lebih efektif dalam merancang strategi pengawasan, meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, pemetaan ini memungkinkan Bawaslu untuk menilai potensi risiko yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemilu, baik yang berkaitan dengan manipulasi data, penyebaran informasi yang tidak akurat, atau intervensi pihak luar yang dapat merusak integritas pemilu.

Setelah melakukan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilu, langkah selanjutnya yang diambil oleh Bawaslu adalah melakukan analisis mendalam terhadap peran dan pengaruh masing-masing aktor tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana setiap aktor berkontribusi atau memengaruhi jalannya pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap karakteristik setiap aktor, mulai dari kekuatan dan kelemahan mereka hingga potensi kontribusi yang dapat mereka berikan dalam konteks pengawasan pemilu. Dalam analisis ini, Bawaslu berusaha melihat lebih jauh bukan hanya sekadar peran formal, tetapi juga dinamika sosial, politik, dan teknis yang mungkin terjadi di lapangan.

Salah satu aspek penting yang dianalisis adalah **kekuatan** yang dimiliki oleh setiap aktor. Kekuatan ini bisa berupa wewenang, sumber daya, jaringan, atau kapasitas teknis yang mereka miliki untuk mempengaruhi jalannya pemilu. Misalnya, **KPU** sebagai penyelenggara utama pemilu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi tahapan pemilu, sementara **Kominfo** memiliki kekuatan dalam hal pengawasan media dan distribusi informasi, yang sangat berpengaruh terhadap transparansi dan keadilan pemilu. Dengan memahami kekuatan ini, Bawaslu dapat menentukan aktor mana yang dapat diandalkan untuk mendukung proses pengawasan dan mana yang mungkin memiliki

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

agenda atau kepentingan yang dapat merusak integritas pemilu (Bawaslu RI, 2024; Kominfo, 2023; KPU, 2024).

Namun, analisis juga harus memperhatikan **kelemahan** masing-masing aktor, karena setiap aktor, meskipun memiliki kekuatan, juga memiliki batasan dan tantangan tertentu. Kelemahan ini bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kemampuan teknis, atau bahkan konflik kepentingan yang mungkin muncul antara aktor yang berbeda. Sebagai contoh, meskipun Mafindo memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi hoaks, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam hal sumber daya yang terbatas atau kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mengakses informasi yang relevan. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan ini, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi potensi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan pemilu.

Adapun mengatasi agar tidak adanya resistensi Bawaslu RI secara strategis mengadopsi pendekatan kolaboratif dan adaptif untuk memastikan keberlangsungan relasi antar-aktor dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam penanganan hoaks. Bawaslu menyadari bahwa tidak semua aktor langsung menunjukkan dukungan terhadap peran dan pembagian tugas yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bawaslu membangun proses negosiasi secara partisipatif melalui forum diskusi, pertemuan koordinasi, serta penandatanganan nota kesepahaman bersama lembaga-lembaga kunci seperti Kominfo, KPU, dan organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO dan Perludem. Dalam forum tersebut, Bawaslu memberikan ruang bagi setiap aktor untuk menyampaikan masukan, menyusun ulang strategi kolaborasi, dan menyepakati peran sesuai kapasitas serta kepentingan masing-masing (Koalisi Masyarakat Sipil, 2023).

Ketika menghadapi resistensi, misalnya dari platform digital yang semula enggan membuka data atau menindak konten secara cepat, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk menjembatani komunikasi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

serta menetapkan jalur pelaporan langsung melalui sistem *Trusted Flaggers*. Melalui mekanisme ini, Bawaslu tidak hanya menyederhanakan proses penanganan konten bermasalah tetapi juga menyesuaikan peran dan ekspektasi antar-aktor. Proses negosiasi ini menunjukkan bagaimana Bawaslu menanggapi dinamika jaringan dengan cara mendorong penyesuaian peran secara fleksibel dan konstruktif—tidak bersifat memaksakan, tetapi mendorong keterlibatan melalui pemahaman bersama akan tujuan kolektif: menjaga integritas pemilu dari ancaman hoaks (Koalisi Masyarakat Sipil, 2023). Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya menjaga kelangsungan jaringan, tetapi juga memperkuatnya melalui pendekatan yang dinamis dan adaptif terhadap realitas resistensi dan dukungan yang terjadi di lapangan (Koalisi Masyarakat Sipil, 2023).

Selain itu, Bawaslu juga perlu menganalisis **potensi kontribusi** dari setiap aktor dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu serta mencegah adanya resistensi antar lembaga. Potensi kontribusi ini bisa berupa peran aktif dalam penyebaran informasi yang benar, pemantauan pelaksanaan pemilu, atau upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu, seperti penyebaran hoaks dan politik uang. Misalnya, **Kominfo** dapat memainkan peran penting dalam mengelola komunikasi publik dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses pemilu, sementara **MAFINDO** dapat bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengidentifikasi dan menanggulangi hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, dan potensi kontribusi masing-masing aktor, Bawaslu dapat merumuskan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran. Analisis ini juga memungkinkan Bawaslu untuk merancang pendekatan yang lebih terkoordinasi, sehingga kolaborasi antara berbagai aktor dapat berjalan dengan lebih efisien dan harmonis. Dengan begitu, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih efektif, menjaga integritas pemilu, serta

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Setelah melakukan pemetaan dan analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilu, langkah selanjutnya yang sangat penting bagi Bawaslu adalah menetapkan saluran komunikasi yang terbuka antara Bawaslu dan berbagai aktor terkait hal ini bertujuan agar tidak terjadi *overlapping* antar lembaga. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan terhadap penyebaran hoaks di media sosial (Bawaslu RI, 2024; Kominfo, 2023; Mafindo, 2024).

Dalam upaya memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, Bawaslu merujuk pada berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan, guna menjaga kelancaran tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Salah satu dasar hukum yang digunakan Bawaslu, KPU, dan Kominfo agar tidak terjadinya *overlapping* dan mengamankan setiap peran yaitu: **Bawaslu RI** beroperasi berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang mengatur bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk konten digital yang berpotensi melanggar. Melalui pasal-pasal seperti Pasal 93 dan 95, Bawaslu diberi kewenangan menerima laporan, menindak pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait (Hukumonline, 2023). Di sisi lain, **KPU** sebagai penyelenggara pemilu juga mengacu pada UU yang sama. KPU memiliki kewajiban memberikan informasi akurat kepada publik, menjamin transparansi tahapan pemilu, serta mengurangi ruang gerak penyebaran hoaks dengan menyediakan data resmi terkait peserta, tahapan, dan hasil pemilu (Pasal 14 dan 22 UU No. 7/2017) (JDiH BPK, 2017).

Sementara itu, **Kominfo** memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani informasi digital melalui **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** yang

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

diperbarui dengan **UU No. 19 Tahun 2016**. Dalam Pasal 40 UU ITE, Kominfo diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk hoaks. Selain itu, **Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020** juga memperkuat posisi Kominfo dalam menekan penyebaran konten berbahaya di platform digital dengan memberikan batas waktu kepada platform untuk menurunkan konten ilegal. Kominfo juga menjalankan mandat dari **Inpres No. 3 Tahun 2017** untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu menghadapi arus disinformasi (Kominfo, 2021).

Adapun **MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)**, meskipun bukan lembaga negara, memiliki legitimasi hukum sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Mafindo, 2019). Peran MAFINDO dalam jaringan pengawasan hoaks diperkuat melalui kerja sama formal dengan Bawaslu dan Kominfo, salah satunya dalam bentuk nota kesepahaman serta keterlibatan aktif dalam koalisi **CekFakta.com** bersama AJI dan AMSI. Kegiatan MAFINDO berfokus pada verifikasi fakta, edukasi literasi digital, dan pelatihan publik untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap informasi palsu, sejalan dengan fungsi pencegahan yang diatur dalam regulasi pemerintah. Melalui landasan hukum dan kolaborasi ini, keempat aktor tersebut membentuk sistem pengawasan informasi yang terintegrasi dan saling menguatkan (Mafindo, 2019).

Bawaslu juga mengutamakan kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo untuk cek fakta dan meningkatkan literasi media. Kampanye edukasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, sehingga bisa mengurangi penyebaran hoaks. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi bagian integral dari upaya Bawaslu dalam menangani hoaks. Jika ada pihak yang terbukti melanggar, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif atau

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk langkah lebih lanjut.

Secara keseluruhan, melalui pemanfaatan peraturan perundang-undangan yang jelas dan terstruktur, Bawaslu dapat memastikan bahwa kewenangannya dalam mengawasi hoaks di media sosial tidak saling tumpang tindih dengan lembaga lain. Kolaborasi antara Bawaslu, Kominfo, dan KPU menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bebas dari disinformasi dan hoaks, dengan memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang ada (Kominfo, 2023). Saluran komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat mengalir dengan lancar antara Bawaslu dan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengawasan pemilu, seperti KPU, MAFINDO, Kominfo, dan organisasi lainnya. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap masalah atau potensi konflik yang muncul dalam pelaksanaan tugas pengawasan dapat segera dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. Saluran komunikasi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi atau informasi yang terdistorsi, yang dapat mengarah pada kesalahan keputusan yang merugikan.

Saluran komunikasi yang terbuka juga berfungsi sebagai alat untuk membangun **transparansi** dalam pelaksanaan peran masing-masing aktor. Dalam konteks pemilu, transparansi merupakan hal yang sangat vital, terutama untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses pengawasan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu, karena masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas atau pihak terkait lainnya sudah didiskusikan dan disepakati bersama, serta dilakukan dengan dasar yang kuat dan transparan. Ketika Bawaslu dan aktor lainnya dapat berbicara secara terbuka, maka potensi kesalahan atau ketidakjelasan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalkan. (Kusuma, Dwihantoro, & Rizal, 2024).

Selain itu, saluran komunikasi yang terbuka juga sangat penting untuk mengatasi **overlapping** atau tumpang tindih dalam kewenangan dan tanggung jawab antara berbagai aktor yang terlibat. Dalam pengawasan pemilu, bisa saja terjadi situasi di mana tugas dan kewenangan masing-masing aktor saling bersinggungan, yang dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik. Misalnya, baik Bawaslu maupun Kominfo mungkin memiliki tanggung jawab untuk memantau penyebaran informasi hoaks, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab. Melalui komunikasi yang jelas dan terbuka, aktor-aktor tersebut dapat mendiskusikan dan merumuskan mekanisme kerja yang memastikan bahwa setiap pihak tahu batasan peran mereka, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas (Rizki & Suharto, 2023).

Selain itu, komunikasi yang terbuka juga membantu membangun kesepahaman dan rasa saling menghormati antar pihak. Ketika setiap aktor merasa didengar dan dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama secara lebih efektif. Hal ini tentu saja memperkuat koordinasi antar lembaga yang berbeda, meminimalkan gesekan, dan memastikan bahwa pengawasan pemilu berjalan dengan harmonis dan efisien. Dengan demikian, saluran komunikasi yang terbuka bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang positif dan produktif antara semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa saluran komunikasi antara Bawaslu dan aktor lainnya berjalan dengan lancar dan efektif, Bawaslu dapat mengelola dan mengatasi berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu dengan lebih baik. Transparansi, kejelasan peran, dan kolaborasi yang terjalin dengan baik akan memperkuat kualitas pengawasan dan mendukung terciptanya pemilu

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang bebas, adil, dan demokratis (Bawaslu RI, 2022; KPU RI, 2023; Mafindo,2024)

Untuk menciptakan jaringan yang dinamis dan fleksibel Bawaslu RI membuat langkah untuk menyusun dan mendistribusikan dokumentasi kebijakan yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam pengawasan pemilu adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pengawasan tersebut. Dokumentasi ini harus dirancang dengan jelas, memuat penjelasan yang terperinci mengenai fungsi, tugas, serta batasan kewenangan setiap pihak yang terlibat, seperti Bawaslu, KPU, MAFINDO, Kominfo, dan pihak lainnya. Dengan adanya dokumen kebijakan yang jelas, setiap aktor yang terlibat akan memiliki panduan yang mengarah pada pemahaman yang seragam mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini penting agar tidak ada kebingungannya tentang siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan atau masalah yang mungkin muncul selama proses pemilu berlangsung (Bawaslu RI, 2022; KPU RI, 2023; Mafindo,2024).

Salah satu manfaat utama dari dokumentasi kebijakan ini adalah untuk menghindari terjadinya **tumpang tindih kewenangan** antara aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengawasan. Tanpa adanya pedoman yang jelas, kemungkinan besar akan muncul kebingungan tentang siapa yang seharusnya menangani masalah tertentu. Sebagai contoh, bisa saja terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa yang harus mengawasi penyebaran informasi di platform media sosial, apakah itu tanggung jawab Kominfo, MAFINDO, atau Bawaslu. Dengan adanya dokumentasi yang menyatakan dengan tegas siapa yang bertanggung jawab atas apa, setiap aktor dapat berfokus pada tugas mereka tanpa saling mengganggu atau berlebihan dalam mengambil langkah-langkah yang bukan menjadi kewenangannya (Bawaslu RI, 2022; Kominfo, 2023; Mafindo, 2024).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selain itu, dokumentasi kebijakan ini juga berfungsi sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengawasan. Ketika muncul situasi yang memerlukan keputusan tentang kewenangan atau tindakan yang tepat, setiap aktor dapat merujuk pada kebijakan yang sudah disepakati bersama, yang akan memberikan dasar yang jelas untuk menentukan langkah yang harus diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih terstruktur, koheren, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menghindari keputusan yang bersifat ad hoc atau tidak konsisten yang bisa membingungkan atau menghambat jalannya pengawasan (KPU, 2023).

Pendistribusian kebijakan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Setiap aktor harus diberikan salinan dokumen kebijakan ini dan diberi kesempatan untuk memahami secara mendalam isi serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap tugas mereka. Selain itu, penting bagi Bawaslu untuk melakukan **sosialisasi dan pelatihan** terkait kebijakan ini secara berkala, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan mendalam tentang peran serta tanggung jawab masing-masing. Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap aktor dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam penerapan kebijakan (Bawaslu RI, 2022).

Keberadaan dokumen kebijakan yang jelas ini juga memfasilitasi terciptanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai aktor yang terlibat. Ketika setiap aktor mengetahui dengan pasti peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka, mereka akan dapat bekerja sama dengan lebih efisien dan harmonis. Tanpa dokumentasi yang tepat, bisa saja timbul ketegangan atau kesalahpahaman yang justru menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, dokumentasi kebijakan bukan hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keteraturan dan kesinambungan dalam proses pengawasan pemilu. Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing, pengawasan pemilu dapat berjalan dengan lebih terorganisir, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri (KPU, 2023; Mafindo, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa saluran komunikasi yang terbuka tidak hanya menguntungkan bagi setiap aktor yang terlibat. Dengan adanya forum atau ruang komunikasi yang terstruktur, setiap aktor bisa menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, memberi masukan, serta mencari solusi bersama terhadap masalah-masalah yang timbul. Misalnya, jika Kominfo mengalami kesulitan dalam mengakses data media yang relevan untuk memeriksa penyebaran informasi hoaks, mereka dapat berdiskusi dengan Bawaslu atau MAFINDO untuk mencari jalan keluar yang lebih efektif. Dengan adanya interaksi yang terus-menerus, potensi masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi dengan cara yang konstruktif dan kolaboratif (Kominfo, 2023; Bawaslu RI, 2022).

Untuk menata pengawasan pemilu di era informasi digital, Bawaslu RI membangun jaringan multi-aktor yang melibatkan KPU, Kominfo, MAFINDO, platform media sosial, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Melalui pemetaan pemangku kepentingan, Bawaslu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi kontribusi tiap aktor, lalu mendistribusikan peran dan tanggung jawab secara jelas—dituangkan dalam nota kesepahaman, surat edaran, dan panduan teknis (Bawaslu RI, 2022). Landasan hukum yang kuat (UU Pemilu 2017, UU ITE 2008/2016, Permen Kominfo 5/2020, Inpres Literasi Digital 2017) memastikan tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan: Bawaslu mengawasi dan merekomendasikan, Kominfo mengeksekusi tindakan teknis, KPU menyediakan data resmi, sedangkan MAFINDO memverifikasi dan mendidik publik. Untuk mengelola dukungan dan resistensi—sebagaimana dijelaskan Callon—Bawaslu menerapkan negosiasi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

partisipatif melalui forum diskusi dan jalur komunikasi terbuka, termasuk mekanisme *trusted flagger* dengan platform digital (Kominfo, 2023; KPU, 2023; Mafindo, 2024). Dokumentasi kebijakan yang komprehensif kemudian disosialisasikan ke seluruh tingkatan pengawasan, sehingga setiap aktor memahami batasan tugasnya, menghindari kebingungan, dan dapat berkolaborasi secara harmonis. Dengan pendekatan adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi literasi publik, Bawaslu menargetkan terciptanya ekosistem pemilu yang bersih dari hoaks, transparan, serta dipercaya masyarakat (Bawaslu RI, 2022; Mafindo, 2024).

Momen pelibatan (*enrolment*) menjadi tahapan krusial dalam membentuk keterlibatan aktif para aktor dalam jaringan kerja pencegahan hoaks digital. Namun dalam konteks Pemilu 2024, pelibatan multi aktor justru memperlihatkan adanya jurang partisipasi antara institusi negara dan masyarakat sipil, serta keterlambatan dalam pengorganisasian sumber daya bersama. Meskipun Bawaslu RI secara formal telah menggandeng sejumlah aktor non-negara, seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan platform digital seperti Meta serta Google melalui forum-forum koordinasi dan deklarasi pemilu damai digital, keterlibatan tersebut lebih banyak bersifat simbolis ketimbang operasional.

Salah satu tantangan utama dalam pelibatan ini adalah **ketimpangan kapasitas dan akses terhadap data dan sistem deteksi hoaks**. Kominfo melalui AIS (Automatic Identification System) memantau lebih dari 790.000 konten sejak Januari 2023 hingga Februari 2024 (Kominfo, 2024). Namun data tersebut tidak seluruhnya dapat diakses atau digunakan oleh aktor masyarakat sipil yang bergerak dalam pendeteksian awal hoaks. MAFINDO, misalnya, hanya dapat mengandalkan verifikasi berbasis crowdsourcing dan tim cek fakta internal dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan akses ini membuat pelibatan aktor non-negara tidak setara dan cenderung bersifat pasif, padahal kehadiran mereka

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penting dalam menjangkau komunitas akar rumput dan mempercepat diseminasi klarifikasi.

Selain itu, dalam beberapa studi lapangan ditemukan bahwa pelibatan multi aktor masih mengalami **fragmentasi koordinasi dan kurangnya insentif partisipatif**. Dalam laporan CIPG (Center for Innovation Policy and Governance, 2024), disebutkan bahwa hanya 4 dari 10 organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan dalam agenda anti-hoaks oleh pemerintah merasa kontribusinya diakomodasi dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, platform digital seperti TikTok dan YouTube yang ikut dilibatkan dalam deklarasi anti-hoaks sering kali bersikap reaktif dan hanya melakukan moderasi konten atas tekanan opini publik, bukan berdasarkan mekanisme koordinasi yang telah disepakati.

Tantangan lainnya adalah **minimnya pelibatan komunitas lokal dan pemuda digital**. Padahal, data dari Komnas HAM dan KPU (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 52% pengguna media sosial dalam pemilu adalah pemilih muda usia 17–35 tahun. Namun, inisiatif literasi digital yang melibatkan mereka secara langsung masih bersifat terbatas dan sporadis. Keterlibatan generasi digital ini semestinya tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga strategis, misalnya dalam sistem pelaporan hoaks berbasis komunitas dan pemantauan narasi di tingkat lokal. Dengan demikian, momen pelibatan aktor dalam jaringan anti-hoaks pemilu masih diwarnai pola komunikasi satu arah dan dominasi institusi negara, yang menghambat terciptanya ekosistem partisipatif yang sejajar dan berdaya. Idealnya, pelibatan bukan sekadar menghadirkan aktor ke dalam forum, melainkan membagi peran secara fungsional dan memperkuat interdependensi aktor dalam menghadapi kompleksitas hoaks digital.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

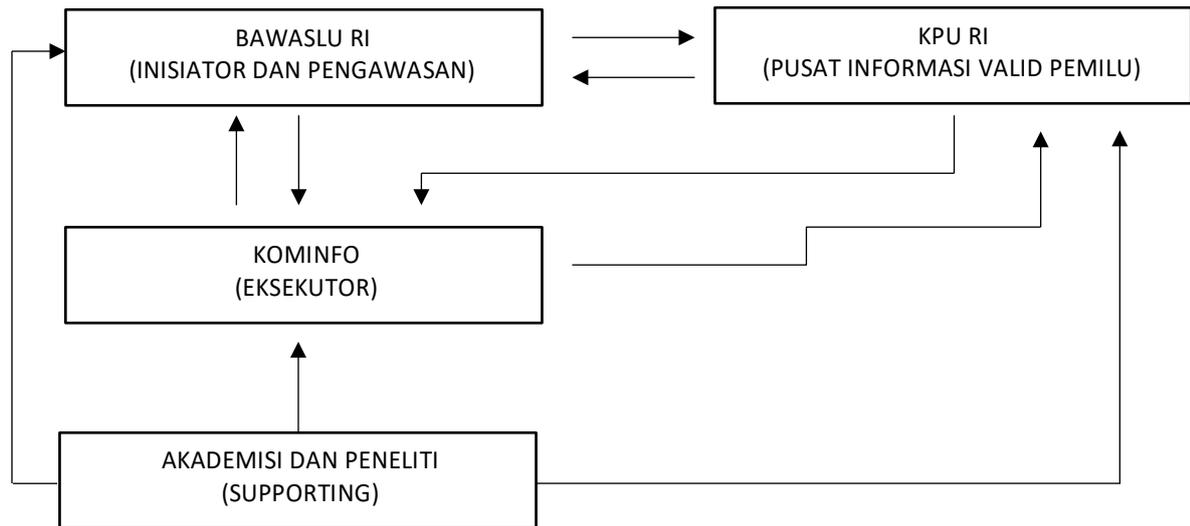
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4.2.4 Momen Mobilisasi Multi Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Tahap akhir ini terjadi ketika jaringan aktor sudah terbentuk secara jelas dan stabil, baik dalam hal waktu maupun ruang. Aktor-aktor dan mediator dalam jaringan mencapai kesepahaman dan koordinasi yang cukup stabil. Pada tahap ini, jaringan telah mencapai kestabilan dalam hal komposisi aktor dan distribusi peran. Kestabilan tersebut dicapai melalui negosiasi yang telah berlangsung di tahap-tahap sebelumnya, seperti problematisasi, penarikan, dan pelibatan. Setiap aktor dalam jaringan memahami perannya dan fungsinya secara jelas. Mobilisasi juga ditandai dengan adanya representasi kolektif dari aktor-aktor yang terlibat. Dalam proses mobilisasi, seringkali ada aktor atau kelompok yang mengambil peran untuk berbicara atas nama jaringan atau kelompok lain (Callon, Michel. 1986)

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memainkan peran penting sebagai inisiator dan pengawas utama dalam memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan hoaks dilaksanakan dengan baik. KPU bertanggung jawab menyediakan data dan informasi resmi yang akurat untuk menangkal disinformasi. Kominfo, dengan kapasitasnya di bidang teknologi informasi, bertugas sebagai eksekutor dalam menangani konten hoaks yang tersebar di platform digital. Di sisi lain, akademisi turut memberikan dukungan berbasis riset dan teknologi untuk memperkuat strategi pencegahan. Melalui bagan berikut, kita akan melihat secara rinci bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terjalin dalam suatu sinergi yang bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang sehat demi keberhasilan pemilu yang jujur dan adil



1. Bawaslu (Pemrakarsa dan Pengawas):

Sebagai pengawas utama dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berperan besar dalam memimpin serta mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk mencegah hoaks yang berkaitan dengan proses pemilu (Bawaslu RI, 2023). Tugas inti mereka mencakup:

- **Mendeteksi Potensi Hoaks:** Mengidentifikasi isu-isu sensitif yang berisiko menjadi hoaks terkait pemilu.
- **Menyusun Kebijakan:** Merancang aturan atau pedoman untuk mengatasi penyebaran hoaks pemilu.
- **Mengawasi Pelaksanaan:** Memastikan seluruh pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan

2. KPU (Sumber Data dan Informasi Pemilu):

Sebagai otoritas resmi dalam menyediakan data pemilu, KPU memastikan keakuratan informasi untuk mencegah penyebaran disinformasi (KPU RI, 2023). Perannya mencakup:

- **Penyediaan Data Resmi:** Menghadirkan data hasil pemilu, daftar pemilih, serta informasi lain yang rentan dimanipulasi.

- **Mengedukasi Publik:** Menyampaikan informasi yang mudah dipahami untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap hoaks.
 - **Berkoordinasi dengan Bawaslu:** Mendukung upaya pengawasan melalui penyediaan data yang relevan.
3. **Kominfo (Pelaksana Utama):**
 Kominfo bertindak sebagai pelaksana teknis dalam menangani penyebaran hoaks melalui teknologi informasi dan komunikasi (Kominfo, 2023). Tugas utamanya meliputi:
- **Menghapus Konten Hoaks:** Melacak dan memblokir konten hoaks di media sosial serta platform digital lainnya.
 - **Mengampanyekan Literasi Digital:** Mengedukasi masyarakat untuk mengenali dan menghindari hoaks.
 - **Berkoordinasi dengan Platform Digital:** Bekerja sama dengan penyedia platform untuk menghapus konten yang melanggar aturan.
4. **Akademisi (Penyedia Dukungan):**
 Akademisi memberikan kontribusi berbasis penelitian untuk memperkuat langkah pencegahan hoaks (Lestari & Wibowo, 2022). Peran mereka mencakup:
- **Melakukan Riset Hoaks:** Meneliti pola penyebaran hoaks serta dampaknya pada pemilu.
 - **Mengembangkan Teknologi:** Merancang alat atau sistem pendeteksi hoaks otomatis.
 - **Memberikan Masukan Kebijakan:** Menyediakan rekomendasi berbasis data kepada Bawaslu, KPU, dan Kominfo.

Bawaslu mengoordinasikan semua pihak agar strategi pencegahan hoaks berjalan sesuai rencana. **KPU** mendukung upaya dengan menyediakan data yang valid dan transparan. **Kominfo** bertanggung jawab

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

atas pelaksanaan teknis dalam mengatasi hoaks. **kademisi** mendukung dengan riset serta pengembangan strategi yang inovatif. Sinergi antar pihak ini bertujuan menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan adil.

Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, memahami bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil tidak hanya bergantung pada lembaga negara semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat serta sinergi antar lembaga. Untuk itu, Bawaslu telah meluncurkan berbagai program dalam kerangka **Pengawasan Partisipatif**, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan, termasuk dalam upaya menangkal penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menggandeng sejumlah lembaga lain seperti **KPU, Kominfo, dan MAFINDO** untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan bebas dari disinformasi yang dapat merusak kredibilitas pemilu (Bawaslu RI, 2023; KPU RI, 2023; Kominfo, 2023; MAFINDO, 2023).

Gambar 21. Pengawasan Partisipatif Cegah Disinformasi dan Ujaran Kebencian Pemilu 2024

Cegah Disinformasi dan Ujaran Kebencian Pemilu 2024, Bawaslu Rancang Konsep Komunitas Digital



Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Bawaslu

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Bawaslu adalah melalui **Pendidikan Pengawas Partisipatif**, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam proses pemilu (Bawaslu RI, 2023). Dalam program ini, Bawaslu bekerja sama dengan **KPU** untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknis penyelenggaraan pemilu dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga proses pemilu yang bersih. **KPU** bekerja sama dengan **Bawaslu** (Badan Pengawas Pemilu) untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu diawasi secara ketat. **Bawaslu** memiliki peran dalam **pengawasan pelanggaran pemilu** dan **pencegahan hoaks**, sehingga **KPU** harus memastikan bahwa ada **kerja sama yang baik** antara keduanya. Komunikasi yang rutin dan terbuka antara **KPU** dan **Bawaslu** penting untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pemilu (KPU RI, 2023). **Bawaslu RI** mengawasi dan memobilisasi aktor-aktor dalam proses pemilu melalui **koordinasi yang jelas, pelatihan yang terstruktur**, dan **pemanfaatan teknologi** untuk memastikan pemilu yang **adil, transparan, dan efisien**. Dengan menjalin kerja sama yang erat dengan **KPU RI, Kominfo, MAFINDO**, serta lembaga dan platform lainnya, **KPU** dapat mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan pemilu dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang baik. Program ini juga melibatkan **Kominfo** untuk memberikan informasi yang lebih jelas terkait regulasi yang mengatur penyebaran informasi di dunia maya, serta melibatkan **MAFINDO** yang memiliki expertise dalam bidang pengecekan fakta dan literasi media. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan pemilu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang mungkin mengandung unsur hoaks (Bawaslu RI, 2023).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selain itu, Bawaslu juga mengadakan **Forum Warga Pengawasan Partisipatif**, yang menjadi tempat bagi warga untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta mendapatkan pengetahuan seputar pengawasan pemilu. Forum ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat kerjasama antar lembaga terkait.

Gambar 22. Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu



Sumber: Dokumen Bawaslu

Dalam forum ini, **KPU** menjelaskan aspek-aspek teknis pemilu, sedangkan **Kominfo** mengedukasi peserta tentang pentingnya menghindari penyebaran informasi yang salah, terutama di platform digital. **MAFINDO** di sisi lain berperan dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana cara memverifikasi berita yang beredar di media sosial agar masyarakat tidak terjebak dalam penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya forum ini, Bawaslu berharap masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan pemilu dan mampu berperan lebih aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bawaslu juga memfasilitasi program **Pojok Pengawasan** yang ditempatkan di berbagai titik strategis, seperti pusat perbelanjaan, tempat umum, dan kantor desa. Pojok Pengawasan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemilu dan melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi, termasuk penyebaran hoaks (Bawaslu RI, 2023; KPU RI, 2023).

Gambar 23. Panduan Pojok Pengawasan



Sumber: Dokumen Bawaslu

Kominfo berperan penting dalam menyediakan informasi terkait penyebaran informasi digital yang salah, serta memberikan edukasi tentang kebijakan dan peraturan terkait media sosial yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna (Kominfo, 2023). Di sisi lain, **MAFINDO** turut serta dalam mendukung verifikasi informasi yang ditemukan di dunia maya, memastikan bahwa hanya informasi yang valid dan benar yang disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan adanya Pojok Pengawasan ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar (Mafindo, 2023).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Salah satu inisiatif lain yang dijalankan adalah **Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi** yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi akademis dalam riset dan pengembangan terkait pemilu. Bawaslu menggandeng universitas dan lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemilu, termasuk masalah hoaks dan disinformasi di dunia digital (Bawaslu RI, 2023). Dalam hal ini, **KPU** memberikan informasi teknis mengenai tata cara pemilu, sedangkan **Kominfo** berperan dalam memberikan pemahaman tentang regulasi konten digital yang berpotensi mempengaruhi pemilu. **MAFINDO** juga terlibat dalam memberikan pelatihan mengenai teknik pengecekan fakta dan cara melawan hoaks di media sosial. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara ini diharapkan dapat menghasilkan riset yang membantu memperkuat pengawasan pemilu serta memberikan solusi konkret dalam mengatasi tantangan penyebaran hoaks yang sering kali mengganggu proses demokrasi (Bawaslu RI, 2023; Kominfo, 2023; MAFINDO, 2023; KPU RI, 2023).

Selain itu, **Kampung Pengawasan Partisipatif** menjadi program yang mengedepankan peran serta masyarakat di tingkat lokal. Bawaslu mendorong warga di desa atau kelurahan untuk menjadi pengawas aktif dalam pemilu dan terlibat langsung dalam mendeteksi hoaks yang mungkin tersebar di komunitas mereka. Program ini tidak hanya melibatkan **Bawaslu**, tetapi juga **KPU** yang membantu menjelaskan prosedur pemilu kepada warga, serta **Kominfo** yang memberikan wawasan tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. **MAFINDO** juga berperan penting dalam mengedukasi warga desa mengenai cara-cara praktis untuk mengecek keaslian informasi, serta membantu mengidentifikasi hoaks yang bisa merusak jalannya pemilu. Melalui Kampung Pengawasan, diharapkan warga dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal (Bawaslu RI, 2023; KPU RI, 2023).

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Program **Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif** menjadi bagian yang sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial yang sering kali menjadi sarana penyebaran hoaks. Bawaslu bekerja sama dengan **Kominfo** untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi di platform digital. **MAFINDO**, dengan keahliannya dalam verifikasi fakta, turut serta dalam membantu masyarakat untuk mengenali berita yang tidak benar dan memastikan hanya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang diteruskan. Komunitas digital ini memungkinkan individu dari berbagai kalangan untuk berkolaborasi dalam melawan penyebaran hoaks yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu (Mafindo, 2023).

Secara keseluruhan, program **Pengawasan Partisipatif** yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dengan dukungan penuh dari **KPU**, **Kominfo**, dan **MAFINDO**, bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari hoaks. Melalui berbagai kolaborasi ini, setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan sinergi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Bawaslu berupaya untuk memperkuat pengawasan pemilu baik di dunia fisik maupun dunia maya, sehingga proses pemilu dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku (Bawaslu RI, 2023; Kominfo, 2023; MAFINDO, 2023; KPU RI, 2023).

Langkah berikutnya adalah menyusun pesan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Pesan yang disusun harus disampaikan dengan cara yang terstruktur dan jelas, serta mampu menggambarkan dengan baik kepentingan dan tujuan jaringan aktor yang terlibat. Ini bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga menjelaskan alasan-alasan yang mendasari kepentingan dan tujuan tersebut. Mengapa isu ini

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penting? Apa yang ingin dicapai melalui kebijakan atau program ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dapat dijawab dengan jelas dalam pesan yang disampaikan. Dengan merumuskan pesan yang komprehensif dan mudah dipahami, kita akan bisa menjelaskan urgensi dan relevansi isu yang diangkat, sehingga pihak luar seperti masyarakat, pemangku kepentingan, atau media dapat dengan mudah mengerti mengapa isu tersebut patut untuk mendapatkan perhatian. Selain itu, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis agar pesan bisa diterima oleh berbagai kalangan, tanpa membuat kebingungan atau mengurangi daya tarik pesan tersebut.

Selain itu, memperkuat hubungan dengan media massa menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi komunikasi. Media memiliki kekuatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam. Kerja sama yang baik dengan media dapat memperbesar jangkauan pesan yang disampaikan dan memastikan bahwa informasi penting tentang tujuan serta kepentingan dari jaringan aktor bisa sampai ke masyarakat umum. Media bukan hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai platform yang memungkinkan informasi yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan para ahli, laporan investigatif, atau presentasi data yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan (Norris, 2000). Dengan mengandalkan media sebagai mitra dalam menyebarkan pesan, kita dapat lebih mudah membangun kesadaran publik mengenai isu yang diangkat dan mendorong dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Media massa juga berperan penting dalam menjaga transparansi dan memberikan ruang untuk mengklarifikasi berbagai isu yang mungkin muncul, sehingga dapat mengurangi potensi disinformasi atau kesalahpahaman yang dapat merugikan reputasi atau tujuan yang ingin dicapai (Bawaslu RI, 2022).

Pada bagian ini, Bawaslu RI sebagai aktor kunci harus mampu mewakili dan mengorganisasi suara serta tindakan dari seluruh aktor yang telah terlibat dalam jaringan — baik itu KPU, Kominfo, MAFINDO,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

maupun masyarakat digital. Sebagai mediator, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai penghubung, tetapi juga sebagai *spokesperson* yang menyuarakan kepentingan kolektif dalam pengawasan hoaks pemilu. Peran ini terlihat dari upaya Bawaslu membangun forum koordinasi formal, merancang sistem pelaporan terstruktur, dan mengoordinasikan klarifikasi informasi dengan aktor lain, yang merupakan bentuk nyata mobilisasi sumber daya, teknologi, dan legitimasi (Bawaslu RI, 2023). Berdasarkan dokumen yang tersedia, Bawaslu juga menyusun prosedur pelaporan publik dan memastikan adanya mekanisme respons cepat, terutama dalam hal validasi dan penindakan konten hoaks. Posisi ini menjadikan Bawaslu sebagai “wajah” dari jaringan kolaboratif dalam pengawasan informasi publik selama pemilu, yang tidak hanya mengoordinasikan aktor-aktor formal, tetapi juga merepresentasikan kredibilitas sistem di mata publik (Latour, 2025). Keberhasilan momen mobilisasi ini sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu menjaga kepercayaan semua pihak serta memastikan bahwa suara dan peran masing-masing aktor benar-benar termobilisasi secara sah, tidak digantikan atau dimanipulasi (Kominfo, 2023; MAFINDO, 2024).

Dengan menjadi wajah dari relasi aktor ini, Bawaslu harus mampu memastikan bahwa proses mobilisasi berjalan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif. Hal ini tercermin dari kemampuannya mengelola alur informasi antara aktor teknis seperti Kominfo yang memanfaatkan teknologi crawling untuk deteksi hoaks, serta KPU yang menyediakan klarifikasi cepat terhadap informasi yang beredar (Bawaslu RI, 2023). Dalam posisi tersebut, Bawaslu juga menjadi penentu arah koordinasi: memastikan bahwa data yang dikumpulkan, hoaks yang teridentifikasi, serta klarifikasi yang diberikan semuanya disampaikan kepada publik dengan bahasa yang jelas, akurat, dan kredibel. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu bukan hanya mengorganisasi jejaring teknis, tetapi juga merepresentasikan legitimasi publik atas seluruh kerja sama antaraktor tersebut.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selain itu, sebagai aktor yang telah menjalankan problematisasi dan penarikan secara efektif, Bawaslu menjadi pusat kepercayaan dan titik rujuk utama dari jaringan. Dalam ANT, posisi seperti ini disebut sebagai bentuk *representasi stabil* — ketika aktor kunci tidak hanya berbicara atas nama aktor lain, tetapi juga diakui oleh publik dan jaringan sebagai representasi sah dari keseluruhan sistem (Latour, 2005; Callon, 1986). Namun, tantangan dalam tahap mobilisasi ini adalah memastikan bahwa tidak terjadi *displacement* atau *silent substitution*, di mana suara asli aktor lain tergantikan oleh interpretasi sepihak (Latour, 2005; Callon, 1986). Oleh karena itu, transparansi, dokumentasi, dan keterbukaan komunikasi menjadi prinsip utama agar Bawaslu benar-benar dapat menjaga posisi strategisnya sebagai mediator dan wajah dari jaringan pengawasan hoaks pemilu.

Selanjutnya adalah, setiap aktor, termasuk manusia dan non-manusia (seperti teknologi, regulasi, dan prosedur), harus bekerja dalam harmoni agar jaringan tetap stabil. Dalam konteks ini, teknologi crawling milik Kominfo, sistem pelaporan yang disusun Bawaslu, serta kebijakan klarifikasi dari KPU bukan hanya alat bantu, melainkan aktor non-manusia yang berperan penting dalam menjaga alur kerja jaringan. Ketika teknologi tidak berjalan optimal, atau regulasi tidak sinkron antarinstansi, maka stabilitas jaringan berisiko terganggu (Kominfo, 2024; MAFINDO, 2024). Oleh karena itu, Bawaslu sebagai mediator juga harus memastikan bahwa prosedur digital, sistem pelaporan, hingga alur komunikasi antar lembaga benar-benar terintegrasi dan saling mendukung. Stabilitas jaringan ini menjadi kunci agar strategi pengawasan hoaks tidak hanya berhenti pada komitmen formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sistem yang hidup, responsif, dan berkelanjutan.

Hanya dengan memastikan bahwa seluruh aktor—baik manusia maupun non-manusia—berfungsi secara selaras, Bawaslu dapat mempertahankan posisi representatifnya dalam jaringan. Koordinasi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lintas fungsi ini memungkinkan terbentuknya ekosistem pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas hoaks digital, serta mampu mengakomodasi dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat. Maka dari itu, keberhasilan mobilisasi bukan semata pada berjalannya kesepakatan, tetapi pada kemampuannya menjadikan jaringan tersebut terus relevan dan tangguh menghadapi perubahan (Latour, 2005; Bawaslu RI, 2023).

Setiap keputusan yang Bawaslu ambil harus mempertimbangkan seluruh kepentingan dan sumber daya yang dimiliki aktor lain. Dalam ANT, hubungan dalam jaringan tidak bersifat hierarkis, melainkan simetris—setiap aktor, baik manusia maupun non-manusia, memiliki peran yang saling tergantung dan saling menentukan (Latour, 2005; Callon, 1986). Karena itu, Bawaslu sebagai mediator tidak dapat bertindak sepihak atau dominan, melainkan harus terus-menerus melakukan penyesuaian terhadap kapasitas dan keterbatasan masing-masing aktor. Seperti, keputusan tentang metode verifikasi hoaks tidak bisa hanya bergantung pada logika hukum Bawaslu, melainkan harus memperhitungkan kemampuan teknologi crawling Kominfo, prosedur validasi KPU, serta waktu tanggap publik terhadap klarifikasi.

Sebagaimana disampaikan oleh perwakilan dari Kominfo dalam wawancara terpisah yaitu Ismail “algoritma crawling kami dapat bekerja optimal jika ada sinyal atau laporan awal dari Bawaslu atau KPU. Kami butuh trigger data awal agar proses bisa langsung kami lanjutkan ke tindakan takedown.” Ini memperkuat pemahaman bahwa setiap aktor memiliki sumber daya spesifik yang harus diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai mediator bukan hanya menjembatani secara administratif, tetapi juga mengatur ritme komunikasi lintas lembaga agar proses respons terhadap hoaks dapat dilakukan secara real-time.

Dalam kerangka ANT, mediator berperan penting sebagai elemen penghubung yang memungkinkan adanya komunikasi dan kolaborasi

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

antara aktor-aktor yang terlibat. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam bentuk tindakan yang relevan bagi masing-masing aktor. Seperti diungkapkan oleh anggota KPU yang kami wawancarai, “peran Bawaslu penting karena merekalah yang menjembatani bahasa hukum, teknologi, dan narasi publik agar semuanya bisa nyambung.” Dengan memahami dinamika ini, kita bisa melihat bahwa keberhasilan mobilisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan alat, tetapi oleh kemampuan mediator untuk membentuk ekosistem kerja yang responsif, inklusif, dan saling mendukung (Kominfo, 2024; Bawaslu RI, 2023).

Sebagai mediator dalam momen mobilisasi, Bawaslu RI tidak hanya bertugas mengoordinasikan kerja sama antar aktor manusia seperti KPU, Kominfo, dan MAFINDO, tetapi juga secara aktif memanfaatkan keberadaan aktor non-manusia—termasuk teknologi digital, regulasi, dan prosedur kelembagaan—yang menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas jaringan kerja pengawasan hoaks. Salah satu contoh paling menonjol adalah keterlibatan sistem kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh Kominfo melalui *Automatic Identification System (AIS)*. Sistem ini bekerja dengan teknologi crawling dan machine learning untuk memindai, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan konten bermuatan hoaks di internet secara otomatis. Berdasarkan laporan resmi Kominfo, sejak diluncurkan pada 2018 hingga akhir 2023, sistem ini telah mendeteksi lebih dari **12.500 isu hoaks**, termasuk **203 isu spesifik terkait Pemilu 2024**, dengan **1.399 konten berhasil dihapus (take-down)** dari berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok (Kominfo, 2024).

Dalam perspektif ANT, sistem teknologi ini tidak bisa dilihat hanya sebagai alat bantu pasif, tetapi justru sebagai *mediator aktif* yang secara signifikan memengaruhi dinamika jaringan (Callon, 1986). Teknologi semacam AIS mampu mentransformasikan cara kerja pengawasan informasi secara real-time, yang berarti aktor-aktor lain seperti Bawaslu

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan KPU harus menyesuaikan ritme dan keputusannya terhadap output yang diberikan oleh sistem ini. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempercepat proses deteksi hoaks, tetapi juga mengatur ulang alur kerja jaringan: kapan Bawaslu harus bertindak, bagaimana KPU memberikan klarifikasi, dan sejauh mana intervensi kebijakan dapat dilakukan. Peran ini menjadikan teknologi sebagai simpul penghubung (nodal actor) antara pengawasan digital dan tindakan hukum, sekaligus pengaman stabilitas jaringan dalam menghadapi dinamika informasi yang cepat dan masif di era digital.

Selain teknologi, peran regulasi sebagai mediator non-manusia juga sangat penting. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menjadi instrumen hukum yang merancang arsitektur kerja kolaboratif antar aktor, serta menjamin legalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Regulasi ini menetapkan prosedur standar yang mencakup pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat, batas waktu penanganan, hingga format koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya struktur formal ini, keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan satu institusi, tetapi harus selaras dengan kapasitas teknis dan mandat kelembagaan masing-masing aktor. Prosedur ini juga memberikan **perlindungan hukum terhadap pelapor**, mencegah kriminalisasi partisipatif, dan memperkuat peran publik sebagai bagian dari jaringan pengawasan informasi. Regulasi ini menunjukkan bahwa dalam konteks ANT, dokumen dan peraturan bukan sekadar produk birokrasi, melainkan *aktor non-manusia* yang memainkan fungsi aktif dalam membentuk dan mengarahkan relasi jaringan. Ketika aturan ini dijalankan, ia menjadi pengatur ritme kerja kolaboratif sekaligus penjaga integritas komunikasi antar institusi (Bawaslu RI, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan Bawaslu RI dalam momen mobilisasi sangat ditentukan oleh

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kemampuannya mengelola dan menyatukan berbagai aktor—baik manusia maupun non-manusia—dalam satu jaringan kerja yang stabil dan fungsional. Sebagai mediator, Bawaslu tidak hanya memainkan peran koordinatif antar lembaga seperti KPU, Kominfo, dan MAFINDO, tetapi juga menjembatani relasi antara teknologi, regulasi, dan praktik sosial. Penggunaan teknologi AIS oleh Kominfo serta penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 adalah contoh nyata bagaimana aktor non-manusia turut berperan aktif sebagai penentu ritme kerja kolaboratif.

Dalam kerangka ANT, ini menunjukkan bahwa stabilitas jaringan pengawasan hoaks tidak ditentukan oleh dominasi satu aktor, tetapi oleh kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya, kepentingan, dan mekanisme yang beragam. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya menjadi wajah dari kolaborasi antar lembaga, tetapi juga simbol representatif dari kesepakatan bersama, di mana setiap tindakan dan keputusan mencerminkan kerja kolektif yang terorganisir secara teknis, hukum, dan sosial. Analisis ini menegaskan bahwa penguatan peran mediator—baik dalam bentuk institusi maupun perangkat teknis—merupakan kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan informasi dan keberlanjutan demokrasi digital di Indonesia.

Selain itu, kesuksesan Bawaslu dalam menjaga stabilitas jaringan juga bergantung pada kemampuannya membangun kepercayaan dan legitimasi dari seluruh aktor yang terlibat. Dalam konteks ANT, legitimasi bukan hanya diperoleh melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui kemampuan aktor utama dalam mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menjamin transparansi dalam setiap proses. Kehadiran teknologi dan regulasi hanya akan efektif bila didukung oleh komunikasi terbuka, alur informasi yang jelas, serta mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas bersama. Dengan memfasilitasi interaksi lintas sektor dan lintas fungsi, Bawaslu menempatkan dirinya sebagai simpul yang menyatukan logika hukum, logika teknis, dan kebutuhan publik dalam satu kerangka kerja kolaboratif. Oleh karena itu, di tengah

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kompleksitas isu disinformasi pemilu, pendekatan jaringan yang dijalankan Bawaslu dapat menjadi model tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan demokrasi digital di masa depan.

Momen mobilisasi dalam teori Actor-Network Theory (ANT) menandai tahap ketika aktor-aktor yang telah dilibatkan benar-benar digerakkan untuk bertindak secara sinkron demi mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Pemilu 2024, tantangan utama dalam momen ini adalah **ketimpangan kapasitas antar lembaga, lemahnya pengawasan kolektif, serta lambatnya distribusi informasi korektif di ruang digital**. Meskipun Bawaslu, Kominfo, KPU, serta mitra masyarakat sipil seperti MAFINDO dan jaringan relawan cek fakta telah membentuk kanal koordinasi cepat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyebaran informasi klarifikasi masih kalah cepat dibanding laju viralitas hoaks.

Data dari **MAFINDO (2024)** menunjukkan bahwa hanya **38% konten hoaks yang berhasil diklarifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam**, dan sisanya membutuhkan waktu hingga dua hari atau lebih untuk ditindak (MAFINDO, 2024). Dalam waktu yang sama, **Kominfo (2024)** mencatat terdapat **824 isu hoaks pemilu** yang tersebar di media sosial sepanjang Januari–Maret 2024, namun hanya **60% di antaranya yang mendapat tindak lanjut berupa permintaan takedown ke platform digital** (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi mobilisasi aktor secara administratif, tindakan nyata di lapangan masih terfragmentasi, tidak berada dalam satu kerangka kerja bersama yang cepat dan responsif.

Lebih lanjut, **keterlibatan masyarakat dalam pelaporan juga tergolong rendah**. Dari total **15.906 laporan pelanggaran** yang diterima Bawaslu selama masa kampanye, hanya **1.163 laporan (7,3%)** yang berasal dari kanal digital seperti *GOWASLU* dan yang terkait langsung dengan isu disinformasi (Bawaslu, 2024). Padahal, karakter media sosial yang sangat terdesentralisasi membutuhkan kontribusi dari aktor akar rumput untuk menciptakan efek koreksi kolektif. Ketiadaan *feedback loop* yang jelas juga

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjadi masalah. Banyak pelapor—baik relawan, komunitas digital, maupun individu—tidak mendapatkan umpan balik atau kejelasan tindak lanjut atas laporan mereka, yang berdampak pada **menurunnya motivasi partisipasi lanjutan dalam pengawasan digital** (Center for Innovation Policy and Governance, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa mobilisasi yang terjadi belum mampu menjaga ritme kolaboratif yang konsisten dan berkelanjutan.

4.3 Tantangan yang dihadapi dalam Relasi Multi-Aktor untuk Melakukan Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024

Meskipun koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo dalam pencegahan hoaks menjelang Pemilu 2024 telah mengalami kemajuan, relasi multi-aktor ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial yang memengaruhi efektivitasnya. Tantangan **pertama** terletak pada perbedaan mandat kelembagaan. Bawaslu memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu, sementara KPU bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyampaian informasi resmi terkait tahapan dan hasil pemilu. Di sisi lain, Kominfo menjalankan peran sebagai eksekutor teknis yang mengelola pengawasan konten digital melalui sistem berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence System (AIS). Ketika hoaks muncul di media sosial, diperlukan respons cepat dan terkoordinasi antara ketiga lembaga tersebut. Namun, perbedaan titik fokus dan prosedur kerja masing-masing institusi sering kali menghambat kecepatan pengambilan keputusan bersama. Proses verifikasi konten oleh Bawaslu harus menunggu klarifikasi dari KPU, dan Kominfo tidak dapat menindak konten digital tanpa dasar atau penilaian dari dua lembaga lainnya. Ketimpangan ritme ini menjadi hambatan awal dalam upaya membangun respons terpadu terhadap arus hoaks yang sangat cepat menyebar di era digital (Kominfo, 2024; Bawaslu RI, 2023). Dalam perspektif teori jaringan aktor (Actor-Network Theory), ketimpangan ritme kerja ini menunjukkan bahwa

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hubungan antar-aktor dalam jaringan belum sepenuhnya terkoordinasi sebagai entitas yang saling menyalurkan waktu, sumber daya, dan otoritas (Latour, 2005)

Tantangan **kedua** berkaitan dengan sinkronisasi sistem kerja dan prosedur operasional antar lembaga. Kominfo menggunakan sistem deteksi otomatis berbasis AI dan crawling yang mampu mengidentifikasi ribuan konten secara real-time (Kominfo, 2024). Namun, data tersebut belum tentu langsung dapat diproses oleh Bawaslu atau KPU karena perbedaan format dan kebutuhan verifikasi. Bawaslu lebih mengandalkan laporan dari masyarakat atau temuan manual di lapangan, sedangkan KPU menilai validitas berdasarkan kelengkapan informasi pemilu. Ketidadaan sistem integrasi antar institusi menyebabkan pertukaran informasi menjadi lambat dan berpotensi tumpang tindih. Misalnya, satu konten bisa terdeteksi oleh Kominfo, tetapi belum ditindak karena Bawaslu belum mengategorikannya sebagai pelanggaran, atau KPU belum memberikan klarifikasi resmi. Dalam kerangka teori jaringan aktor (ANT), fenomena ini menunjukkan adanya friksi dalam *alignment* jaringan, di mana masing-masing aktor belum membentuk interoperabilitas sistem yang memungkinkan tindakan kolektif secara simultan (Latour, 2005)..

Tantangan **ketiga** adalah terkait kelemahan dalam jalur komunikasi dan pengambilan keputusan lintas lembaga. Dalam situasi darurat informasi, seperti ketika hoaks tentang hasil pemilu atau tuduhan kecurangan menyebar secara masif, dibutuhkan respons yang cepat, akurat, dan terkoordinasi. Namun, proses pengambilan keputusan bersama sering kali terhambat oleh mekanisme birokratis, di mana keputusan untuk bertindak harus melewati beberapa tahapan klarifikasi antar lembaga. Padahal, karakter hoaks di media sosial bekerja dalam hitungan menit, bukan hari. Jika konten tidak segera diklarifikasi atau dihapus, maka hoaks tersebut akan terlanjur menyebar dan membentuk

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

persepsi publik yang sulit dikoreksi. Di sinilah Bawaslu sebagai mediator seharusnya berperan lebih aktif dalam menyederhanakan proses komunikasi, memastikan setiap aktor memahami urgensi situasi, dan menyepakati jalur cepat (*fast-track*) dalam menangani kasus hoaks tertentu (Bawaslu RI, 2023; KPU RI, 2023). Ketika koordinasi bersifat reaktif dan prosedural, efektivitas kerja jaringan akan sangat rentan, terutama di momen kritis seperti hari pemungutan suara atau pengumuman hasil pemilu. Dalam perspektif ANT, jalur komunikasi yang lambat dan tidak responsif menjadi *bottleneck* dalam aliran jaringan informasi, yang seharusnya dapat dipotong melalui mekanisme *fast-track decision making* dalam situasi darurat (Latour, 2005).

Tantangan **keempat** dari keterbatasan kewenangan lembaga negara terhadap pengelolaan konten di media sosial yang dikuasai oleh korporasi global. Meskipun Bawaslu dan Kominfo telah menjalin kerja sama dengan platform besar seperti Meta (Facebook/Instagram), TikTok, dan YouTube, tidak semua konten yang dikategorikan sebagai hoaks oleh lembaga negara dapat langsung diturunkan. Platform digital memiliki standar komunitas dan kebijakan moderasi tersendiri, yang tidak selalu sejalan dengan interpretasi hukum nasional (Kominfo, 2023). Misalnya, konten yang mengandung narasi manipulatif tentang hasil pemilu bisa saja dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi oleh platform, padahal menurut Bawaslu dan KPU konten tersebut menyesatkan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas pemilu. Ketimpangan kekuasaan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap disinformasi digital tidak dapat mengandalkan pendekatan domestik semata, melainkan memerlukan strategi lintas yurisdiksi yang bersifat diplomatik, termasuk melalui kerja sama regional dan multilateral (Latour, 2005).

Dengan demikian, meskipun struktur kerja multi-aktor antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo telah terbentuk, tantangan-tantangan mendasar seperti perbedaan mandat, keterbatasan teknis, kesenjangan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kewenangan, dan minimnya strategi pencegahan jangka panjang masih membayangi efektivitas relasi mereka. Tantangan ini sekaligus menunjukkan bahwa kerja kolaboratif di era digital tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan formal atau forum koordinasi, tetapi membutuhkan infrastruktur data, komunikasi, dan kepemimpinan kolaboratif yang kuat. Dalam kerangka Actor-Network Theory, keberhasilan pengawasan hoaks tidak hanya bergantung pada kekuatan aktor manusia, tetapi juga pada seberapa baik seluruh elemen jaringan—teknologi, regulasi, prosedur, hingga budaya organisasi—bisa saling berinteraksi secara harmonis dan responsif terhadap perubahan yang cepat. Maka, pembenahan terhadap tantangan-tantangan ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan integritas informasi dalam pemilu yang demokratis dan sehat.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji strategi pengawasan penyebaran hoaks pada Pemilu dengan pendekatan Actor-Network Theory (ANT), dan menemukan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berperan sebagai aktor utama (aktor inisiator) dalam membangun dan mengelola jaringan pengawasan yang kompleks dan dinamis. Dalam proses problematisasi, Bawaslu secara proaktif mengidentifikasi hoaks sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Hal ini mendorong Bawaslu untuk menarik aktor-aktor lainnya—baik manusia maupun non-manusia—ke dalam jaringan pengawasan dan pencegahan hoaks yang terstruktur.

Dalam konteks pencegahan penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu 2024, Bawaslu RI memulai momen *problematisasi* dengan mengidentifikasi hoaks sebagai ancaman terhadap integritas pemilu, memosisikan dirinya sebagai aktor kunci yang menjembatani berbagai kepentingan dalam pengawasan digital, serta menetapkan Kominfo dan KPU sebagai aktor strategis dalam jaringan. Pada tahap *penarikan*, Bawaslu membangun forum koordinasi, pertemuan lintas lembaga, serta nota kesepahaman untuk menegosiasikan peran antar-aktor, termasuk penanganan hoaks secara teknis oleh Kominfo dan penyebaran informasi resmi oleh KPU. Momen *pelibatan* terjadi saat setiap aktor mulai menyepakati pembagian tugas sesuai kewenangan: Bawaslu menerima aduan publik dan mengawasi konten, Kominfo menindak konten hoaks secara digital, dan KPU menyuplai data pemilu yang valid dan terbuka. Tahap *mobilisasi* ditandai dengan pelaksanaan strategi bersama seperti patroli siber, kampanye literasi digital, serta pemanfaatan kanal pelaporan partisipatif seperti “Jarimu Awasi Pemilu”, yang menjadi bukti konkret sinergi antar-aktor untuk menjalankan fungsi pengawasan secara kolaboratif, dinamis, dan terarah.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selanjutnya, koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo dalam upaya pencegahan hoaks pada Pemilu 2024 menunjukkan komitmen kolaboratif yang positif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan mandat kelembagaan dan pola kerja masing-masing instansi terkadang menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak berjalan secepat dinamika penyebaran informasi di media sosial. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam mengakses atau meminta tindakan cepat dari platform digital global juga menjadi kendala tersendiri. Meski demikian, langkah-langkah seperti forum diskusi bersama, penandatanganan nota kesepahaman, dan pelaksanaan kampanye literasi digital merupakan bukti adanya upaya harmonisasi peran antar-aktor. Dalam perspektif *Actor-Network Theory*, keberhasilan pengawasan hoaks membutuhkan kerja sama yang terus disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk keterlibatan teknologi, regulasi, dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, perbaikan komunikasi lintas lembaga dan penguatan koordinasi teknis tetap diperlukan agar pengawasan dapat berjalan lebih sinergis dan adaptif terhadap perkembangan informasi digital.

Sebagai **penutup**, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pengawasan hoaks berbasis model Actor-Network Theory telah menunjukkan efektivitas nyata. Merujuk pada data Kominfo, sepanjang periode Januari 2023 hingga Januari 2024 tercatat **204 isu hoaks** terkait Pemilu 2024—bandingkan dengan 714 kasus pada 2018–2019, menunjukkan penurunan signifikan sekitar 71%. Selama masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kominfo berhasil mengambil tindakan terhadap **51 konten hoaks** dan menerbitkan **175 klarifikasi resmi**, yang menjadi bukti koordinasi cepat antara Bawaslu, Kominfo, dan platform digital.

Menurut survei *Public Trust & Information Integrity* yang dirilis oleh CSIS Indonesia (2023), meskipun keberadaan hoaks masih signifikan dalam politik digital, terdapat tren peningkatan kesadaran dan dukungan publik

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terhadap intervensi pemerintah. Hasil survei mencatat bahwa 42% masyarakat Indonesia mengaku pernah mempercayai informasi palsu terkait pemilu, namun 67% menyatakan mendukung kebijakan moderasi konten dan langkah hukum terhadap penyebar hoaks. Hal ini menunjukkan adanya legitimasi publik terhadap peran lembaga negara seperti Bawaslu dan Kominfo dalam melakukan pengawasan digital secara aktif (CSIS Indonesia, 2023).

Selaras dengan itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah isu hoaks terkait Pemilu dari 714 isu pada Pemilu 2019 menjadi 204 isu selama periode Januari 2023 hingga Januari 2024, atau turun sekitar 71% (Kominfo, 2024). Selama masa kampanye 2024, tepatnya sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kominfo juga berhasil menindak 51 konten hoaks dan menerbitkan 175 klarifikasi resmi (KBR, 2024). Penurunan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas teknologi moderasi dan deteksi dini yang digunakan oleh Kominfo, tetapi juga menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara aktor manusia (lembaga, masyarakat, komunitas digital) dan aktor non-manusia (algoritma, platform digital, regulasi) sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan Actor-Network Theory (ANT). Dengan demikian, pendekatan jaringan kolaboratif yang melibatkan Bawaslu, Kominfo, serta platform digital dan organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO telah membentuk respons kolektif yang relatif efektif dalam menjaga integritas informasi selama Pemilu 2024. Keberhasilan ini menjadi model strategis yang dapat direplikasi untuk penanggulangan disinformasi di masa-masa krusial demokrasi digital Indonesia ke depan.

Penurunan ini memperkuat kesimpulan bahwa kolaborasi antar-aktor—Bawaslu sebagai pengawas, Kominfo sebagai regulator teknis, dan KPU sebagai penyedia data resmi—ditambah kampanye literasi oleh mitra seperti MAFINDO, berhasil mengurangi intensitas serta dampak hoaks dalam

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ekosistem media sosial. Meskipun tantangan seperti ritme respons yang masih perlu dipercepat dan keterbatasan wewenang terhadap platform global masih ada, data yang ada jelas menunjukkan **reduksi signifikan penyebaran hoaks**, menandakan keberhasilan strategi pengawasan bersama dalam menjaga integritas pemilu 2024.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi Bawaslu RI dan aktor-aktor lainnya dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap hoaks pada pemilu mendatang.

Pertama, penting bagi Bawaslu dan mitra strategisnya untuk meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan informasi digital. Penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem pendeteksi otomatis, serta integrasi basis data antara lembaga perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan membantu mendeteksi penyebaran hoaks secara real-time dan memungkinkan respons yang lebih cepat serta efisien terhadap konten berbahaya yang beredar.

Kedua, perlu disusun kerangka kerja formal dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur alur kerja dan pembagian tugas antar lembaga. SOP ini harus menjelaskan batasan kewenangan secara rinci dan dapat dijadikan acuan dalam situasi krisis informasi, sehingga dapat mencegah konflik kewenangan ataupun miskomunikasi antar aktor dalam jaringan pengawasan.

Ketiga, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang berkelanjutan dan bersifat kolaboratif. Kampanye publik, pelatihan komunitas, serta kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi dapat dijadikan strategi jangka panjang untuk membentuk warga digital yang kritis dan cerdas. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hoaks, semakin kecil pula ruang gerak penyebar disinformasi.

Keempat, Bawaslu dan lembaga mitra perlu terus memperkuat kerja sama dengan aktor-aktor non-pemerintah seperti media, jurnalis, akademisi,

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan komunitas digital. Sinergi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi konten secara crowdsourced, menyebarkan klarifikasi hoaks lebih luas, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bebas dari manipulasi informasi.

Terakhir, evaluasi dan penyesuaian strategi kolaborasi perlu dilakukan secara rutin. Dalam dunia digital yang berubah cepat, metode pengawasan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, algoritma media sosial, dan pola baru penyebaran hoaks. Monitoring dan evaluasi berkala dapat membantu Bawaslu dan para mitra mengevaluasi efektivitas langkah yang telah diambil dan merancang kebijakan baru yang lebih responsif dan kontekstual.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap hoaks dalam pemilu mendatang akan berjalan lebih efektif, kolaboratif, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bueger, C. (2013). *Actor-Network Theory, Methodology, and International Organization*.

Heywood, A. (2019). *Politics*. Bloomsbury Academic.

Michael, R., & Philip, A. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.

SKRIPSI

Chandrawati, C. (2020). ANALISIS PENERAPAN ACTOR NETWORK THEORY (ANT) PADA CHATBOT SEBAGAI LAYANAN FACT-CHECKING: STUDI KASUS PADA CHATBOT MAFINDO

Prasetya, H. A., & Murata, T. (2020). A Model of Opinion and Propagation Structure Polarization in Social Media. *Computation Social Networks*.

JURNAL

Abqa Razaq, M. A., Kurniasih, Y., & Nugraheni, M. C. (2022). SINERGITAS AKADEMISI DAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN BERITA HOAX DAN BLACK CAMPAIGN. *Communnity Development Journal*.

Antari, P. E. (2018). INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Panorama Hukum*.

Destriapani, E., Sarwoprasadjo, S., & Sadono, D. (2021). Pemanfaatan Website Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.

Fatimah, N., Doembana, I., & Sufardi, E. (2024). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN BANGGAI. *SOCIETO COMMUNICATION JOURNAL*.

Hafid, I. (2020). KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL BAWASLU PROVISI KEPULAUAN RIAU*.

Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*.

Soesilo, A. S. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*.

Suparto. (2016). PEMISAHAN KEKUASAAN, KONSTITUSI DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN MENURUT ISLAM. *JURNAL SELAT*.

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Tambun, F. J., Zebua, F. J., & Tambun, A. F. (2023). KOMUNIKASIAN TAR LEMBAGA DAN DISEMINASI INFORMASI KPU DAN BAWASLU DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 2024. *Journal of Communication Studies*.
- Tasrif. (2023). Komunikasi Politik dan Pemilu 2024: Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Menuju Pemilu yang Bermartabat. *Intizar*.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*.
- Yoedtadi, M. G., & Adina, A. (2021). Role of Public relations to Prevent Hoaxes (Case Study of Instagram @Kenkominfo). *Atlantis Pres, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.

WEBSITE

- Agusta, R. (2022, November 30). *Tangkal Hoaks di Medsos, Bawaslu Kolaborasi dengan Banyak Pihak*. Diambil kembali dari Berita: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tangkal-hoaks-di-medsos-bawaslu-kolaborasi-dengan-banyak-pihak-0>
- Annur, C. M. (2023, November 29). *Teknologi & Telekomunikasi*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/hoaks-di-media-sosial-meningkat-jelang-kampanye-pemilu-2024>
- Annur, C. M. (2023, September 20). *Teknologi dan Telekomunikasi*. Diambil kembali dari Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>
- Aptika, A. (2020, Agustus 28). *Aptika*. Diambil kembali dari Aptika.Kominfo.go.id: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/kominfo-bawaslu-dan-kpu-sepakati-pengawasan-konten-internet-di-pilkada-2020/>
- Ardipandanto, A. (2023, September). *berkas.dpr.go.id*. Diambil kembali dari DPR.go.id: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-18-II-P3DI-September-2023-203.pdf
- Arianti, R. D., & Galih, B. (2023, September 30). *5 Tipe Hoaks yang Muncul Menjelang Pemilu, Kenali agar Tidak Tertipu*. Diambil kembali dari Cek Fakta: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/30/171606482/5-tipe-hoaks-yang-muncul-menjelang-pemilu-kenali-agar-tidak-tertipu?page=all>

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Pradana, J. (2022, Juni 21). *Berita*. Diambil kembali dari Bawaslu:
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sinergi-bawaslu-mafindo-perludem-perangi-hoaks-pemilu-2024>
- Pribadi, B. (2024, Februari 16). *Politik*. Diambil kembali dari Tempo:
<https://www.tempo.co/politik/koalisi-cekfakta-com-periksa-56-hoaks-di-media-di-hari-pencoblosan-pemilu-2024-86663>
- Saptoyo, R. D., & Galih, B. (2023, 09 30). *Cek Fakta*. Diambil kembali dari Kompas:
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/30/171606482/5-tipe-hoaks-yang-muncul-menjelang-pemilu-kenali-agar-tidak-tertipu?page=all>

LAMPIRAN

LEMBAR PERBAIKAN

LEMBAR PERBAIKAN
HASIL SIDANG SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Nama : Muhammad Nur Apriyanto
NIM : 2010413116
Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks
Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Tanggal Ujian : Rabu, 9 Juli 2025
Pimpinan Sidang : Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

No.	Catatan Perbaikan	Status Perbaikan	Tanda Tangan dan Tanggal Pengajuan Revisi
1.	Selaraskan komidigi menjadi Kominfo semua.		
2.	Body Note.		
3.			
4.			
5.			
6.			

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

LEMBAR PERBAIKAN
HASIL SIDANG SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Nama : Muhammad Nur Apriyanto
 NIM : 2010413116
 Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Tanggal Ujian : Rabu, 9 Juli 2025
 Penguji 2 : Lia Wulandari, S.Sos., MFP

No.	Catatan Perbaikan	Status Perbaikan	Tanda Tangan dan Tanggal Pengajuan Revisi
1.	Tambahkan tupoksi untuk kewenangan setiap lembaga		
2.	Tambahkan tantangan agar tidak normatif		
3.			
4.			
5.			
6.			

LEMBAR PERBAIKAN
HASIL SIDANG SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Nama : Muhammad Nur Apriyanto
 NIM : 2010413116
 Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor Dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Pada Pemilu 2024

Tanggal Ujian : Rabu, 9 Juli 2025
 Penguji 1 : Dr. Ardli Johan, S.IP., M.HI

No.	Catatan Perbaikan	Status Perbaikan	Tanda Tangan dan Tanggal Pengajuan Revisi
1.	Selaraskan Komdigi menjadi Kominfo semua.		
2.	Jelaskan data bersumber dari mana (Body Note)		
3.	Tambahkan tantangan agar tidak terlalu normatif		
4.			
5.			
6.			

Muhammad Nur Apriyanto, 2025
DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL
PADA PEMILU 2024,
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

WAWANCARA



SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Ruruh Sukir Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021 - 7656971, Faks. 021 - 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, www.library.upnvj.ac.id, e-mail: fip@upnvj.ac.id

Nomor : 086 / AUN1/RS/FISIP/2024 25 September 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Permintaan Data

Yth. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Informasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9, RT 002/RW.003, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN "Veteran" Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu kami mengajukan permohonan untuk dapat kiranya mahasiswa/i Kami mendapatkan data terkait riset yang akan dilaksanakan. Data yang akan didapatkan hanya akan digunakan guna mendukung Riset yang akan dilaksanakan.

Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:
N a m a : Muhammad Nur Apriyanto
N I M : 2010413116
Program Studi : S1 Ilmu Politik
Alamat : Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Telepon / Hp : 085777955337
Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024

Demikian permohonan ini Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik disucikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Firda Agustinyas, S. Sos., M. Si
NIK. 210721191

Tembusan:
- Dekan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Rarmah Sakti Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904
Laman : www.upnj.ac.id, www.fkip.upnj.ac.id, e-mail: fkip@upnj.ac.id

Nomor : 025 /UN61/RS/FISIP/2024 25 September 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Permintaan Data

Yth. Ketua
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN "Veteran" Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu kami mengajukan permohonan untuk dapat kiranya mahasiswa/ Kami mendapatkan data terkait riset yang akan dilaksanakan. Data yang akan didapatkan hanya akan digunakan guna mendukung Riset yang akan dilaksanakan.

Adapun mahasiswa/ yang kami maksud adalah:

N a m a : Muhammad Nur Apriyanto
N I M : 2010413116
Program Studi : S1 Ilmu Politik
Alamat : Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Telepon / Hp : 08577795337
Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024

Demikian permohonan ini Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fidia Ayuningtyas, S. Sos., M. Si
NIK: 216121191

Tembusan:
- Dekan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Rarmah Sakti Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904
Laman : www.upnj.ac.id, www.fkip.upnj.ac.id, e-mail: fkip@upnj.ac.id

Nomor : 025 /UN61/RS/FISIP/2024 25 September 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Permintaan Data

Yth. Ketua
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI)
Jl. M.H. Tahir No. 14, RT 8/RW. 4, Gondangdia, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN "Veteran" Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu kami mengajukan permohonan untuk dapat kiranya mahasiswa/ Kami mendapatkan data terkait riset yang akan dilaksanakan. Data yang akan didapatkan hanya akan digunakan guna mendukung Riset yang akan dilaksanakan.

Adapun mahasiswa/ yang kami maksud adalah:

N a m a : Muhammad Nur Apriyanto
N I M : 2010413116
Program Studi : S1 Ilmu Politik
Alamat : Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Telepon / Hp : 08577795337
Judul : Dinamika Relasi Multi-Aktor dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks di Media Sosial pada Pemilu 2024

Demikian permohonan ini Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fidia Ayuningtyas, S. Sos., M. Si
NIK: 216121191

Tembusan:
- Dekan

Muhammad Nur Apriyanto, 2025
DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL
PADA PEMILU 2024,
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnj.ac.id – www.library.upnj.ac.id – www.repository.upnj.ac.id]